



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05 TAHUN 2025
TENTANG
ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05 TAHUN 2025
TENTANG
ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mewujudkan akselerasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI;
- b. bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik akan menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam menjalankan birokrasi pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lemhannas RI tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI;

Mengingat...

-2-

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI TENTANG ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

PERTAMA : Menetapkan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI yang selanjutnya disebut Arsitektur dan Peta Rencana SPBE sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **15 Januari 2025**



GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

DEMI TETAP HASAN SYADZILY, M.Si.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **05 TAHUN 2025**
TANGGAL **15 JANUARI 2025**

ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat menjamin terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Kemajuan teknologi informasi memberikan peluang untuk dapat dimanfaatkan secara luas termasuk dalam pemerintahan. Salah satu usaha dalam mewujudkan pemerintahan yang baik adalah dengan menerapkan tata kelola teknologi informasi yang selaras dengan tujuan organisasi yang diharapkan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Penerapan tata kelola teknologi informasi saat ini sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik mengingat peran teknologi informasi yang semakin penting bagi upaya peningkatan kualitas layanan.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan sebuah bentuk penerapan tata kelola teknologi informasi dalam organisasi yang mengelola sejumlah penyelenggaraan layanan teknologi informasi yang dilengkapi dengan sejumlah kebijakan, proses/aktivitas dan prosedur untuk mendukung implementasi teknologi informasi agar hasilnya sejalan dengan strategi bisnis (strategi organisasi). Dengan demikian, pembangunan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik instansi menjadi sangat penting, untuk menjadi bagian dalam mendukung terwujudnya layanan pemerintah yang terintegrasi secara nasional, baik dalam kegiatan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik yang diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan pemerintahan.

Arsitektur dan peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan cetak biru yang menerjemahkan strategi dan proses bisnis

organisasi...

organisasi menjadi rencana implementasi berbasis digital. Penerapan arsitektur dan peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diharapkan dapat menciptakan keselarasan antara proses bisnis dan teknologi informasi bagi kebutuhan organisasi. Selain itu permasalahan sistem warisan (*legacy system*) yang kompleks dan terpecah-pecah (*fragmented*) baik manual maupun otomatis diharapkan dapat lebih responsif terhadap perubahan dan mendukung strategi organisasi yang ada.

B. Maksud dan Tujuan

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Lembaga Ketahanan Nasional RI disusun dengan maksud untuk mewujudkan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI yang selaras dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Nasional.

Tujuan dari penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Lembaga Ketahanan Nasional RI sebagai berikut:

1. mewujudkan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE yang dapat terintegrasi dalam menghasilkan operasional layanan Lembaga Ketahanan Nasional RI yang terpadu;
2. menyelaraskan konsep, penerapan, dan implementasi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Nasional; dan
3. menciptakan sinergi dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Gubernur Lemhannas RI ini meliputi:

1. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mencakup 6 (enam) domain utama, yaitu:
 - a. proses bisnis;
 - b. layanan SPBE;
 - c. aplikasi SPBE;
 - d. data dan informasi;
 - e. infrastruktur SPBE; dan
 - f. keamanan SPBE.

2. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mencakup 7 (tujuh) domain, yaitu:
 - a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. aplikasi SPBE;
 - e. infrastruktur SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.

D. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Gubernur Lemhannas RI ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
3. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
4. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
5. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
6. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
7. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.

8. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE.
9. Manajemen Data adalah proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi, dengan tujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pemanfaatan data di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI.
10. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
11. Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center* atau DRC) adalah Pusat Data (*Data Center*) cadangan untuk melakukan pencadangan (*backup*) Pusat Data bila terjadi kegagalan, gangguan, atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
12. Tata Kelola Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Tata Kelola TI adalah suatu cabang dari tata kelola organisasi yang terfokus pada sistem teknologi informasi serta manajemen kinerja dan risikonya.
13. Portal Aplikasi adalah *platform* aplikasi *all in one* (satu pintu) untuk mengakses berbagai layanan Lembaga Ketahanan Nasional RI yang keberadaannya akan memudahkan pengguna jika dibandingkan dengan harus mengakses berbagai aplikasi yang ada.
14. RAB adalah singkatan dari referensi arsitektur bisnis yang menjadi kode rujukan arsitektur SPBE nasional pada domain Proses Bisnis.
15. RAL adalah singkatan dari referensi arsitektur layanan yang menjadi kode rujukan arsitektur SPBE nasional pada domain layanan.

16. RAD adalah singkatan dari referensi arsitektur data yang menjadi kode rujukan arsitektur SPBE nasional pada domain data dan informasi.
17. RAA adalah singkatan dari referensi arsitektur aplikasi yang menjadi kode rujukan arsitektur SPBE nasional pada domain aplikasi.
18. RAI adalah singkatan dari referensi arsitektur infrastruktur yang menjadi kode rujukan arsitektur SPBE nasional pada domain infrastruktur.
19. RAK adalah singkatan dari referensi arsitektur keamanan yang menjadi kode rujukan arsitektur SPBE nasional pada domain keamanan.

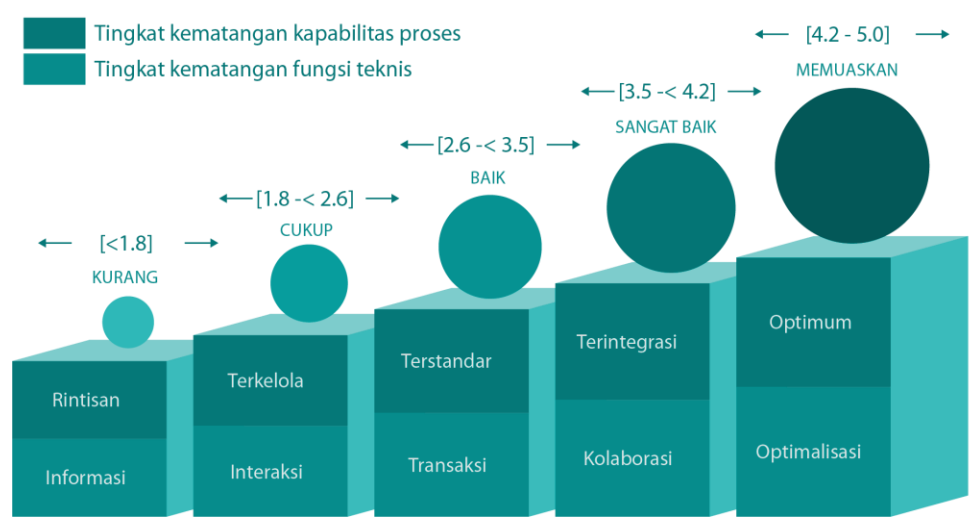
BAB II

ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS

A. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dalam menghadapi kondisi global saat ini, penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam tata kelola pemerintahan bukan lagi menjadi suatu pilihan, tapi sudah menjadi suatu keharusan. Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan TIK mampu menjadi pendukung dalam kegiatan pemerintahan, baik dalam kegiatan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik yang diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan pemerintahan. Hal ini menjadi tujuan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang didalamnya memuat pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna. Berbagai aspek pengaturan dalam peraturan tersebut diharapkan dapat diterapkan secara efektif dan efisien sehingga diharapkan mampu mewujudkan visi SPBE, yaitu “Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi”.

Untuk mengetahui kondisi penerapan SPBE di Lembaga Ketahanan Nasional RI saat ini, dapat menggunakan konsep tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja yang mengukur derajat pengembangan SPBE. Tingkatan kematangan mengarahkan pengembangan SPBE pada keluaran dan dampak yang lebih baik. Tingkat kematangan yang rendah menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang rendah, sedangkan tingkat kematangan yang tinggi menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang lebih tinggi.



Gambar 2.1 Tingkat Kematangan Proses SPBE

Tabel 2.1 Tingkat Kematangan pada Domain Tata Kelola SPBE dan Kebijakan Internal SPBE

Tingkat (Level)	Karakteristik
1 - Rintisan	Proses tata kelola dilaksanakan sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan baik, tanpa pemantauan, dan hasil tidak terprediksi. Kebijakan internal belum tersedia atau masih berbentuk konsep.
2 - Terkelola	Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan, dilaksanakan berdasarkan standar masing-masing unit organisasi. Kebijakan internal telah dilegalisasi, namun pengaturannya bersifat parsial atau sektoral.
3 - Terstandarisasi	Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi oleh semua unit organisasi terkait. Kebijakan internal telah mengatur standar proses tata kelola bagi semua unit organisasi terkait, tetapi belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola.
4 - Terintegrasi	Proses tata kelola dilaksanakan terintegrasi dengan proses tata kelola lain dan terukur kinerjanya secara Kuantitatif. Kebijakan internal telah mengatur integrasi antar proses tata kelola dan mekanisme pengukuran kinerja proses tata kelola tersebut.
5 - Optimum	Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan. Kebijakan internal telah mengatur

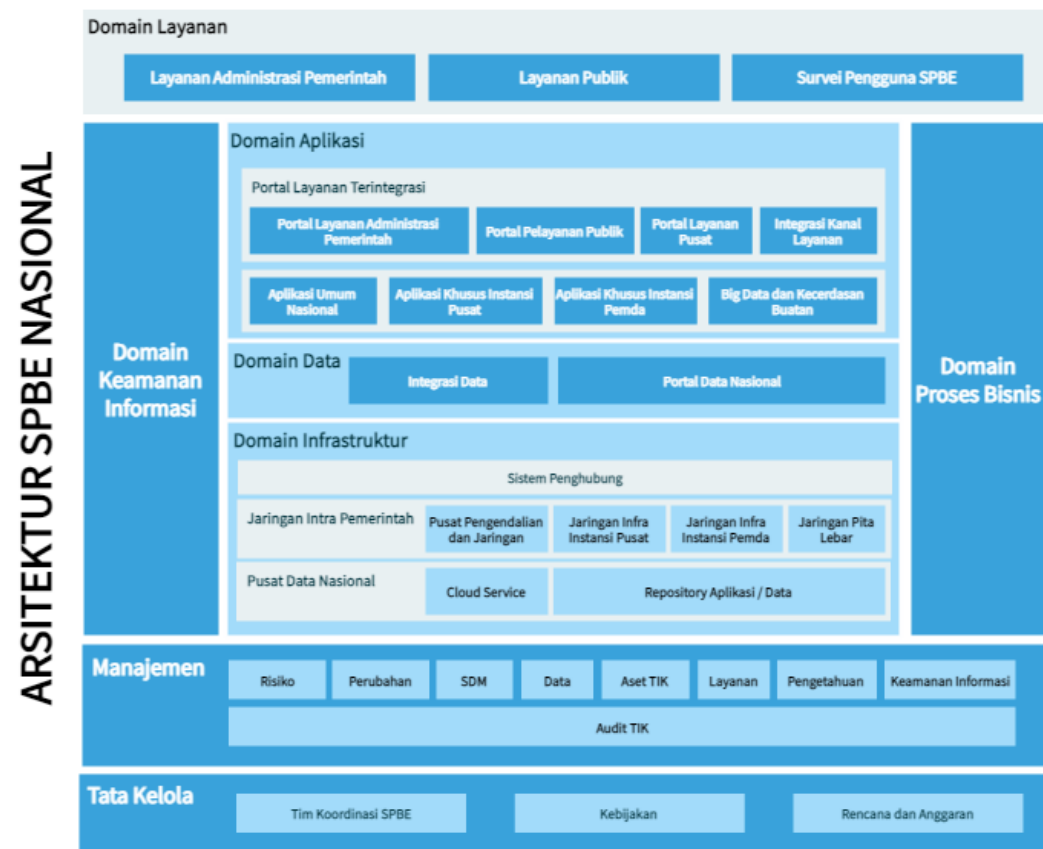
Tingkat (Level)	Karakteristik
	mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen perubahan.

Tabel 2.2 Tingkat Kematangan pada Domain Layanan SPBE

Tingkat (Level)	Kriteria
1 - Informasi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah.
2 - Interaksi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah.
3 - Transaksi	Layanan SPBE diberikan melalui pertukaran informasi dan layanan.
4 - Kolaborasi	Layanan SPBE diberikan melalui integrasi dengan layanan SPBE lain.
5 - Optimalisasi	Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal

B. Arsitektur dan Peta Rencana SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 132 tahun 2022, Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi. Kerangka dasar ini dibentuk dalam sebuah kerangka kerja yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Arsitektur SPBE Nasional yang selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.



Gambar 2.2 Ruang Lingkup Arsitektur SPBE Nasional

Sejak diterbitkannya Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang *electronic government* (e-government) hingga saat ini, penerapan e-gov belum dapat berjalan dengan baik. Dengan diterbitkannya Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE diharapkan dapat memicu penerapan egov tersebut yang kini berganti dengan istilah SPBE dengan lebih baik. Beberapa permasalahan dalam penerapan SPBE yang ditemukan, antara lain:

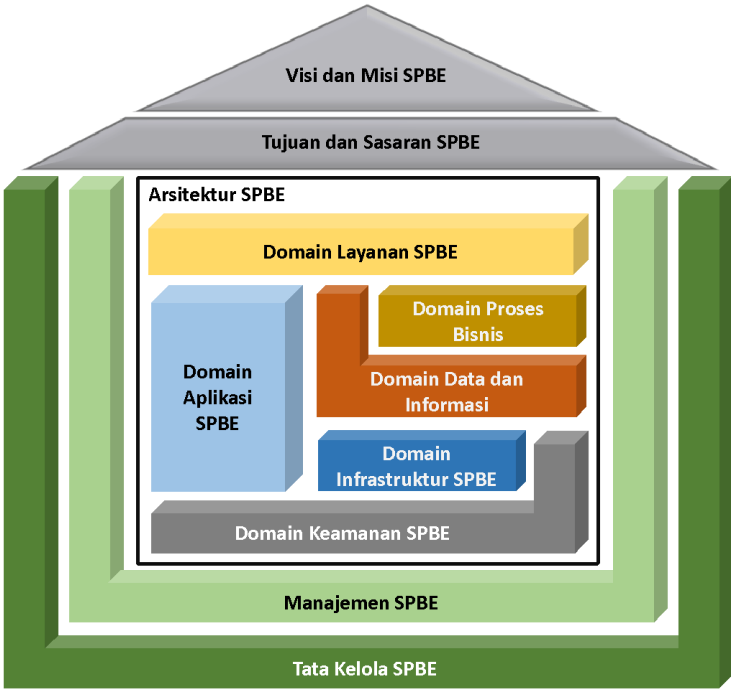
- Belum adanya panduan dalam penyusunan arsitektur SPBE, sehingga Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) membangun dan menyusun Arsitektur SPBE dengan penafsiran yang multidimensi dan menghambat pengintegrasian terpadu secara nasional.
- Berbagai penerapan SPBE atau yang dikenal dengan istilah *e-government* (e-govt) ataupun *digital government* telah dihasilkan oleh IPPD untuk memberi kontribusi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan IPPD. Namun demikian, hasil pengembangan SPBE dan tingkat kematangannya masih sangat beragam antar IPPD. Hal ini tercermin hasil evaluasi SPBE tahun

2020 dimana penerapan SPBE di IPPD dilaksanakan secara sendiri-sendiri (*silo*).

- c. Inisiatif strategis SPBE yang terdiri dari pembentukan dan penguatan kapasitas Tim Koordinasi SPBE, sebagai penyelenggara SPBE dan penguatan kebijakan SPBE perlu lebih dipacu guna penyelarasan proses pembangunan dan penerapan SPBE di IPPD. Pemantauan dan evaluasi SPBE perlu dilaksanakan terutama terhadap program/kegiatan inisiatif strategis yang tercantum ada Rencana Induk yang terlampir.

Mengacu pada definisi dalam Perpres RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing. Pemerintah Republik Indonesia telah mencanangkan perencanaan pembangunan yang dijabarkan dalam bentuk RPJPN (periode 20 tahun) yang terbagi dalam 4 (empat) RPJMN (periode 5 tahun). Perencanaan tersebut berisi program dan kegiatan yang akan dilakukan secara nasional dan disusun secara terstruktur.

Adapun tujuan dari disusunnya Peraturan Presiden RI Nomor 132 tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE ini adalah penyamaan pemahaman atas penyelenggaraan SPBE secara menyeluruh pada setiap IPPD, standardisasi penyusunan dokumen arsitektur SPBE IPPD sehingga menghasilkan dokumen arsitektur SPBE yang dapat terintegrasi dalam menghasilkan operasional layanan pemerintah yang terpadu secara nasional, petunjuk teknis untuk penyelenggara SPBE dalam menyusun arsitektur SPBE IPPD pada domain proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE hingga terbentuknya metadata arsitektur SPBE yang diperlukan dalam pengintegrasian arsitektur SPBE baik dalam IPPD ataupun secara nasional, menghilangkan silo-minded yang masih banyak terjadi di IPPD.



Gambar 2.3 Kerangka Kerja Arsitektur SPBE Nasional

Selanjutnya, dalam menyusun arsitektur SPBE Nasional diperlukan beberapa komponen penyusun arsitektur SPBE yang diperlukan sebagai model referensi dan penjabaran rinci terkait informasi substansi arsitektur. Komponen penyusun tersebut antara lain:

- a. referensi arsitektur;
- b. metadata arsitektur; dan
- c. domain arsitektur.

Ketiga komponen ini saling berkaitan dan memiliki peranan penting dalam penyusunan Arsitektur SPBE Nasional karena menggambarkan informasi detail terhadap tata kelola SPBE Nasional, dimana ketiga komponen tersebut juga harus diselaraskan dalam penyusunan arsitektur SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.



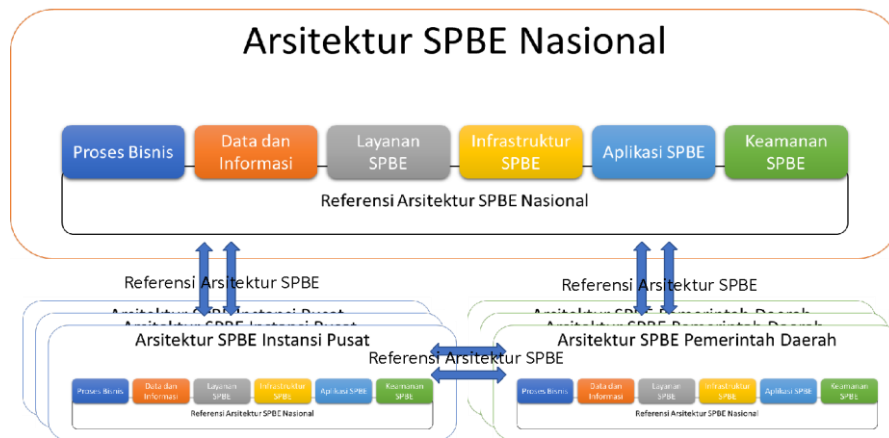
Gambar 2.4 Komponen penyusun Arsitektur SPBE

Langkah awal dalam penyusunan Arsitektur SPBE Nasional adalah dengan mendefinisikan visi dan misi dalam penyelenggaraan SPBE. Selanjutnya didefinisikan juga visi disusunnya Arsitektur SPBE Nasional. Metode penyusunan arsitektur SPBE Nasional mencakup Pendefinisian visi dan misi SPBE, Pendefinisian visi Arsitektur SPBE Nasional, Penyusunan Referensi Arsitektur SPBE Nasional, Penyusunan Domain Arsitektur SPBE Nasional, Pengisian Metadata Arsitektur SPBE Nasional, Penyusunan Manajemen Risiko dalam Penerapan Arsitektur SPBE Nasional dan Penyusunan Manajemen Perubahan dalam Penerapan Arsitektur SPBE Nasional.

Sedangkan Referensi arsitektur mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur. Dalam hal penyusunan referensi arsitektur, perlu dipahami bersama prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan referensi arsitektur agar referensi arsitektur yang disusun oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki pola pemahaman dan penyusunan yang selaras. Beberapa prinsip tersebut, di antaranya:

- a. Bertujuan untuk mengelompokkan domain arsitektur sejenis.
- b. Bersifat umum, dapat dengan mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh penyelenggara SPBE.
- c. Mempunyai dasar hukum yang kuat. Sebagai acuan penetapan sebuah referensi arsitektur dapat digunakan regulasi dan peraturan terkait pembentukan instansi (untuk proses bisnis, data dan informasi, dan layanan serta aplikasi), sedangkan untuk Infrastruktur SPBE dan Keamanan SPBE dapat digunakan kajian-kajian ilmiah sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada.
- d. Sebagai bahasa pemersatu. Referensi Arsitektur SPBE akan digunakan oleh seluruh penyelenggara SPBE. Untuk itu kesamaan pemahaman atas referensi sangat diperlukan agar dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dalam pengintegrasian sistem pemerintahan yang ada.

Kesamaan pemahaman ini berperan penting dalam proses pengintegrasian Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintahan Daerah agar selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional.



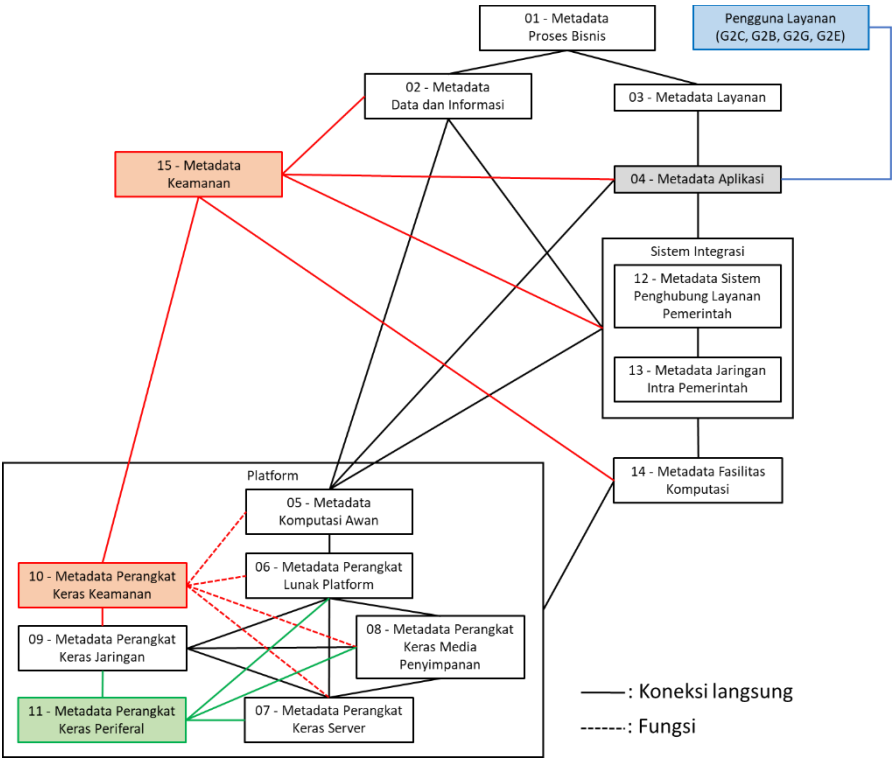
Gambar 2.5 Keterkaitan Domain Arsitektur SPBE Nasional dan IPPD

Sebagai panduan dalam tata kelola SPBE di IPPD, diperlukan Domain Arsitektur SPBE Nasional. Domain Arsitektur SPBE ini diharapkan dapat menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan secara nyata pada IPPD. Kolaborasi dan integrasi baik dari sisi aplikasi maupun infrastruktur dalam menghasilkan layanan pada proses bisnis tertentu, dimana hal itu semua didukung oleh pelaksanaan manajemen SPBE yang komprehensif didalamnya termasuk pelaksanaan Audit TIK, serta terselenggara dengan tata kelola SPBE yang baik. Tidak hanya dapat melihat adanya duplikasi aplikasi maupun infrastruktur saja, dengan penerapan Domain Arsitektur SPBE yang saling terkait ini, diharapkan dapat memberikan kondisi riil pelaksanaan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi di tingkat nasional.

Penerapan Arsitektur SPBE menjadi alat yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya tumpang tindih pelaksanaan proses bisnis dan layanan pemerintahan di IPPD. Hal ini tentu saja dapat menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan agar dapat mewujudkan kinerja pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, menuju terwujudnya *collaborative* dan *smart government*. Domain arsitektur mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur layanan SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur infrastruktur SPBE dan domain arsitektur layanan SPBE.

Arsitektur SPBE memiliki Metadata Arsitektur SPBE yang merupakan model terstruktur untuk memudahkan penggambaran

hubungan antar Domain Arsitektur SPBE tersebut. Metadata Arsitektur SPBE memudahkan dalam mengelola, mengidentifikasi, dan melakukan pencarian (proses menemukan - 14 - embaga) terhadap domain arsitekturnya. Setiap Metadata Arsitektur SPBE memiliki beberapa atribut yang berupa karakteristik/ciri yang merepresentasikan entitas yang terdapat pada Metadata Arsitektur SPBE secara lebih jelas. Metadata Arsitektur SPBE ini dapat merepresentasikan entitas yang terdapat pada Arsitektur SPBE secara lebih jelas. Oleh karena itu, dapat disusun sebuah model metadata (metamodel) yang menggambarkan hubungan antara entitas-entitas yang ada dalam Arsitektur SPBE. Model Metadata Arsitektur SPBE Nasional ini dapat dijadikan pedoman/acuan bagi kementerian/lembaga/ daerah dalam menyusun Arsitektur SPBE-nya masing-masing.



Gambar 2.6 Relasi Metadata Arsitektur SPBE

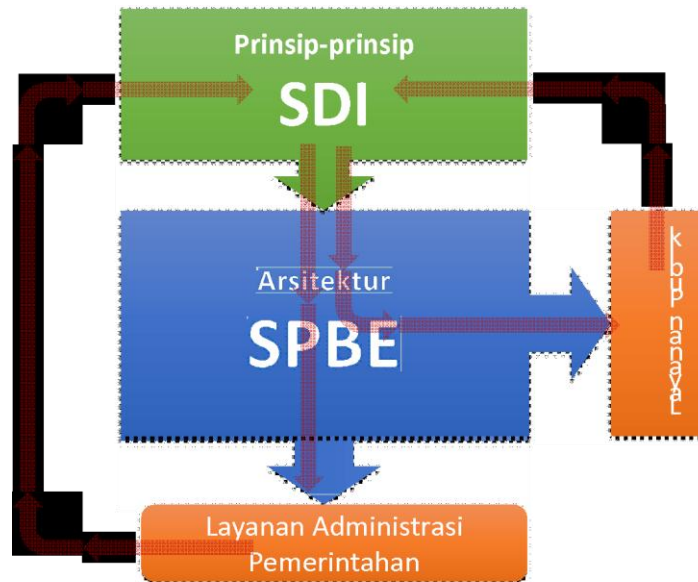
Penyusunan, penerapan, dan pengelolaan Arsitektur SPBE Nasional merupakan tanggung jawab bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional khususnya bagi Instansi Pusat yang menjadi pengampu domain arsitektur SPBE Nasional. Agar proses penyusunan, penerapan, dan pengelolaan Arsitektur SPBE Nasional dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan tata kelola Arsitektur SPBE Nasional yang mengatur tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam struktur manajemen

arsitektur SPBE. Struktur manajemen arsitektur SPBE merupakan struktur ex-officio yang menjalankan tugas tambahan terkait penyusunan, penerapan, dan pengelolaan arsitektur SPBE.

Subtansi Arsitektur SPBE Nasional Domain Proses Bisnis dapat ditemukan dengan menganalisa RPJMN. Sedangkan subtansi arsitektur proses bisnis untuk Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintahan Daerah dapat ditemukan pada perencanaan pembangunan masing-masing dalam bentuk RPJMD ataupun Rencana Strategis (Renstra). Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB) digunakan sebagai acuan dalam menentukan jenis atau tipe dari sebuah bisnis/urusan/fungsi/proses yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan selalu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada. Tugas dan fungsi dari instansi tersebut dinyatakan secara tersurat pada peraturan dan perundang-undangan pembentukan sebuah instansi penyelenggara pemerintahan. Hal ini menjadi dasar dalam pengidentifikasian substansi proses bisnis yang ada.

Proses bisnis sebagai gambaran atas tugas dan fungsi instansi tentunya bersifat tetap selama instansi tersebut berdiri. Sifat ini yang menjadi prinsip utama dalam mengidentifikasi substansi domain proses bisnis dari instansi tersebut. Tugas dan fungsi tersebut perlu diuraikan berdasarkan entitas proses bisnis tersendiri dengan memisahkan setiap tugas dan fungsi tersendiri. Proses ini akan menghasilkan sebuah daftar proses bisnis yang ada di lingkungan organisasi terkait. Setelah dilakukan penguraian seluruh entitas proses bisnis di lingkungan instansi, entitas proses bisnis ini perlu dikelompokkan berdasarkan kesamaan yang ada pada nomenklatur entitas proses bisnis secara tidak bergantung pada nama unit kerja terkait.

Selain itu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, didefinisikan bahwa data dan informasi dalam SPBE mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain. Dengan definisi seperti ini, maka dapat dikatakan bahwa SPBE perlu meliputi seluruh jenis data dan informasi yang ada di Indonesia.



Gambar 2.7 Hubungan Satu Data Indonesia dan SPBE

Pengaturan terhadap data dan informasi yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan data lainnya akan menjadi masukan pada manajemen pengetahuan sebagai *big data* yang dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi untuk pengambilan keputusan ataupun kebijakan yang lebih akurat. Data dan informasi yang dimiliki oleh sebuah instansi merupakan kumpulan hasil kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam melakukan pelayanan instansi tersebut sebagai pengampu proses bisnis tertentu. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, data dan informasi sebuah instansi akan dipertanggung-jawabkan oleh Walidata. SPBE diharapkan dapat menggunakan data dan informasi dari walidata terkait. Penggunaan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, akan menghasilkan luaran yang baik berbentuk informasi ataupun kebijakan-kebijakan yang lebih tepat dan akurat.

Seperti halnya pada referensi arsitektur proses bisnis, referensi arsitektur Layanan SPBE (RAL) merupakan hasil penguraian dari tugas dan fungsi yang tercantum pada peraturan dan perundang-undangan terkait pendirian instansi terkait. Jika pada proses bisnis diurai bidang/area/cakupan dari tugas dan fungsi, pada layanan SPBE, diurai kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Dalam penguraian Layanan SPBE ini, perlu diperhatikan beberapa kriteria sebagai berikut:

- berbentuk kegiatan/pelaksanaan yang bersifat aksi;
- memiliki target layanan yang jelas (G2C, G2B, G2G, atau G2E);
- memiliki target capaian yang jelas dengan batasan waktu; dan

- d. biasanya nomenklatur utama terletak di awal kalimat.

Dengan berbekal pada kriteria di atas, hasil penguraian tugas dan fungsi pada regulasi dan perundang-undangan terkait akan berbeda dengan hasil pada penguraian proses bisnis. Salah satu tujuan pengelompokan layanan yang dilakukan ini bertujuan untuk mendapatkan bentuk layanan-layanan yang serupa sehingga dapat dilakukan penyederhanaan proses dalam menghasilkan hasil yang diharapkan.

Setelah proses penguraian tersebut di atas, proses yang dilakukan akan sama seperti pada proses bisnis hingga menghasilkan daftar usulan referensi arsitektur Layanan SPBE. Untuk mendapatkan informasi terhadap seluruh layanan yang ada dalam pembangunan di Indonesia, IPPD diharapkan dapat menyusun dan menetapkan seluruh layanan yang terdapat pada RPJMD/Renstra. Proses Bisnis, Data dan Informasi, Layanan SPBE, dan Aplikasi SPBE terkait erat dengan tugas dan fungsi dari sebuah instansi. Dengan demikian dalam rangka menetapkan aplikasi yang ada, perlu memperhatikan Layanan SPBE yang didukung. Hal ini berlaku baik untuk Aplikasi Umum maupun Aplikasi Khusus.

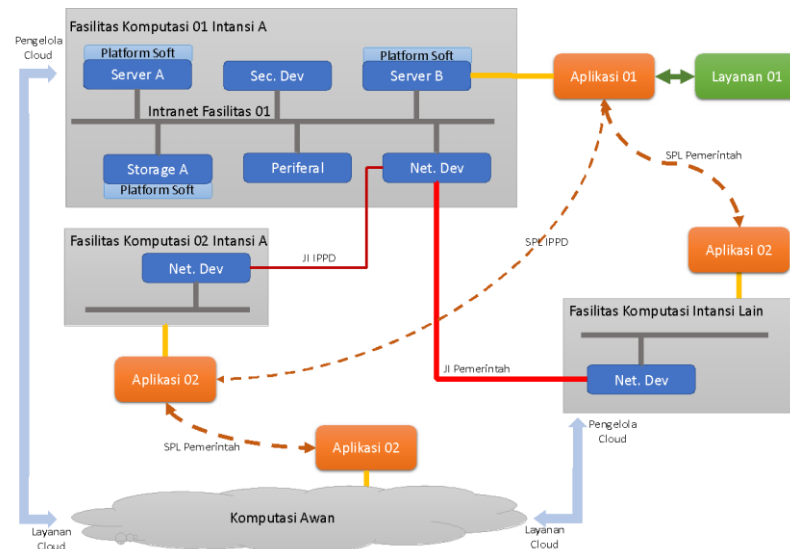
Aplikasi SPBE akan menggunakan data dan informasi baik yang dimiliki sendiri oleh instansi tersebut sebagai walidata, maupun data dan informasi yang dimiliki oleh walidata lain dengan menggunakan Infrastruktur SPBE sebagai wahana. Aplikasi akan menghasilkan manfaat yang sesuai dengan Layanan SPBE yang didukung. Pengintegrasian Aplikasi SPBE memungkinkan terbentuknya Layanan SPBE yang terintegrasi. Prinsip-prinsip dalam pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE akan diatur tersendiri dalam pedoman standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum maupun Aplikasi Khusus yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Sebuah Aplikasi Umum akan digunakan secara berbagai oleh seluruh IPPD yang membutuhkan fungsi dari aplikasi umum ini. Dengan demikian dalam pembangunan dan pengembangannya, IPPD perlu mendapatkan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Sebagai tingkat 3 (tiga) pada Referensi Arsitektur Aplikasi mengacu pada Area Layanan

(Referensi Arsitektur Layanan SPBE tingkat 2) dan untuk penetapan Referensi Arsitektur Aplikasi tingkat 4 (empat) perlu memperhatikan pertimbangan terkait. Dalam membangun aplikasi khusus, IPPD perlu mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Dengan demikian dapat diusulkan referensi arsitektur yang sesuai dalam mengelompokan aplikasi yang dibangun. Selain itu dalam menyusun dan membangun domain arsitektur aplikasi, IPPD perlu memperhatikan standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi terkait.

Seperti halnya aplikasi, penyelenggaraan infrastruktur SPBE perlu dijelaskan dengan rinci dengan banyaknya ragam infrastruktur TIK yang digunakan, maka perlu adanya kesamaan persepsi mengenai penggunaan TIK dalam SPBE. Infrastruktur SPBE terbagi menjadi 3 berdasarkan penyelenggaranya, yaitu Infrastruktur SPBE Nasional, diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, infrastruktur SPBE Instansi Pusat, diselenggarakan oleh masing-masing pimpinan Instansi Pusat, Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah, diselenggarakan oleh masing-masing kepala daerah.

Pada tahap awal penyelenggaraan SPBE, perlu dilakukan pemetaan secara keseluruhan baik atas infrastruktur yang diselenggarakan secara nasional, maupun yang diselenggarakan oleh IPPD. Untuk itu diperlukan informasi secara detil atas arsitektur infrastruktur yang dimiliki oleh IPPD. Dengan dilengkapinya atribut metadata yang diperlukan, dapat disusun Arsitektur Infrastruktur SPBE menggunakan relasi metadata arsitektur/metamodel SPBE. Untuk penyajian luarannya dapat menggunakan aplikasi untuk pengolahan *enterprise architecture* (EA Tool Applications). Bentuk luaran dari Arsitektur Infrastruktur SPBE.



Gambar 2.8 Ilustrasi Sederhana Arsitektur Infrastruktur SPBE

Arsitektur keamanan SPBE sedikit berbeda dengan metode penyusunan domain arsitektur SPBE lainnya. Pada penyusunan domain arsitektur keamanan SPBE, pendefinisian domain atau substansi arsitektur SPBE dilakukan dengan melakukan pengisian metadata arsitekturnya. Berbeda dengan Arsitektur SPBE pada domain lainnya, keamanan TIK (*cyber security*) sangat bergantung pada peran aktif pengelola asset TIK terkait. Menghadapai hal ini telah diterbitkan sebuah regulasi Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dapat dijadikan acuan IPPD dalam menyelenggarakan/ mengelola manajemen keamanan di instansi masing-masing.

Subtansi domain Keamanan SPBE akan menggambarkan kematangan manajemen keamanan yang dilakukan oleh IPPD sebagai penyelenggara SPBE. Terdapat berbagai standar dan acuan dalam pengelolaan keamanan TIK, baik berupa standar internasional terhadap spesifik entitas infrastruktur tertentu ataupun secara umum ataupun berupa peraturan internal instansi pemerintahan yang ada. Audit TIK merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen keamanan TIK pada penyelenggaraan SPBE. Semua kegiatan audit keamanan TIK, baik audit keamanan aplikasi ataupun audit keamanan infrastruktur yang dilakukan oleh internal dan eksternal selama kurun waktu 2 tahun terakhir.

Kegiatan-kegiatan instansi dalam rangka manajemen keamanan TIK selama kurun waktu setahun terakhir dirangkum pada sebuah atribut tersendiri. Kelompok kegiatan penerapan manajemen keamanan yang dicatatkan diantaranya edukasi kesadaran keamanan SPBE, penilaian kerentanan keamanan SPBE, peningkatan keamanan SPBE, penangan insiden keamanan SPBE. Penggunaan teknologi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu dikawal dengan penggunaan teknologi yang layak dari sisi keamanan. Untuk itu dilakukan uji kelayakan baik pada aplikasi umum dan juga infrastruktur yang digunakan. Rekomendasi kelayakan keamanan SPBE diperlukan IPPD untuk menunjukkan penggunaan teknologi TIK yang layak.

Perlu diperhatikan dalam penyusunan arsitektur ini adalah Arsitektur SPBE Instansi Pusat ataupun Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah merupakan bagian dari Arsitektur SPBE Nasional. Sehingga wawasan yang perlu dibangun perlu dikembangkan pada lingkup nasional (bukan sektoral). Dengan demikian IPPD yang membangun arsitekturnya perlu memastikan keselarasan arsitektur yang disusun dengan Arsitektur SPBE Nasional.

Demikian juga dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam SPBE perlu dipahami secara bersama-sama sehingga memudahkan pengintegrasian seluruh arsitektur SPBE yang ada dalam Arsitektur SPBE Nasional. Pada pedoman ini diterangkan kembali terkait pemahaman-pemahaman yang diperlukan untuk penyusunan arsitektur SPBE IPPD. Diharapkan akan dapat membantu dalam penyamaan pemahaman yang benar bagi penyelenggara SPBE di IPPD.

Dalam Arsitektur SPBE Nasional terdapat enam komponen berupa taksonomi referensi arsitektur di tingkat nasional yang menjadi acuan oleh setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (IPPD), dalam setiap domain arsitektur SPBE Nasional, sesuai dengan struktur yang telah ditentukan.

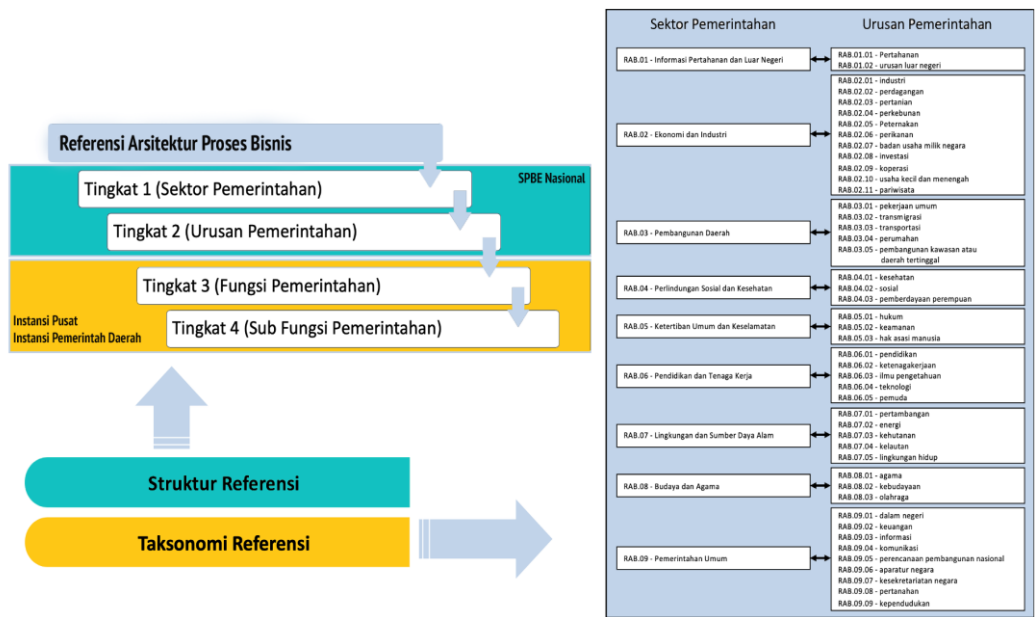
1. Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)

Dalam domain arsitektur proses bisnis pemerintahan yang diemban oleh instansi pemerintah, selanjutnya diklasifikasikan substansi proses bisnis pemerintahan ke dalam tingkatan struktur domain arsitektur proses bisnis berupa 4 (empat) tingkat, yaitu:

- a. Sektor pemerintahan, yang mengelompokkan substansi proses bisnis pemerintahan ke dalam sektor pemerintahan

- sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. Urusan pemerintahan, yang menjelaskan turunan dari sektor pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh UU, dikelompokkan ke dalam urusan pemerintahan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
 - c. Fungsi pemerintahan, yang menjelaskan lebih rinci dari urusan pemerintahan di tingkat nasional sebagai tingkat 3 (ketiga), yang selanjutnya IPPD mendefinisikan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan merelasikan ke tingkat nasional;
 - d. Sub fungsi pemerintahan yang menjelaskan lebih rinci dari fungsi pemerintahan sebagai tingkat 4 (empat). IPPD dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan dan layanan terintegrasi yang akan dibangun sebagai bagian dari layanan digital nasional.

Adapun gambaran mengenai referensi arsitektur proses bisnis dijelaskan pada gambar berikut ini.



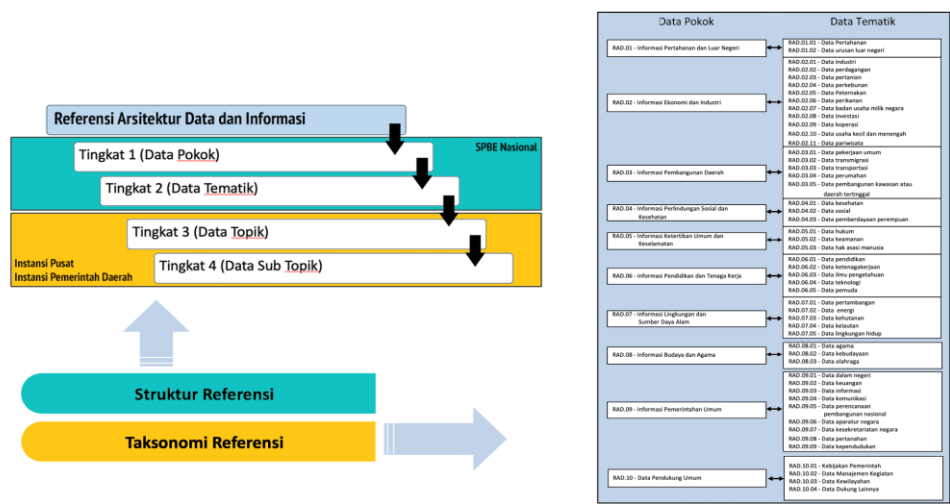
Gambar 2.9 Taksonomi Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)

2. Struktur Referensi Arsitektur Data (RAD)

Dalam domain arsitektur data dan informasi yang dihasilkan dari berbagai aktivitas dalam proses bisnis pemerintahan, selanjutnya diklasifikasikan substansi data dan informasi kedalam tingkatan struktur domain arsitektur data dan informasi berupa 4 (empat) tingkat, yaitu:

- a. Data pokok, yang mengelompokkan data ke dalam data yang dihasilkan pada sektor pemerintahan dan data pendukung umum sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. Data tematik, yang menjelaskan urusan pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh UU, dikelompokkan ke dalam data tematik urusan pemerintahan dan uraian data pendukung umum sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- c. Data topik, yang menjelaskan lebih rinci dari data tematik di tingkat nasional sebagai tingkat 3 (ketiga), yang selanjutnya IPPD mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan merelasikan ke tingkat nasional;
- d. Data sub topik, yang menjelaskan lebih rinci dari data topik sebagai tingkat 4 (empat). IPPD dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan data dan informasi yang dibutuhkan dalam membangun layanan terintegrasi sebagai bagian dari layanan digital nasional, serta kebutuhan operasional aplikasi.

Adapun gambaran mengenai referensi arsitektur data dijelaskan pada gambar berikut ini.



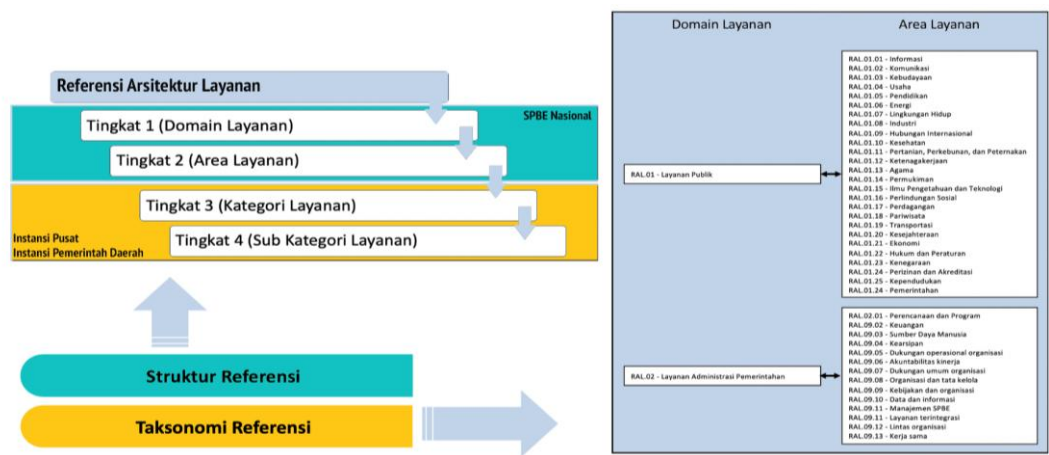
Gambar 2.10 Taksonomi Referensi Arsitektur Data (RAD)

3. Struktur Referensi Arsitektur Proses Layanan (RAL)

Dalam domain arsitektur layanan SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya diklasifikasikan substansi layanan SPBE ke dalam tingkatan struktur domain arsitektur layanan SPBE berupa 4 (empat) tingkat, yaitu:

- a. Domain layanan, yang mengelompokkan layanan pemerintahan ke dalam domain layanan pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. Area layanan, yang menjelaskan area layanan pemerintah sesuai dengan target layanan, dikelompokkan ke dalam area layanan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- c. Kategori layanan, yang menjelaskan layanan pemerintah yang merupakan layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh IPPD sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga);
- d. Sub kategori layanan, yang menjelaskan lebih rinci dari kategori layanan sebagai tingkat 4 (empat). IPPD dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional nasional.

Adapun gambaran mengenai referensi arsitektur layanan dijelaskan pada gambar berikut ini.



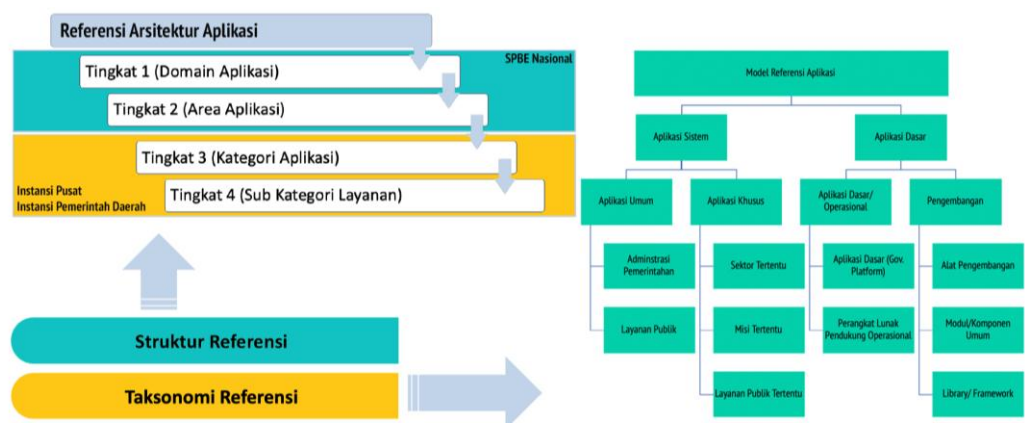
Gambar 2.11 Taksonomi Referensi Arsitektur Layanan (RAL)

4. Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA)

Dalam domain arsitektur aplikasi SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya diklasifikasikan substansi aplikasi SPBE ke dalam tingkatan struktur domain arsitektur aplikasi SPBE berupa 4 (empat) tingkat, yaitu:

- a. Domain aplikasi, yang mengelompokkan aplikasi pemerintah ke dalam 2 (dua) domain aplikasi pemerintah, sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. Area aplikasi, yang menjelaskan area aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan, sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- c. Kategori aplikasi, yang menjelaskan aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh IPPD sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga);
- d. Sub kategori aplikasi, yang menjelaskan lebih rinci dari kategori aplikasi sebagai tingkat 4 (empat). IPPD dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

Adapun gambaran mengenai referensi arsitektur aplikasi dijelaskan pada gambar berikut ini.



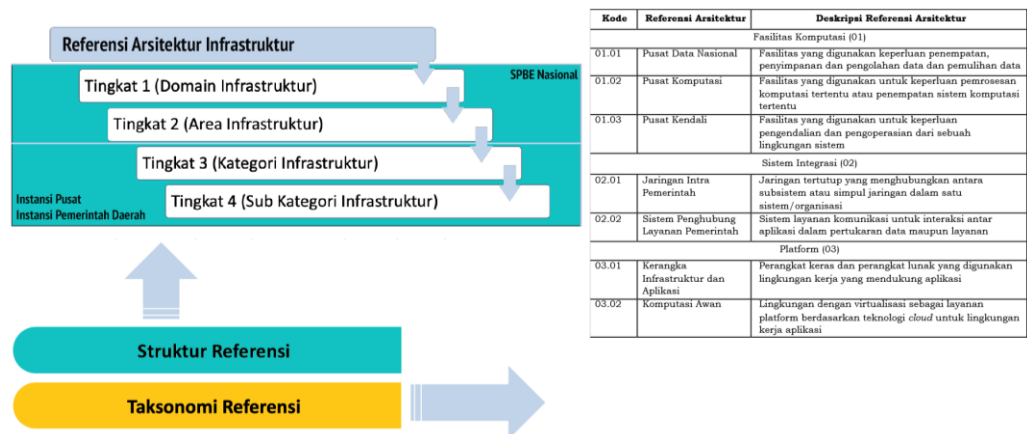
Gambar 2.12 Taksonomi Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA)

5. Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)

Dalam domain arsitektur infrastruktur SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya substansi infrastruktur SPBE diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur domain arsitektur infrastruktur SPBE berupa 3 (tiga) tingkat, yaitu:

- a. Domain infrastruktur, yang mengelompokkan infrastruktur ke dalam domain infrastruktur sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. Area infrastruktur, yang menjelaskan area infrastruktur sesuai dengan domain infrastruktur dalam mendukung pengelolaan aplikasi serta data dan informasi, dikelompokkan ke dalam area infrastruktur sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- c. Kategori infrastruktur, yang menjelaskan lebih rinci dari area infrastruktur, sebagai tingkat 3 (ketiga), yang menjadi struktur di tingkat nasional.

Adapun gambaran mengenai referensi arsitektur infrastruktur dijelaskan pada gambar berikut ini.



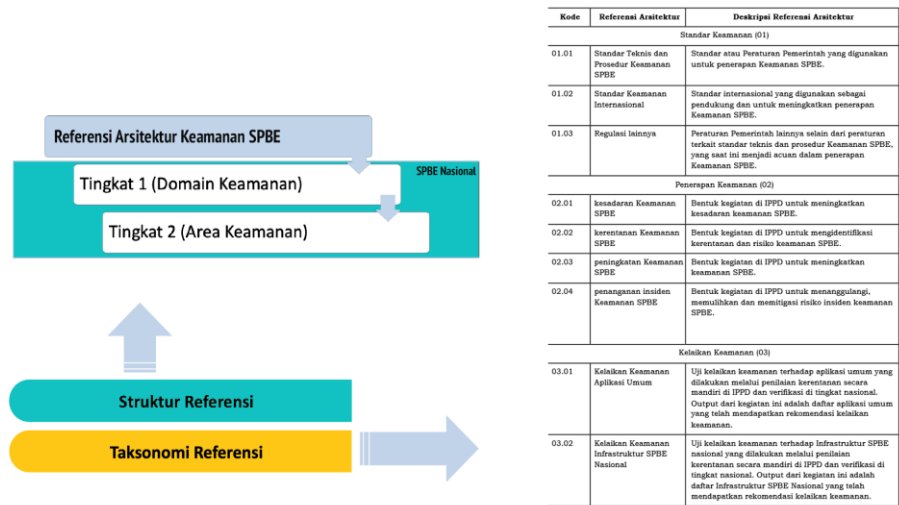
Gambar 2.13 Taksonomi Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)

6. Struktur Referensi Arsitektur Keamanan Informasi

Dalam domain arsitektur keamanan SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya substansi keamanan SPBE diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur domain arsitektur keamanan SPBE berupa 2 (dua) tingkat, yaitu:

- a. Domain keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam domain keamanan terdiri dari standar keamanan, penerapan keamanan dan pertimbangan kelayakan keamanan, sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. Area keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam area keamanan terhadap data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional.

Adapun gambaran mengenai referensi arsitektur keamanan informasi dijelaskan pada gambar berikut ini.



Gambar 2.14 Taksonomi Referensi Arsitektur Keamanan Informasi

BAB III

ARSITEKTUR SPBE

A. Arsitektur Domain Proses Bisnis

Arsitektur Proses bisnis menggambarkan kondisi mengenai proses yang dilakukan di masing-masing unit kerja sesuai ketugasan dan fungsi berdasarkan dokumen peta proses bisnis Lembaga Ketahanan Nasional RI. Pemetaan proses bisnis di masing-masing unit kerja ini selanjutnya dianalisis untuk dipetakan ke dalam taksonomi Referensi Arsitektur Proses Bisnis SPBE Nasional.

1. Arsitektur Proses Bisnis

Dalam domain arsitektur proses bisnis pemerintahan yang diemban oleh instansi pemerintah, selanjutnya diklasifikasikan substansi proses bisnis pemerintahan ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur proses bisnis yang terdiri dari 4 (empat) tingkat, yaitu:

- a. sektor pemerintahan, yang mengelompokkan substansi proses bisnis pemerintahan ke dalam sektor pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional.
- b. urusan pemerintahan, yang menjelaskan turunan dari sektor pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang, dikelompokkan kedalam urusan pemerintahan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional.
- c. fungsi pemerintahan, yang menjelaskan lebih rinci dari urusan pemerintahan di tingkat nasional sebagai tingkat 3 (ketiga).
- d. sub fungsi pemerintahan yang menjelaskan lebih rinci dari fungsi pemerintahan sebagai tingkat 4 (keempat).

Tabel 3.1 Arsitektur Proses Bisnis Lembaga Ketahanan Nasional RI

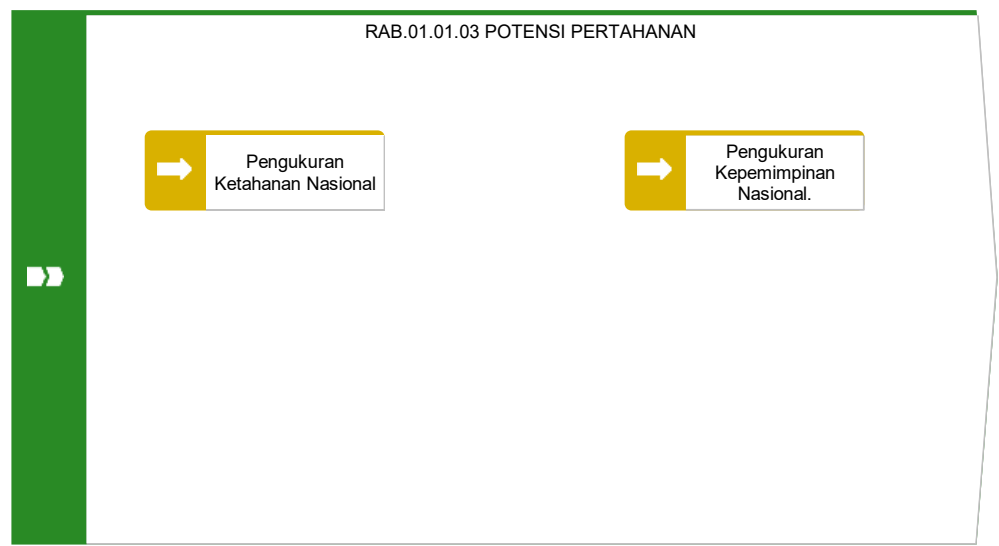
Probis Level 1	Probis Level 2	Kode Proses Bisnis Level 3	Nama Probis Level 3	Kode Proses Bisnis Level 4	Nama Proses Bisnis Level 4
RAB.01 Pertahanan dan Luar Negeri	RAB.01.01 Pertahanan	RAB.01.01.03	Potensi Pertahanan	LEMHANNAS-DAB.01.01.03.01	Pengukuran Ketahanan Nasional
				LEMHANNAS-DAB.01.01.03.02	Pengukuran Kepemimpinan Nasional.
		RAB.01.01.04	Kekuatan Pertahanan	LEMHANNAS-DAB.01.01.04.01	Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Program dan Pengembangan Pendidikan
				LEMHANNAS-DAB.01.01.04.02	Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pembinaan Peserta Pendidikan
				LEMHANNAS-DAB.01.01.04.03	Perencanaan dan Pelaksanaan Operasional Pendidikan
				LEMHANNAS-DAB.01.01.04.04	Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Materi dan Penilaian Peserta Pendidikan
	RAB.01.02 Urusan Luar Negeri	RAB.01.02.02	Hukum dan Perjanjian Internasional	LEMHANNAS-DAB.01.02.02.01	Pengelolaan Kerja Sama Dalam Negeri
				LEMHANNAS-DAB.01.02.02.02	Pengelolaan Kerja Sama Luar Negeri
				LEMHANNAS-DAB.01.02.02.03	Pengelolaan Hukum.
RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.03 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	RAB.06.03.01	Rekomendasi Kebijakan Berbasis Riset	LEMHANNAS-DAB.06.03.01.01	Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Program Pengembangan Pengkajian
				LEMHANNAS-DAB.06.03.01.02	Pelaksanaan Kajian Bidang Ideologi dan Politik
				LEMHANNAS-DAB.06.03.01.03	Pelaksanaan Kajian Bidang Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam

Probis Level 1	Probis Level 2	Kode Proses Bisnis Level 3	Nama Probis Level 3	Kode Proses Bisnis Level 4	Nama Proses Bisnis Level 4
				LEMHANNAS-DAB.06.03.01.04	Pelaksanaan Kajian Bidang Sosial Budaya dan Demografi
				LEMHANNAS-DAB.06.03.01.05	Pelaksanaan Kajian Bidang Pertahanan, Keamanan dan Geografi
RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.05	Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Akses Informasi	LEMHANNAS-DAB.08.02.05.01	Pengelolaan Perpustakaan
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.01	Perencanaan dan Penganggaran Apbn	LEMHANNAS-DAB.09.02.01.01	Pengelolaan Perencanaan Anggaran
		RAB.09.02.07	Monitoring dan Evaluasi Anggaran	LEMHANNAS-DAB.09.02.07.01	Pengelolaan Pemantauan dan Evaluasi Program Anggaran
		RAB.09.02.08	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	LEMHANNAS-DAB.09.02.08.01	Pengelolaan Keuangan
		RAB.09.02.11	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	LEMHANNAS-DAB.09.02.11.01	Pengelolaan Sarana Prasarana
	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.01	Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Informatika	LEMHANNAS-DAB.09.03.01.01	Pengelolaan jaringan
		RAB.09.03.02	Penatakelolaan Aplikasi Informatika	LEMHANNAS-DAB.09.03.02.01	Pengelolaan Sistem Informasi
	RAB.09.04 Komunikasi	RAB.09.04.02	Pengelolaan Komunikasi Publik	LEMHANNAS-DAB.09.04.02.01	Pengelolaan Penerangan
				LEMHANNAS-DAB.09.04.02.02	Pengelolaan Protokol dan Peliputan
				LEMHANNAS-DAB.09.04.02.03	Pengelolaan Komunikasi dan Elektronik
	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.01	Penataan Sistem Tata Laksana	LEMHANNAS-DAB.09.06.01.01	Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana
		RAB.09.06.03	Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur	LEMHANNAS-DAB.09.06.03.01	Pengelolaan Sumber Daya Manusia
		RAB.09.06.04	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi,	LEMHANNAS-DAB.09.06.04.01	Pengelolaan Fasilitasi Reformasi Birokrasi

Probis Level 1	Probis Level 2	Kode Proses Bisnis Level 3	Nama Probis Level 3	Kode Proses Bisnis Level 4	Nama Proses Bisnis Level 4
			Pengawasan, dan Akuntabilitas Kinerja	LEMHANNAS-DAB.09.06.04.02	Pengelolaan Pengawasan Program Anggaran
				LEMHANNAS-DAB.09.06.04.03	Pengelolaan Pengawasan Sumber Daya
				LEMHANNAS-DAB.09.06.04.04	Proses Pengelolaan Pengawasan Administrasi Keuangan.
		RAB.09.06.06	Penyelenggaraan Kearsipan	LEMHANNAS-DAB.09.06.06.01	Pengelolaan Tata Usaha
	RAB.09.07 Keseekretariatan Negara	RAB.09.07.11	Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan	LEMHANNAS-DAB.09.07.11.01	Pelaksanaan Layanan Rencana Program Kerja, Evaluasi dan Pengembangan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang berkualitas
				LEMHANNAS-DAB.09.07.11.02	Penyelenggaraan Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang Berkualitas
				LEMHANNAS-DAB.09.07.11.03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Pelatih Nilai-Nilai Kebangsaan yang berkualitas
				LEMHANNAS-DAB.09.07.11.04	Penyelenggaraan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan yang berkualitas

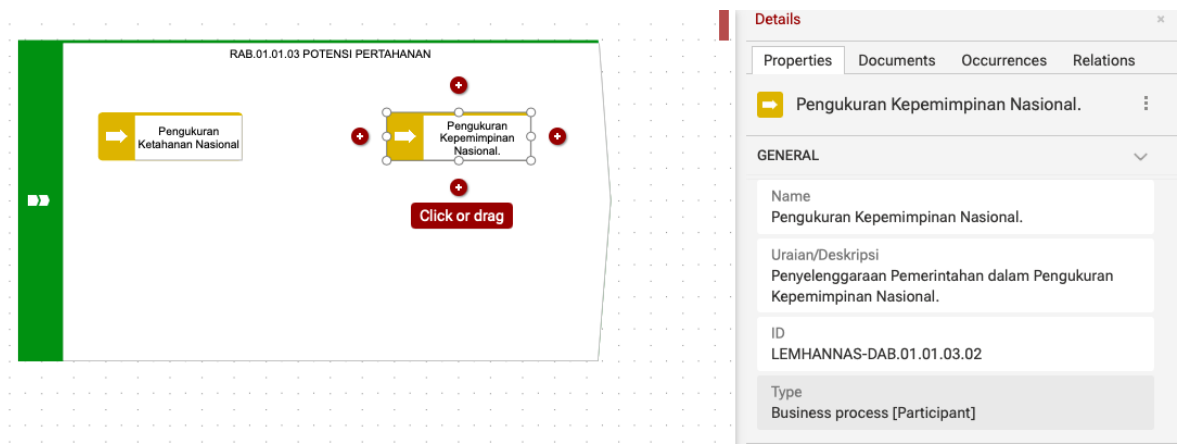
2. Dokumentasi Arsitektur Proses Bisnis

Berikut adalah dokumentasi arsitektur proses bisnis saat ini (*as is*) pada salah satu referensi arsitektur proses bisnis Lembaga Ketahanan Nasional RI.



Gambar 3.1 Dokumentasi Arsitektur Bisnis pada Sistem Informasi Arsitektur

Sedangkan isian metadata proses bisnis, terdokumentasi pada setiap komponen proses bisnis Lembaga Ketahanan Nasional RI. Salah satu contoh isian metadata proses bisnis yang dimaksud dapat terlihat pada gambar 3.2 berikut.



Gambar 3.2 Metadata Proses Bisnis pada Sistem Informasi Arsitektur

3. Metadata Arsitektur Proses Bisnis

Dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Lembaga Ketahanan Nasional RI, metadata proses bisnis memainkan peran penting dalam mengorganisir dan mengelola informasi terkait dengan berbagai aktivitas dan fungsi yang dilakukan oleh unit kerja. Salah satu elemen metadata yang relevan adalah ID Metadata, yang berfungsi sebagai identifikasi unik untuk setiap proses bisnis yang ada dalam sistem. ID Metadata memastikan bahwa setiap proses bisnis memiliki pengenalan yang jelas dan dapat dikenali oleh sistem, sehingga memudahkan dalam pencarian dan pengelompokan informasi terkait.

Nama Proses Bisnis adalah elemen metadata lainnya yang memberikan gambaran singkat tentang kegiatan yang dilakukan dalam suatu proses bisnis tertentu. Uraian Proses Bisnis juga merupakan bagian penting dari metadata proses bisnis. Sedangkan metadata proses bisnis seperti ID Metadata, Nama Proses Bisnis, Uraian Proses Bisnis, dan Unit Kerja merupakan komponen penting dalam SPBE Lembaga Ketahanan Nasional RI. Metadata ini membantu mengorganisir dan mengelola informasi terkait dengan proses bisnis yang ada, memastikan tanda pengenalan yang unik, memberikan deskripsi yang jelas, dan menunjukkan unit kerja yang terlibat. Dengan demikian, Pengelola SPBE Lembaga Ketahanan Nasional RI dapat dengan mudah mencari, memahami, dan bekerja dengan proses bisnis yang relevan dan memastikan kelancaran operasional dan efektivitas kerja di Lembaga Ketahanan Nasional RI.

Tabel 3.2 Metadata Arsitektur Proses Bisnis Lembaga Ketahanan Nasional RI

ID Metadata	Nama Proses Bisnis	Uraian
LEMHANNAS-DAB.01.01.03.01	Pengukuran Ketahanan Nasional	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengukuran Ketahanan Nasional
LEMHANNAS-DAB.01.01.03.02	Pengukuran Kepemimpinan Nasional.	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengukuran Kepemimpinan Nasional.
LEMHANNAS-DAB.01.01.04.01	Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Program dan Pengembangan Pendidikan	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Program dan Pengembangan Pendidikan
LEMHANNAS-DAB.01.01.04.02	Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pembinaan Peserta Pendidikan	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pembinaan Peserta Pendidikan
LEMHANNAS-DAB.01.01.04.03	Perencanaan dan Pelaksanaan Operasional Pendidikan	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Operasional Pendidikan
LEMHANNAS-DAB.01.01.04.04	Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Materi dan Penilaian Peserta Pendidikan	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Materi dan Penilaian Peserta Pendidikan
LEMHANNAS-DAB.01.02.02.01	Pengelolaan Kerja Sama Dalam Negeri	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengelolaan Kerja Sama Dalam Negeri
LEMHANNAS-DAB.01.02.02.02	Pengelolaan Kerja Sama Luar Negeri	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengelolaan Kerja Sama Luar Negeri
LEMHANNAS-DAB.01.02.02.03	Pengelolaan Hukum.	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengelolaan Hukum.
LEMHANNAS-DAB.06.03.01.01	Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Program Pengembangan Pengkajian	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Program Pengembangan Pengkajian
LEMHANNAS-DAB.06.03.01.02	Pelaksanaan Kajian Bidang Ideologi dan Politik	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pelaksanaan Kajian Bidang Ideologi dan Politik
LEMHANNAS-DAB.06.03.01.03	Pelaksanaan Kajian Bidang Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pelaksanaan Kajian Bidang Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam
LEMHANNAS-DAB.06.03.01.04	Pelaksanaan Kajian Bidang Sosial Budaya dan Demografi	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pelaksanaan Kajian Bidang Sosial Budaya dan Demografi

LEMHANNAS-DAB.06.03.01.05	Pelaksanaan Kajian Bidang Pertahanan, Keamanan dan Geografi	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pelaksanaan Kajian Bidang Pertahanan, Keamanan dan Geografi
LEMHANNAS-DAB.08.02.05.01	Pengelolaan Perpustakaan	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengelolaan Perpustakaan
LEMHANNAS-DAB.09.02.01.01	Pengelolaan Perencanaan Anggaran	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengelolaan Perencanaan Anggaran
LEMHANNAS-DAB.09.02.07.01	Pengelolaan Pemantauan dan Evaluasi Program Anggaran	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengelolaan Pemantauan dan Evaluasi Program Anggaran
LEMHANNAS-DAB.09.02.08.01	Pengelolaan Keuangan	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengelolaan Keuangan
LEMHANNAS-DAB.09.02.11.01	Pengelolaan Sarana Prasarana	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengelolaan Sarana Prasarana
LEMHANNAS-DAB.09.03.01.01	Pengelolaan jaringan	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengelolaan jaringan
LEMHANNAS-DAB.09.03.02.01	Pengelolaan Sistem Informasi	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengelolaan Sistem Informasi
LEMHANNAS-DAB.09.04.02.01	Pengelolaan Penerangan	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengelolaan Penerangan
LEMHANNAS-DAB.09.04.02.02	Pengelolaan Protokol dan Peliputan	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengelolaan Protokol dan Peliputan
LEMHANNAS-DAB.09.04.02.03	Pengelolaan Komunikasi dan Elektronik	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Elektronik
LEMHANNAS-DAB.09.06.01.01	Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana
LEMHANNAS-DAB.09.06.03.01	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia
LEMHANNAS-DAB.09.06.04.01	Pengelolaan Fasilitasi Reformasi Birokrasi	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengelolaan Fasilitasi Reformasi Birokrasi
LEMHANNAS-DAB.09.06.04.02	Pengelolaan Pengawasan Program Anggaran	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengelolaan Pengawasan Program Anggaran
LEMHANNAS-DAB.09.06.04.03	Pengelolaan Pengawasan Sumber Daya	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengelolaan Pengawasan Sumber Daya
LEMHANNAS-DAB.09.06.04.04	Proses Pengelolaan Pengawasan Administrasi Keuangan.	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Proses Pengelolaan Pengawasan Administrasi Keuangan.

LEMHANNAS-DAB.09.06.06.01	Pengelolaan Tata Usaha	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengelolaan Tata Usaha
LEMHANNAS-DAB.09.07.11.01	Pelaksanaan Layanan Rencana Program Kerja, Evaluasi dan Pengembangan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang berkualitas	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pelaksanaan Layanan Rencana Program Kerja, Evaluasi dan Pengembangan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang berkualitas
LEMHANNAS-DAB.09.07.11.02	Penyelenggaraan Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang Berkualitas	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang Berkualitas
LEMHANNAS-DAB.09.07.11.03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Pelatih Nilai-Nilai Kebangsaan yang berkualitas	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pelatihan untuk Pelatih Nilai-Nilai Kebangsaan yang berkualitas
LEMHANNAS-DAB.09.07.11.04	Penyelenggaraan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan yang berkualitas	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan yang berkualitas

B. Arsitektur Domain Layanan

Layanan SPBE merupakan luaran dari sebuah atau beberapa proses bisnis dan disajikan kepada pengguna dengan mencerminkan karakteristik layanan tertentu, serta diselaraskan dengan berbagai inisiatif strategis, program nasional, dan peraturan perundang-undangan terkait layanan pemerintah. Untuk itu domain layanan diklasifikasikan berdasarkan perspektif penerima manfaat. Dalam hal ini jika penerima manfaat tersebut adalah masyarakat dan dunia usaha seperti penerapan cipta kerja (eksternal dari pemerintahan) diklasifikasikan sebagai layanan publik (*Government to Citizen /G2C* dan *Government to Business / G2B*, dan bila penerima manfaat tersebut adalah instansi pemerintah ataupun aparatur negara (internal pemerintahan) maka diklasifikasikan sebagai layanan administrasi pemerintahan (*Government to Government/ G2G*, *Government to Employee /G2E*).

Diharapkan dengan penerapan domain layanan SPBE dalam melakukan identifikasi layanan pemerintah, maka dapat mempercepat terwujudnya agenda pembangunan untuk melakukan transformasi pelayanan publik menuju layanan digital pemerintah terintegrasi. Kerangka kerja dari arsitektur layanan SPBE terdiri atas referensi arsitektur layanan SPBE dan domain arsitektur layanan SPBE.

1. Arsitektur Layanan

Berikut ini adalah katalog layanan di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI, dimana untuk Level 1 sampai 3 mengacu pada kodifikasi referensi arsitektur layanan SPBE nasional. Sedangkan level selanjutnya merupakan layanan di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI.

Tabel 3.3 Arsitektur Layanan SPBE

RAL Level 1	RAL Level 2	Kode RAL Level 3	RAL Level 3	Kode RAL Level 3	Nama Layanan
RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.01 PERTAHANAN	RAL.01.01.04	Kekuatan Pertahanan	LEMHANNAS-DAL.01.01.04.01	Layanan Peminjaman Sarana Prasarana Kedeputan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan
				LEMHANNAS-DAL.01.01.04.02	Layanan Informasi Program Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan
				LEMHANNAS-DAL.01.01.04.03	Layanan Pendaftaran Peserta Dialog Wawasan Kebangsaan
				LEMHANNAS-DAL.01.01.04.04	Layanan Pendaftaran Peserta Gebyar Wawasan Kebangsaan
	RAL.01.28 HUKUM	RAL.01.28.01	Penyelenggaraan Peraturan Perundang-Undangan	LEMHANNAS-DAL.01.11.07.01	Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.03	Pendidikan Non Formal	LEMHANNAS-DAL.01.31.03.01	Layanan Fasilitas Penilaian Kegiatan Utama
				LEMHANNAS-DAL.01.31.03.02	Layanan Fasilitas Penilaian Karya Tulis Peserta
				LEMHANNAS-DAL.01.31.03.03	Layanan Pelaksanaan Pengumpulan Pengolahan Data dan Administrasi Pendidikan
				LEMHANNAS-DAL.01.31.03.04	Layanan Penyusunan Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Peserta
				LEMHANNAS-DAL.01.31.03.05	Layanan Penggandaan Bahan Ajar BSI
				LEMHANNAS-DAL.01.31.03.06	Layanan Penggandaan Bahan Bidang Strudi BinGarta
				LEMHANNAS-DAL.01.31.03.07	Layanan Penggandaan Buku Juknis Peserta
				LEMHANNAS-DAL.01.31.03.08	Layanan Bahan Penyusunan Tenaga Pengajar
				LEMHANNAS-DAL.01.31.03.09	Layanan Pengolahan Data Peserta
				LEMHANNAS-DAL.01.31.03.10	Layanan Presensi/Kehadiran Peserta Pendidikan

RAL Level 1	RAL Level 2	Kode RAL Level 3	RAL Level 3	Kode RAL Level 3	Nama Layanan
				LEMHANNAS-DAL.01.31.03.11	Layanan Rekapitulasi Ketidakhadiran Peserta Pendidikan
				LEMHANNAS-DAL.01.31.03.12	Layanan Perizinan Peserta Pendidikan
				LEMHANNAS-DAL.01.31.03.13	Layanan Pembukaan dan Penutupan Pendidikan
				LEMHANNAS-DAL.01.31.03.14	Layanan dukungan kebutuhan sarpras peserta pendidikan
				LEMHANNAS-DAL.01.31.03.15	Layanan ekstrakurikuler peserta pendidikan
				LEMHANNAS-DAL.01.31.03.16	Layanan exit permit dan tiket peserta pendidikan dari negara sahabat
	RAL.01.33 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	RAL.01.33.01	Rekomendasi Kebijakan Berbasis Riset	LEMHANNAS-DAL.01.33.01.01	Layanan Penyusunan Renja Debidjianstrat
				LEMHANNAS-DAL.01.33.01.02	Layanan Koordinasi Penentuan Judul Kajian Debidjianstrat
				LEMHANNAS-DAL.01.33.01.03	Layanan Penyusunan Laporan Triwulan Debidjianstrat
				LEMHANNAS-DAL.01.33.01.04	Layanan Monitoring dan Evaluasi Kajian Strategik

RAL Level 1	RAL Level 2	Kode RAL Level 3	RAL Level 3	Kode RAL Level 3	Nama Layanan
				LEMHANNAS-DAL.01.33.01.05	Layanan Penelusuran Hasil Rekomendasi Kajian Strategik/Policy Tracking
				LEMHANNAS-DAL.01.33.01.06	Layanan Seminar Internasional
				LEMHANNAS-DAL.01.33.01.07	Layanan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Debidjianstrat
				LEMHANNAS-DAL.01.33.01.08	Layanan Forum Komunikasi Ketahanan Nasional
				LEMHANNAS-DAL.01.33.01.09	Layanan Koordinasi dan Duk. Keperluan Sehari-hari Perkantoran Debidjianstrat
				LEMHANNAS-DAL.01.33.01.10	Layanan Jurnal Ketahanan Nasional
				LEMHANNAS-DAL.01.33.01.11	Layanan Kajian Strategis

RAL Level 1	RAL Level 2	Kode RAL Level 3	RAL Level 3	Kode RAL Level 3	Nama Layanan
				LEMHANNAS-DAL.01.33.01.12	Layanan penyediaan rekomendasi kebijakan
	RAL.01.42 KEBUDAYAAN	RAL.01.42.05	Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Akses Informasi	LEMHANNAS-DAL.01.42.05.01	Layanan Perpustakaan
	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.01	Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Informatika	LEMHANNAS-DAL.01.43.01.01	Layanan Internet
				LEMHANNAS-DAL.01.43.01.02	Layanan Keamanan Siber
				LEMHANNAS-DAL.01.43.01.03	Layanan Manajemen Infrastruktur TIK

RAL Level 1	RAL Level 2	Kode RAL Level 3	RAL Level 3	Kode RAL Level 3	Nama Layanan
		RAL.01.43.02	Penatakelolaan Aplikasi Informatika	LEMHANNAS-DAL.01.43.02.01	Layanan Komunikasi dan Data Informasi
				LEMHANNAS-DAL.01.43.02.02	Layanan Aplikasi dan Data
		RAL.01.43.03	Pengelolaan Informasi Publik	LEMHANNAS-DAL.01.43.03.01	Layanan Informasi Lembaga secara Online
				LEMHANNAS-DAL.01.43.03.02	Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)
		RAL.01.43.04	Pengelolaan Data Statistik	LEMHANNAS-DAL.01.43.04.01	Layanan Informasi data hasil Siskurtannas Puslab

RAL Level 1	RAL Level 2	Kode RAL Level 3	RAL Level 3	Kode RAL Level 3	Nama Layanan
		RAL.01.43.05	Pengelolaan Data Geospasial	LEMHANNAS-DAL.01.43.05.01	Layanan portal GIS Siskurtannas Puslab
	RAL.01.44 KOMUNIKASI	RAL.01.44.02	Pengelolaan Komunikasi Publik	LEMHANNAS-DAL.01.44.02.01	Layanan Aspirasi dan Pengaduan Pelayanan Publik
RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.01	Perencanaan dan Penganggaran APBN	LEMHANNAS-DAL.02.02.01.01	Layanan Perencanaan dan Revisi Anggaran
				LEMHANNAS-DAL.02.02.01.02	Layanan Perencanaan
				LEMHANNAS-DAL.02.02.01.03	Layanan Penganggaran
		RAL.02.02.04	Pengelolaan Pengeluaran dan Belanja Negara	LEMHANNAS-DAL.02.02.04.01	Layanan Verifikasi dan Pembuatan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk seluruh kegiatan Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI
		RAL.02.02.08	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	LEMHANNAS-DAL.02.02.08.01	Layanan Pembuatan Laporan Realisasi Anggaran

RAL Level 1	RAL Level 2	Kode RAL Level 3	RAL Level 3	Kode RAL Level 3	Nama Layanan
				LEMHANNAS-DAL.02.02.08.02	Layanan Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan
				LEMHANNAS-DAL.02.02.08.03	Layanan Pengelolaan Keuangan
		RAL.02.02.11	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	LEMHANNAS-DAL.02.02.11.01	Layanan Barang Milik Negara (BMN)
		RAL.02.02.11	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	LEMHANNAS-DAL.02.02.11.01	Layanan Pengadaan Barang/Jasa
	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAL.02.03.01	Perencanaan Pembangunan	LEMHANNAS-DAL.02.03.01.01	Layanan Penyusunan Revisi Juklak Juknis dan Mekanisme Hubungan Kerja Debidjianstrat
				LEMHANNAS-DAL.02.03.01.02	Layanan Sinkronisasi Perencanaan Debidjianstrat

RAL Level 1	RAL Level 2	Kode RAL Level 3	RAL Level 3	Kode RAL Level 3	Nama Layanan
	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.01	Penataan Sistem Tata Laksana	LEMHANNAS-DAL.02.04.01.01	Layanan Organisasi dan Tata Laksana
		RAL.02.04.03	Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur	LEMHANNAS-DAL.02.04.03.01	Layanan Absensi dan Tunjangan Kinerja Pegawai Lemhannas
		RAL.02.04.03	Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur	LEMHANNAS-DAL.02.04.03.01	Layanan Manajemen Kepegawaian
		RAL.02.04.04	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi, Pengawasan, dan Akuntabilitas Kinerja	LEMHANNAS-DAL.02.04.04.01	Layanan Penyusunan LAKIP Debidjianstrat
				LEMHANNAS-DAL.02.04.04.02	Layanan Pengawasan Internal (utama)

RAL Level 1	RAL Level 2	Kode RAL Level 3	RAL Level 3	Kode RAL Level 3	Nama Layanan
				LEMHANNAS-DAL.02.04.04.03	Layanan Audit
				LEMHANNAS-DAL.02.04.04.04	Layanan Reviu
				LEMHANNAS-DAL.02.04.04.05	Layanan Pemantauan
				LEMHANNAS-DAL.02.04.04.06	Layanan Evaluasi
				LEMHANNAS-DAL.02.04.04.07	Layanan Pemantauan Tindak Lanjut
				LEMHANNAS-DAL.02.04.04.08	Layanan Konsultasi

RAL Level 1	RAL Level 2	Kode RAL Level 3	RAL Level 3	Kode RAL Level 3	Nama Layanan
				LEMHANNAS-DAL.02.04.04.09	Layanan Pembinaan dan Asistensi RB
		RAL.02.04.06	Penyelenggaraan Kearsipan	LEMHANNAS-DAL.02.04.06.01	Layanan Umum dan Perkantoran
	RAL.02.05 KESEKRETARIATAN NEGARA	RAL.02.05.01	Penyelenggaraan Hubungan Kelembagaan Dan Pemberian Analisis Kebijakan Pada Presiden Dan Wakil Presiden	LEMHANNAS-DAL.02.05.01.01	Layanan Izin Tinggal
				LEMHANNAS-DAL.02.05.01.02	Layanan Kerja Sama Dalam Negeri
				LEMHANNAS-DAL.02.05.01.03	Layanan Seleksi PPRA, PPSA dan P3DA

RAL Level 1	RAL Level 2	Kode RAL Level 3	RAL Level 3	Kode RAL Level 3	Nama Layanan
		RAL.02.05.03	Penyelenggaraan Koordinasi Kerja Sama Teknik Luar Negeri dan Penanganan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri	LEMHANNAS-DAL.02.05.03.01	Layanan Pembuatan Exit Permit, Paspor Dinas dan Rekomendasi Visa
				LEMHANNAS-DAL.02.05.05.01	Layanan Izin Presiden dan Sekretariat Negara

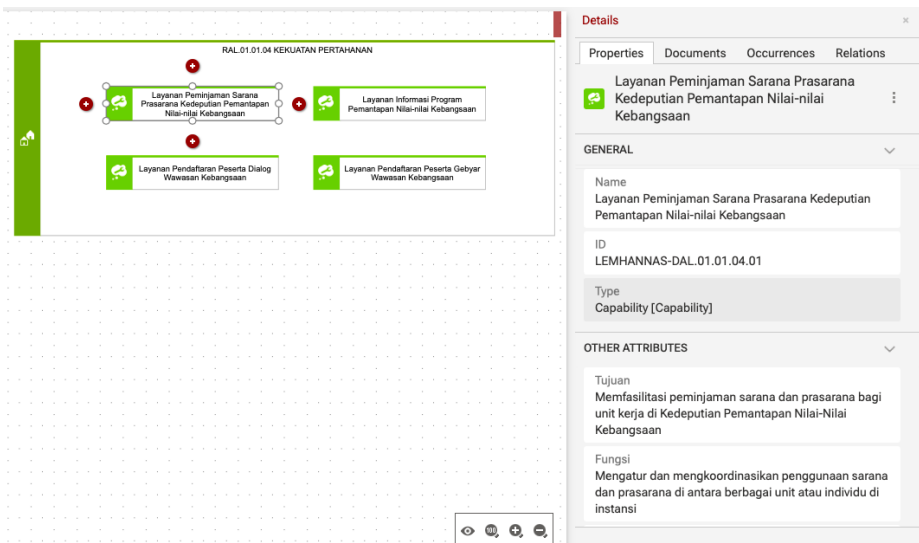
2. Dokumentasi Arsitektur Layanan

Arsitektur layanan saat ini (*as is*) Lembaga Ketahanan Nasional RI dapat dilihat pada gambar 3.3 sebagai berikut.



Gambar 3.3 Arsitektur Layanan *as is* pada Sistem Informasi Arsitektur

Sedangkan isian metadata layanan, terdokumentasi pada setiap komponen layanan seperti terlihat pada gambar 3.4 berikut.



Gambar 3.4 Metadata Arsitektur Layanan pada Sistem Informasi
Arsitektur

3. Metadata Arsitektur Layanan

Berdasarkan dari katalog arsitektur layanan, analisa terhadap metadata arsitektur layanan SPBE dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 3.4 Metadata Arsitektur Layanan SPBE

ID Metadata	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Target Layanan	Potensi Manfaat	Potensi Ekonomi	Metode Layanan	Unit Pelaksana/Unit Kerja
LEMHANNAS-DAL.01.01.04.01	Layanan Peminjaman Sarana Prasarana Kedeputian Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan	Memfasilitasi peminjaman sarana dan prasarana bagi unit kerja di Kedeputian Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan	Mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sarana dan prasarana di antara berbagai unit atau individu di instansi	1. Direktorat Pelatihan Untuk Pelatih 2. Direktorat Pembinaan dan Pelaksanaan 3. Direktorat Perencanaan dan Pengembangan	Memudahkan akses dan penggunaan sarana serta prasarana yang diperlukan, sehingga kegiatan dan tugas bisa dilaksanakan dengan lebih efisien dan tepat waktu.	Dengan adanya sistem peminjaman, instansi dapat menghindari pengeluaran besar untuk membeli sarana dan prasarana yang tidak selalu digunakan. Ini mengurangi kebutuhan untuk investasi modal yang besar untuk peralatan yang mungkin hanya digunakan sesekali.	Elektronik dan Non Elektronik	Direktorat Sosialisasi dan Media Pemantapan Nilai
LEMHANNAS-DAL.01.01.04.02	Layanan Informasi Program Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan	Memberikan informasi yang akurat dan terkini tentang program pemantapan nilai-nilai kebangsaan	Menyebarkan informasi, edukasi	Seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda	Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa	Potensi pendapatan dari kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengembangan program	Elektronik dan Non Elektronik	Direktorat Sosialisasi dan Media Pemantapan Nilai
LEMHANNAS-DAL.01.01.04.03	Layanan Pendaftaran Peserta Dialog Wawasan Kebangsaan	Memudahkan peserta untuk mendaftar dan mengikuti dialog wawasan kebangsaan	Fasilitasi partisipasi publik	Masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, ASN	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam dialog kebangsaan, memperkaya wawasan kebangsaan peserta	Potensi pendapatan dari sponsor atau peserta yang membayar biaya pendaftaran	Elektronik dan Non Elektronik	Direktorat Sosialisasi dan Media Pemantapan Nilai
LEMHANNAS-DAL.01.01.04.04	Layanan Pendaftaran Peserta Gebyar Wawasan Kebangsaan	Memudahkan peserta untuk mendaftar dan mengikuti dialog wawasan kebangsaan	Fasilitasi partisipasi publik	Masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, ASN	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam dialog kebangsaan,	Potensi pendapatan dari sponsor atau peserta yang	Elektronik dan Non Elektronik	Direktorat Sosialisasi dan Media

ID Metadata	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Target Layanan	Potensi Manfaat	Potensi Ekonomi	Metode Layanan	Unit Pelaksana/Unit Kerja
					memperkaya wawasan kebangsaan peserta	membayar biaya pendaftaran		Pemantapan Nilai
LEMHANNAS-DAL.01.11.07.01	Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Melakukan pengelolaan dokumentasi produk hukum dan informasi hukum secara tertib dan terpadu	Penyediaan layanan untuk mengelola dan mendokumentasikan produk hukum	Seluruh Kementerian dan Lembaga	Memberikan kemudahan dalam pengelolaan dan pendokumentasian produk hukum serta mengintegrasikan seluruh Kementerian dan Lembaga dalam pengelolaan produk hukumnya sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses produk hukum.	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi	Elektronik	Biro Kerjasama
LEMHANNAS-DAL.01.31.03.01	Layanan Fasilitas Penilaian Kegiatan Utama	Memberikan kemudahan dan kepastian bagi Peserta Pendidikan	Memberikan kemudahan Data bagi Peserta Pendidikan	Peserta Pendidikan	Peningkatan keterampilan dan kompetensi peserta, peningkatan produktivitas kerja, dan peningkatan daya saing Peserta Pendidikan	Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Peserta Pendidikan	Non Elektronik	Direktorat Materi dan Penilaian Peserta Pendidikan
LEMHANNAS-DAL.01.31.03.02	Layanan Fasilitas Penilaian Karya Tulis Peserta	Meningkatkan keterampilan dan kompetensi Peserta Pendidikan	Penyediaan pelatihan kerja untuk masyarakat	Peserta Pendidikan	Peningkatan keterampilan dan kompetensi peserta, peningkatan produktivitas kerja, dan peningkatan daya saing Peserta Pendidikan	Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Peserta Pendidikan	Non Elektronik	Direktorat Materi dan Penilaian Peserta Pendidikan

ID Metadata	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Target Layanan	Potensi Manfaat	Potensi Ekonomi	Metode Layanan	Unit Pelaksana/Unit Kerja
LEMHANNAS-DAL.01.31.03.03	Layanan Pelaksanaan Pengumpulan Pengolahan Data dan Administrasi Pendidikan	Memberikan kemudahan dan kepastian bagi Peserta Pendidikan	Menghasilkan Laporan Keuangan Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Bebas Dari Salah Saji Material yang berdampak kepada Laporan Keuangan	Peserta Pendidikan	Peningkatan keterampilan dan kompetensi peserta, peningkatan produktivitas kerja, dan peningkatan daya saing Peserta Pendidikan	Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Peserta Pendidikan	Non Elektronik	Direktorat Materi dan Penilaian Peserta Pendidikan
LEMHANNAS-DAL.01.31.03.04	Layanan Penyusunan Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Peserta	Memberikan kemudahan dan kepastian bagi Peserta Pendidikan	Menyerap aspirasi dan aduan masyarakat	Peserta Pendidikan	Peningkatan keterampilan dan kompetensi peserta, peningkatan produktivitas kerja, dan peningkatan daya saing Peserta Pendidikan	Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Peserta Pendidikan	Non Elektronik	Direktorat Materi dan Penilaian Peserta Pendidikan
LEMHANNAS-DAL.01.31.03.05	Layanan Penggandaan Bahan Ajar BSI	Memenuhi kebutuhan bahan ajar untuk program pendidikan dan pelatihan	Mendukung kegiatan pembelajaran	Peserta pendidikan dan pelatihan BSI	Meningkatkan kualitas pembelajaran, mempermudah akses peserta terhadap bahan ajar	Potensi penghematan biaya produksi bahan ajar, potensi pendapatan dari penjualan bahan ajar kepada pihak luar	Non Elektronik	Direktorat Materi dan Penilaian Peserta Pendidikan
LEMHANNAS-DAL.01.31.03.06	Layanan Penggandaan Bahan Bidang Studi BinGarta	Memenuhi kebutuhan bahan ajar untuk program pendidikan dan pelatihan	Mendukung kegiatan pembelajaran	Peserta pendidikan dan pelatihan	Meningkatkan kualitas pembelajaran, mempermudah akses peserta terhadap bahan ajar	Potensi penghematan biaya produksi bahan ajar, potensi pendapatan dari penjualan bahan ajar kepada pihak luar	Non Elektronik	Direktorat Materi dan Penilaian Peserta Pendidikan
LEMHANNAS-DAL.01.31.03.07	Layanan Penggandaan Buku Juknis Peserta	Memenuhi kebutuhan bahan ajar untuk program pendidikan dan pelatihan	Mendukung kegiatan pembelajaran	Peserta pendidikan dan pelatihan	Meningkatkan kualitas pembelajaran, mempermudah	Potensi penghematan biaya produksi bahan ajar,	Non Elektronik	Direktorat Materi dan Penilaian

ID Metadata	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Target Layanan	Potensi Manfaat	Potensi Ekonomi	Metode Layanan	Unit Pelaksana/Unit Kerja
					akses peserta terhadap bahan ajar	potensi pendapatan dari penjualan bahan ajar kepada pihak luar		Peserta Pendidikan
LEMHANNAS-DAL.01.31.03.08	Layanan Bahan Penyusunan Tenaga Pengajar	Memfasilitasi tenaga pengajar dalam menyusun bahan ajar	Mendukung pengembangan kapasitas tenaga pengajar	Tenaga pengajar Lemhannas RI	Meningkatkan kualitas bahan ajar yang dihasilkan, meningkatkan kompetensi tenaga pengajar	Potensi penghematan waktu dan biaya dalam penyusunan bahan ajar	Non Elektronik	Direktorat Materi dan Penilaian Peserta Pendidikan
LEMHANNAS-DAL.01.31.03.09	Layanan Pengolahan Data Peserta	Meninput dan menghimpun data Peserta Pendidikan	Penyediaan Data Peserta Pendidikan	Peserta Pendidikan	Kemudahan menghimpun data peserta pendidikan	Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas pelayanan di Bintadik	Elektronik	Direktorat Pembinaan Peserta Pendidikan
LEMHANNAS-DAL.01.31.03.10	Layanan Presensi/Kehadiran Peserta Pendidikan	Menyiapkan daftar Kehadiran Peserta Pendidikan	Penyediaan daftar kehadiran peserta pendidikan	Peserta Pendidikan	Mengetahui kehadiran peserta pendidikan	Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas pelayanan di Bintadik	Non Elektronik	Direktorat Pembinaan Peserta Pendidikan
LEMHANNAS-DAL.01.31.03.11	Layanan Rekapitulasi Ketidakhadiran Peserta Pendidikan	Menyiapkan rekap ketidakhadiran peserta pendidikan	Penyediaan rekap ketidakhadiran peserta pendidikan	Peserta Pendidikan	Laporan Ketidakhadiran Peserta pendidikan	Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas pelayanan di Bintadik	Non Elektronik	Direktorat Pembinaan Peserta Pendidikan
LEMHANNAS-DAL.01.31.03.12	Layanan Perizinan Peserta Pendidikan	Menginput dan mengelola perizinan peserta pendidikan	Penyediaan perizinan peserta pendidikan	Peserta Pendidikan	Daftar Izin Peserta Pendidikan	Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas pelayanan di Bintadik	Non Elektronik	Direktorat Pembinaan Peserta Pendidikan
LEMHANNAS-DAL.01.31.03.13	Layanan Pembukaan dan Penutupan Pendidikan	Menyelenggarakan Pembukaan dan penutupan pendidikan	Penyelenggaraan pembukaan dan penutupan pendidikan	Peserta Pendidikan	terwujudnya pembukaan dan penutupan pendidikan	Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas pelayanan di Bintadik	Non Elektronik	Direktorat Pembinaan Peserta Pendidikan
LEMHANNAS-DAL.01.31.03.14	Layanan dukungan kebutuhan sarpras peserta pendidikan	Menghimpun, mengelola dan menindaklanjuti aspirasi peserta pendidikan tentang	Penyediaan fasilitas terhadap keluhan peserta pendidikan terhadap sarpras pendidikan	Peserta Pendidikan	Laporan perbaikan sarpras pendidikan	Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas pelayanan di Bintadik	Non Elektronik	Direktorat Pembinaan Peserta Pendidikan

ID Metadata	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Target Layanan	Potensi Manfaat	Potensi Ekonomi	Metode Layanan	Unit Pelaksana/Unit Kerja
		perbaikan kebutuhan sarpras peserta pendidikan						
LEMHANNAS-DAL.01.31.03.15	Layanan ekstrakurikuler peserta pendidikan	Penyelenggaraan kegiatan Outbond, malam pengenalan, malam pengantar tugas, senam tera, kuliah umum Presiden RI, dll	Menyelenggarakan kegiatan Outbond, malam pengenalan, malam pengantar tugas, senam tera, kuliah umum Presiden RI, dll	Peserta Pendidikan	terwujudnya kegiatan ekstrakurikuler pendidikan	Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas pelayanan di Bintadik	Non Elektronik	Direktorat Pembinaan Peserta Pendidikan
LEMHANNAS-DAL.01.31.03.16	Layanan exit permit dan tiket peserta pendidikan dari negara sahabat	Mengelola exit permit dan tiket peserta pendidikan dari negara sahabat	Penyediaan exit permit dan tiket peserta pendidikan dari negara sahabat	Peserta Pendidikan	tersedianya exit permit dan tiket peserta pendidikan dari negara sahabat	Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas pelayanan di Bintadik	Elektronik dan Non Elektronik	Direktorat Pembinaan Peserta Pendidikan
LEMHANNAS-DAL.01.33.01.01	Layanan Penyusunan Renja Debidjianstrat	Menghasilkan Rencana Kerja (Renja) tahunan yang komprehensif dan sesuai dengan visi dan misi Debidjianstrat, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program strategis.	Mengatur perencanaan tahunan agar program Debidjianstrat berjalan sesuai tujuan.	Unit internal seperti di Debidjianstrat para Direktur Pengkajian (Dirjian), Gubernur, Wakil Gubernur, Biro Perencanaan, Inspektorat dan Biro Umum.	Mendapatkan rencana kerja yang jelas dan terstruktur	Efisiensi penggunaan anggaran melalui perencanaan yang matang.	Elektronik dan Non Elektronik	Direktorat Program dan Pengembangan Kajian
LEMHANNAS-DAL.01.33.01.02	Layanan Koordinasi Penentuan Judul Kajian Debidjianstrat	Menetapkan judul-judul kajian strategis yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan nasional, kepentingan nasional, ketahanan nasional dan harapan presiden, melalui koordinasi dengan berbagai pihak terkait.	Menetapkan topik kajian strategis yang relevan dengan kebutuhan nasional.	Unit internal Debidjianstrat seperti para Direktur Pengkajian (Dirjian), Biro Umum, dan Biro Humas.	Mendapatkan kajian yang relevan dan aktual.	Efisiensi dan efektifitas dalam alokasi sumber daya kajian.	Elektronik dan Non Elektronik	Direktorat Program dan Pengembangan Kajian

ID Metadata	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Target Layanan	Potensi Manfaat	Potensi Ekonomi	Metode Layanan	Unit Pelaksana/Unit Kerja
LEMHANNAS-DAL.01.33.01.03	Layanan Penyusunan Laporan Triwulan Debidjianstrat	Menyusun laporan triwulanan yang komprehensif mengenai capaian dan perkembangan kegiatan Debidjianstrat, untuk keperluan evaluasi dan pertanggungjawaban.	Menyusun laporan kinerja triwulanan untuk evaluasi dan pertanggungjawaban program kegiatan dan keuangan di lingkungan Debidjianstrat.	Unit internal Debidjianstrat seperti para Direktur Pengkajian (Dirjian), Biro Umum, dan Biro Humas.	Menyediakan informasi yang akurat dan up-to-date mengenai perkembangan situasi strategis, menjadi dasar pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas	Potensi penghematan biaya jika dilakukan secara efisien, peluang kerjasama dengan lembaga lain untuk penyediaan data	Elektronik dan Non Elektronik	Direktorat Program dan Pengembangan Kajian
LEMHANNAS-DAL.01.33.01.04	Layanan Monitoring dan Evaluasi Kajian Strategik	Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kajian strategis, guna memastikan kualitas, relevansi, dan kebermanfaatan hasil kajian.	Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kajian dan hasil kajian strategis.	Unit internal Debidjianstrat seperti para Direktur Pengkajian (Dirjian), Biro Umum, dan Biro Humas.	Menjamin relevansi dan efektivitas kajian strategis, meningkatkan kualitas hasil kajian, mendorong perbaikan berkelanjutan	Potensi peningkatan kualitas kebijakan publik, potensi kerjasama dengan lembaga riset untuk pengembangan metodologi evaluasi	Elektronik dan Non Elektronik	Direktorat Program dan Pengembangan Kajian
LEMHANNAS-DAL.01.33.01.05	Layanan Penelusuran Hasil Rekomendasi Kajian Strategik/Policy Tracking	Menelusuri dan mengevaluasi implementasi rekomendasi dari kajian strategis, memastikan tindak lanjut yang efektif dan berkelanjutan.	Mengevaluasi implementasi rekomendasi kajian untuk memastikan tindak lanjut yang efektif.	Unit internal Debidjianstrat seperti para Direktur Pengkajian (Dirjian), Biro Umum, dan Biro Humas.	Memastikan tindak lanjut atas rekomendasi kajian strategis, meningkatkan efektivitas kebijakan, memperkuat akuntabilitas	Potensi peningkatan efektivitas kebijakan publik, potensi pengembangan sistem informasi untuk tracking kebijakan	Elektronik dan Non Elektronik	Direktorat Program dan Pengembangan Kajian
LEMHANNAS-DAL.01.33.01.06	Layanan Seminar Internasional	Mengadakan seminar internasional (Jakarta Geopolitical Forum/JGF) yang membahas isu-isu strategis global yang berdampak pada ketahanan nasional, memperluas wawasan dan jaringan serta memperkuat posisi Debidjianstrat,	Menyelenggarakan seminar internasional (Jakarta Geopolitical Forum/JGF) untuk memperkuat jaringan dan posisi strategis Debidjianstrat, Lemhannas dan Indonesia dimata Internasional..	Unit internal Debidjianstrat seperti para Direktur Pengkajian (Dirjian), Biro Umum, dan Biro Humas.	Meningkatkan reputasi Lemhannas RI di tingkat internasional, memperluas jaringan kerjasama, memperoleh masukan dari para ahli internasional	Potensi peningkatan citra Lemhannas RI, potensi kerjasama dengan lembaga internasional, potensi pendapatan dari sponsor	Elektronik dan Non Elektronik	Direktorat Program dan Pengembangan Kajian

ID Metadata	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Target Layanan	Potensi Manfaat	Potensi Ekonomi	Metode Layanan	Unit Pelaksana/Unit Kerja
		Lemhannas dan Indonesia di kancah internasional.						
LEMHANNAS-DAL.01.33.01.07	Layanan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Debidjianstrat	Mengkoordinasikan perencanaan dan pengembangan program Debidjianstrat, untuk memastikan kesinambungan dan inovasi dalam menghadapi tantangan strategis.	Mengkoordinasikan perencanaan dan pengembangan program strategis.	Unit internal Debidjianstrat seperti para Direktur Pengkajian (Dirjian), Biro Umum, dan Biro Humas.	Menjamin sinkronisasi dan keselarasan dalam perencanaan dan pengembangan Debidjianstrat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja	Potensi penghematan biaya, peningkatan kualitas perencanaan dan pengembangan	Elektronik dan Non Elektronik	Direktorat Program dan Pengembangan Kajian
LEMHANNAS-DAL.01.33.01.08	Layanan Forum Komunikasi Ketahanan Nasional	Sebagai pembina ketahanan nasional yakni menyelenggarakan forum komunikasi ketahanan nasional (Forkom Tannas) yang melibatkan para pakar tannas dan berbagai pemangku kepentingan, guna membahas dan merumuskan strategi ketahanan nasional yang efektif.	Menyelenggarakan forum komunikasi ketahanan nasional (Forkom Tannas) dengan berbagai pakar tannas dan pemangku kepentingan untuk membahas strategi ketahanan nasional.	Unit internal Debidjianstrat seperti para Direktur Pengkajian (Dirjian), Biro Umum, dan Biro Humas.	Memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam membangun ketahanan nasional, mendorong kolaborasi dan inovasi	Potensi peningkatan sinergi antar lembaga, potensi pengembangan program kerjasama	Elektronik dan Non Elektronik	Direktorat Program dan Pengembangan Kajian
LEMHANNAS-DAL.01.33.01.09	Layanan Koordinasi dan Duk. Keperluan Sehari-hari Perkantoran Debidjianstrat	Mengkoordinasikan dan memberikan dukungan terhadap kebutuhan operasional sehari-hari perkantoran, untuk memastikan kelancaran administrasi dan	Mengkoordinasikan dukungan operasional harian untuk kelancaran administrasi di lingkungan Debidjianstrat.	Unit internal Debidjianstrat seperti para Direktur Pengkajian (Dirjian), Biro Umum, dan Biro Humas.	Menjamin kelancaran operasional perkantoran, meningkatkan efisiensi kerja	Potensi penghematan biaya operasional, peningkatan produktivitas kerja	Elektronik dan Non Elektronik	Direktorat Program dan Pengembangan Kajian

ID Metadata	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Target Layanan	Potensi Manfaat	Potensi Ekonomi	Metode Layanan	Unit Pelaksana/Unit Kerja
		operasional sehingga kinerja setiap unit sampai dengan staf dapat berjalan dan meningkat.						
LEMHANNAS-DAL.01.33.01.10	Layanan Jurnal Ketahanan Nasional	Menerbitkan Jurnal Ketahanan Nasional yang memuat hasil-hasil kajian maupun hasil penelitian strategis dari berbagai penulis, untuk menyebarluaskan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran akan isu-isu ketahanan nasional sehingga secara tidak langsung akan mempertangguh ketahanan nasional.	Menerbitkan jurnal yang memuat kajian ketahanan nasional ataupun riset terkait ketahanan nasional untuk penyebaran informasi pengetahuan ketahanan nasional yang lebih luas..	Unit internal Debidjianstrat seperti para Direktur Pengkajian (Dirjian), Biro Umum, dan Biro Humas.	Menjadi wadah publikasi hasil penelitian dan kajian strategis, meningkatkan kualitas riset di bidang ketahanan nasional, memperluas akses informasi	Potensi peningkatan reputasi Lemhannas RI, potensi pendapatan dari publikasi	Elektronik dan Non Elektronik	Direktorat Program dan Pengembangan Kajian
LEMHANNAS-DAL.01.33.01.11	Layanan Kajian Strategis	Menganalisis isu-isu strategis di tingkat nasional, regional, dan internasional di bidang sosial budaya, demografi, dan Hukum & Hak Asasi Manusia	Menghasilkan rekomendasi kebijakan kepada Presiden atas ISu-isu strategis yang terjadi.	Presiden	Sebagai bahan pertimbangan Presiden RI dalam menentukan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan	Secara tidak langsung turut mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi berdasarkan faktor-faktor yang mendukung	Non Elektronik	Direktorat Pengkajian Sosial Budaya dan Demografi
LEMHANNAS-DAL.01.33.01.12	Layanan penyediaan rekomendasi kebijakan	Menganalisis isu-isu strategis di tingkat nasional, regional dan internasional di bidang pertahanan keamanan dan geografi	Menghasilkan rekomendasi kebijakan kepada Presiden atas isu-isu strategis yang terjadi.	Presiden	Sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam pengambilan kebijakan.	-	Non Elektronik	Direktorat Pengkajian Pertahanan Keamanan dan Geografi

ID Metadata	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Target Layanan	Potensi Manfaat	Potensi Ekonomi	Metode Layanan	Unit Pelaksana/Unit Kerja
LEMHANNAS-DAL.01.42.05.01	Layanan Perpustakaan	Memberikan layanan kepada pengguna agar bahan pustaka yang telah dihimpun dan diolah dapat dimanfaatkan oleh pembaca	Penyediaan bahan literatur baik pengelolaan maupun pelayanan informasi bahan pustaka dalam rangka mendukung pengembangan dan peningkatan tugas dan fungsi lembaga maupun sumber daya manusianya	1. Peserta Pendidikan PPRA, PPSA, P3DA, dan Peserta Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI 2. Satker di lingkungan Lemhanas RI 3. Masyarakat umum dengan layanan terbatas hanya dapat dibaca di tempat	Terwujudnya pelayanan perpustakaan yang cepat dalam proses temu balik atau penelusuran dan perolehan informasi.	Menyelamatkan bentuk fisik bahan pustaka atau dokumen, mengatasi kendala kekurangan ruang (space), mempercepat proses temu balik atau penelusuran dan perolehan informasi	Elektronik dan Non Elektronik	Biro Humas
LEMHANNAS-DAL.01.43.01.01	Layanan Internet	Internet berperan penting dalam mendukung pembelajaran jarak jauh bagi Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA),internet juga mendukung dalam melakukan kajian isu-isu strategis yang menjadi fokus Lemhannas RI dan internet juga mendukung pelaksanaan kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan secara daring	Media Komunikasi, Akses Informasi, Pertukaran Sumber daya, E-Commerce, E-learning, Worl Wide Web dan Chatting	Seluruh pegawai dan peserta pendidikan serta seminar Lemhannas RI	Sebagai Sarana Komunikasi dan Akses Informasi	Perkembangan informasi digital,peningkatan inovasi dan kreatifitas	Elektronik	Biro Telematika
LEMHANNAS-DAL.01.43.01.02	Layanan Keamanan Siber	Pengawasan Keamanan, Deteksi dan Respon Insiden, Bukti Visual, Peningkatan Manajemen dan Operasional, Perlindungan Aset	Pengawasan Keamanan, Deteksi dan Respon Insiden, Bukti Visual, Peningkatan Manajemen dan Operasional, Perlindungan Aset	Seluruh pegawai dan peserta pendidikan serta seminar Lemhannas RI	Meningkatkan Keamanan, Pemantauan Jarak Jauh dan Meningkatkan Produktivitas	Peningkatan Keamanan, penghematan biaya, dukungan untuk infrastruktur smart office dan analisis data	Elektronik	Biro Telematika

ID Metadata	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Target Layanan	Potensi Manfaat	Potensi Ekonomi	Metode Layanan	Unit Pelaksana/Unit Kerja
		dan Keamanan Jarak Jauh	dan Keamanan Jarak Jauh			untuk keputusan bisnis		
LEMHANNAS-DAL.01.43.01.03	Layanan Manajemen Infrastruktur TIK	Layanan Manajemen Infrastruktur TIK bertujuan untuk menyediakan, memelihara, dan mengelola semua perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, serta komponen TIK lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional lembaga atau organisasi secara efektif dan efisien.	Fungsi utama layanan ini adalah memastikan bahwa seluruh infrastruktur TIK, seperti komputer, server, jaringan, dan perangkat periferal, selalu dalam kondisi optimal. Ini mencakup pemeliharaan rutin, pembaruan perangkat lunak, pengelolaan jaringan, serta penanganan insiden keamanan atau masalah teknis yang muncul.	Seluruh Pegawai Organik di lingkungan Lemhannas RI	Mengoptimalkan kinerja seluruh aset TIK di lingkungan Lemhannas RI guna mendukung tugas dan fungsi organisasi.	1. Mengurangi biaya operasional dengan melakukan pemeliharaan yang tepat dan perencanaan penggantian perangkat secara efisien. 2. Meningkatkan produktivitas pegawai dengan memastikan mereka memiliki akses ke perangkat dan teknologi yang mumpuni	Elektronik	Biro Telematika
LEMHANNAS-DAL.01.43.02.01	Layanan Komunikasi dan Data Informasi	Memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat dan mempermudah komunikasi antar lembaga pemerintah dan antara pemerintah dengan masyarakat.	Fungsi Penyampaian Informasi dan Fungsi Koordinasi Antar Kementerian / Lembaga Pemerintah	Seluruh Pegawai Organik di lingkungan Lemhannas RI	Layanan Komunikasi dan Informasi Lemhannas RI bertujuan untuk menyampaikan informasi secara cepat, tepat, dan terpercaya baik kepada pegawai masyarakat, maupun K/L lain.	Menghemat biaya operasional dengan mengurangi kebutuhan komunikasi cetak dan pertemuan tatap muka, serta meningkatkan produktivitas pegawai melalui alur kerja yang lebih efisien.	Elektronik	Biro Telematika

ID Metadata	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Target Layanan	Potensi Manfaat	Potensi Ekonomi	Metode Layanan	Unit Pelaksana/Unit Kerja
LEMHANNAS-DAL.01.43.02.02	Layanan Aplikasi dan Data	Untuk melayani kebutuhan unit kerja di lingkungan Lemhannas RI, dalam hal pembangunan dan pengembangan aplikasi, serta pengolahan data yang dibutuhkan oleh para stakeholder dalam hal ini adalah unit kerja terkait di lingkungan Lemhannas RI.	1. Melakukan pembangunan atau pengembangan aplikasi eksisting, sesuai dengan kebutuhan stakeholder. 2. Melakukan pengolahan data sesuai kebutuhan stakeholder	Seluruh Pegawai Organik di lingkungan Lemhannas RI	Meningkatkan efisiensi kerja, akurasi data, dan aksesibilitas informasi; mendukung pengambilan keputusan berbasis data; memfasilitasi kolaborasi antar-unit kerja	Potensi penghematan biaya operasional, peluang pengembangan aplikasi dan data	Elektronik	Biro Telematika
LEMHANNAS-DAL.01.43.03.01	Layanan Informasi Lembaga secara Online	Mengimplementasikan akuntabilitas dan transparansi kinerja lembaga	Penyediaan informasi terkait Lembaga	Masyarakat	Terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan publik.	Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga.	Elektronik	Biro Humas
LEMHANNAS-DAL.01.43.03.02	Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Mengimplementasikan keterbukaan informasi publik	Pelayanan informasi publik	Masyarakat	Terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan informasi publik.	Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga.	Elektronik dan Non Elektronik	Biro Humas
LEMHANNAS-DAL.01.43.04.01	Layanan Informasi data hasil Siskurtannas Puslab	Mewujudkan target akselerasi pembangunan nasional serta meningkatkan kondisi ketahanan nasional di wilayah NKRI	Memberikan gambaran kondisi ketahanan nasional	1. Presiden 2. Bappeda 3. Peserta Pendidikan 4. Peneliti	Data pengukuran ketahanan nasional yang akurat membantu para pemangku kebijakan untuk selalu melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kondisi ketahanan nasional, agar tidak terlambat dalam menyikapi dampak dari	Peningkatan referensi data bagi para pembuat kebijakan	Elektronik	Pusat Laboratorium

ID Metadata	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Target Layanan	Potensi Manfaat	Potensi Ekonomi	Metode Layanan	Unit Pelaksana/Unit Kerja
					dinamika lingkungan strategis.			
LEMHANNAS-DAL.01.43.05.01	Layanan portal GIS Siskurtannas Puslab	Penyediaan portal layanan GIS bagi pemerintah disamping untuk pengelolaan data yang diperlukan untuk pengukuran ketahanan nasional	Layanan portal GIS yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan data berbasis geospasial	Pemerintah Daerah	Memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan data berbasis geospasial	penghematan anggaran daerah	Elektronik	Pusat Laboratorium
LEMHANNAS-DAL.01.44.02.01	Layanan Aspirasi dan Pengaduan Pelayanan Publik	Menyerap aspirasi dan menerima pengaduan terhadap pelayanan publik Lemhannas RI serta menindaklanjutinya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.	Penyerapan aspirasi dan penerimaan pengaduan terhadap pelayanan publik Lemhannas RI	Masyarakat	Terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.	Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga.	Elektronik	Biro Humas
LEMHANNAS-DAL.02.02.01.01	Layanan Perencanaan dan Revisi Anggaran	Mengkompulir usulan dan revisi anggaran dan menindaklanjuti serta menyesuaikan dengan alokasi yang diberikan dari Biro Perencanaan	Menghasilkan rencana dan revisi anggaran belanja Debidikpimkatnas sesuai dengan SBM, SBML, SBK yang dapat mendukung terlaksananya kegiatan dengan efisien dan efektif	Seluruh unit kerja Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI	Perencanaan yang matang akan memberikan tingkat efisiensi dan efektivitas terhadap pemanfaatan APBN dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran output tahunan Debidikpimkatnas	penggunaan anggaran yang efisien dan optimal untuk setiap kegiatan yang direncanakan	Elektronik (Aplikasi SAKTI)	Direktorat Program dan Pengembangan Pendidikan
LEMHANNAS-DAL.02.02.01.02	Layanan Perencanaan	Memberikan kemudahan dalam penyusunan rencana kerja Lemhannas	Penyediaan layanan penyusunan rencana kerja tahun perencanaan	Unit kerja Lemhannas	Kemudahan dan kepastian dalam penyusunan rencana kerja unit kerja Lemhannas	Rencana kerja unit kerja Lemhannas yang efektif dan efisien	Elektronik dan Non Elektronik	Biro Perencanaan

ID Metadata	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Target Layanan	Potensi Manfaat	Potensi Ekonomi	Metode Layanan	Unit Pelaksana/Unit Kerja
LEMHANNAS-DAL.02.02.01.03	Layanan Penganggaran	Memberikan kemudahan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Lemhannas	Penyediaan layanan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun perencanaan	Unit kerja Lemhannas	Kemudahan dan kepastian dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran unit kerja Lemhannas	Rencana kerja dan anggaran unit kerja Lemhannas yang efektif dan efisien	Elektronik dan Non Elektronik	Biro Perencanaan
LEMHANNAS-DAL.02.02.04.01	Layanan Verifikasi dan Pembuatan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk seluruh kegiatan Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI	Memproses pertanggungjawaban keuangan unit kerja Debiddikpimkatnas Lemhannas RI	Menghasilkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang sesuai dengan pertanggungjawaban keuangan	Seluruh unit kerja Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI	Efisiensi waktu dan biaya, transparansi proses, akurasi data, dan mengurangi kesalahan manual	Penghematan biaya operasional dan peningkatan efisiensi anggaran	Elektronik (Aplikasi SAKTI)	Direktorat Program dan Pengembangan Pendidikan
LEMHANNAS-DAL.02.02.08.01	Layanan Pembuatan Laporan Realisasi Anggaran	Memberikan gambaran jelas mengenai penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam suatu periode tertentu.	Menyajikan laporan penggunaan anggaran dan menjadi dasar pertanggungjawaban pengelola anggaran.	Seluruh unit kerja Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI, Biro Perencanaan, dan Sestama Lemhannas RI selaku KPA	Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan, meningkatkan akuntabilitas pengelola anggaran, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta menyediakan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan.	Laporan realisasi anggaran yang baik dapat menjadi alat dalam mengantisipasi adanya sisa anggaran berlebih.	Elektronik (Aplikasi SAKTI dan e-monev) dan Non Elektronik (berupa Laporan Triwulan, Semester, dan Tahunan)	Direktorat Program dan Pengembangan Pendidikan
LEMHANNAS-DAL.02.02.08.02	Layanan Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan	Pertanggungjawaban Keuangan	Menghasilkan Laporan pertanggungjawaban keuangan di setiap kegiatan	unit kerja	Laporan Keuangan yang Berkualitas dan menjaga kepercayaan publik atas kualitas kegiatan belanja di bintadik	Laporan Keuangan yang Berkualitas dan menjaga kepercayaan publik atas kualitas kegiatan belanja di bintadik	Non Elektronik	Direktorat Pembinaan Peserta Pendidikan

ID Metadata	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Target Layanan	Potensi Manfaat	Potensi Ekonomi	Metode Layanan	Unit Pelaksana/Unit Kerja
LEMHANNAS-DAL.02.02.08.03	Layanan Pengelolaan Keuangan	Pertanggungjawaban Laporan Keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK	Menghasilkan Laporan Keuangan Lemhannas RI Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Bebas Dari Salah Saji Material yang berdampak kepada Laporan Keuangan	1. Badan Pemeriksa Keuangan 2. Kementerian Keuangan 3. Eselon Indan II Di Lingkungan Lemhannas RI	Laporan Keuangan yang Berkualitas dan Bebas Dari Salah Saji Material menjadi cerminan kredibilitas pelaksanaan APBN di dan menjaga kepercayaan publik atas kualitas kegiatan belanja di kemenhub.	Kegagalan dalam mencapai target	Elektronik dan Non Elektronik	Biro Umum
LEMHANNAS-DAL.02.02.11.01	Layanan Barang Milik Negara (BMN)	Melakukan pengelolaan BMN secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan pemindahtanganan BMN	Seluruh BMN yang dimiliki Lemhannas RI	Meningkatkan nilai guna BMN, mencegah kerugian negara, mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Lemhannas RI	Optimalisasi penggunaan BMN, potensi pendapatan dari pemindahtanganan BMN yang tidak diperlukan	Elektronik	Biro Umum
LEMHANNAS-DAL.02.02.11.01	Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Melakukan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, serta pelaksanaan pendampingan, konsultasi, bimbingan teknis dan pelaksanaan tugas lain	Menghasilkan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Sesuai Dengan Regulasi Yang Berlaku	1. Unit Kerja Lemhannas RI 2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 3. Penyedia Barang/Jasa 4. LKPP RI	Kemudahan dalam melakukan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Kebutuhan dan Peraturan Yang Berlaku	Meningkatnya proses pengelolaan barang/jasa seiring dengan modernisasi sistem Pengadaan Barang/Jasa yang semakin berkembang	Elektronik dan Non Elektronik	Biro Umum

ID Metadata	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Target Layanan	Potensi Manfaat	Potensi Ekonomi	Metode Layanan	Unit Pelaksana/Unit Kerja
LEMHANNAS-DAL.02.03.01.01	Layanan Penyusunan Revisi Juklak Juknis dan Mekanisme Hubungan Kerja Debidjianstrat	Memperbarui petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis), serta mekanisme hubungan kerja Pengkajian strategis di lingkungan Debidjianstrat guna memastikan keselarasan dan kepatuhan terhadap kebijakan serta standar operasional yang berlaku, sehingga hasil kajiannya dapat memenuhi ekspektasi stakeholder (Presiden).	Memperbarui panduan kerja dan hubungan internal untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasional pengkajian strategis.	Unit internal Debidjianstrat seperti para Direktur Pengkajian (Dirjian), Biro Umum, dan Biro Humas.	Mendapat panduan operasional yang up-to-date dan sesuai regulasi.	Pengurangan biaya operasional melalui prosedur yang lebih efisien.	Elektronik dan Non Elektronik	Direktorat Program dan Pengembangan Kajian
LEMHANNAS-DAL.02.03.01.02	Layanan Sinkronisasi Perencanaan Debidjianstrat	Menyelaraskan seluruh rencana kerja Debidjianstrat dengan rencana strategis Debidjianstrat, rencana strategis Lemhannas serta dengan kebijakan nasional dan prioritas pembangunan, sehingga memastikan terwujudnya integrasi yang harmonis antarprogram dan kegiatan.	Menyelaraskan rencana rencana kerja dengan rencana strategis Debidjianstrat, Lemhannas, RKP, RPJMN, dan RPJP pemerintah sebagai kebijakan nasional.	Unit internal Debidjianstrat seperti para Direktur Pengkajian (Dirjian), Biro Umum, dan Biro Humas.	Perencanaan yang terkoordinasi dan sesuai Renstra Lemhannas, RKP, prioritas nasional. RPJMN, dan RPJPN.	Optimalisasi anggaran dengan program yang sinkron.	Elektronik dan Non Elektronik	Direktorat Program dan Pengembangan Kajian

ID Metadata	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Target Layanan	Potensi Manfaat	Potensi Ekonomi	Metode Layanan	Unit Pelaksana/Unit Kerja
LEMHANNAS-DAL.02.04.01.01	Layanan Organisasi dan Tata Laksana	memastikan pengelolaan organisasi dapat berjalan secara efisien, transparan, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan	Memastikan Kepatuhan Regulasi, memberikan rekomendasi kebijakan dan menyediakan dokumen rekomendasi Kebijakan/regulasi Bidang Organisasi dan Tata Laksana	Unit Kerja Lemhannas RI	Terwujudnya organisasi yang berfungsi secara optimal dan patuh terhadap regulasi	meningkatkan efisiensi dalam proses operasional organisasi, meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan	Elektronik dan Non Elektronik	Biro Perencanaan
LEMHANNAS-DAL.02.04.03.01	Layanan Absensi dan Tunjangan Kinerja Pegawai Lemhannas	Menghasilkan laporan absensi dan tunjangan kinerja	Penghitungan absensi dan tunjangan kinerja pegawai	seluruh pegawai	Kemudahan dan kepastian dalam rekap absensi dan penghitungan uang makan serta tunjangan kinerja pegawai sesuai dengan data kehadiran pegawai	penyerapan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku	Elektronik	Biro Umum
LEMHANNAS-DAL.02.04.03.01	Layanan Manajemen Kepegawaian	Menjamin efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Lemhannas RI	Pengelolaan rekrutmen, pengembangan, kinerja, dan kesejahteraan pegawai	Seluruh pegawai Lemhannas RI	Meningkatkan kualitas SDM, produktivitas kerja, dan kepuasan kerja pegawai; mendukung tercapainya tujuan organisasi	Penghematan biaya operasional melalui optimalisasi penggunaan SDM	Elektronik	Biro Umum
LEMHANNAS-DAL.02.04.04.01	Layanan Penyusunan LAKIP Debidjianstrat	Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Debidjianstrat, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja dan pencapaian sasaran strategis.	Menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahunan Debidjianstrat.	Unit internal Debidjianstrat seperti para Direktur Pengkajian (Dirjian), Biro Umum, dan Biro Humas.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja, menjadi dasar perbaikan kinerja, memenuhi persyaratan regulasi	Potensi penghematan biaya jika dilakukan secara efisien, peluang kerjasama dengan lembaga lain untuk penyediaan data	Elektronik dan Non Elektronik	Direktorat Program dan Pengembangan Kajian

ID Metadata	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Target Layanan	Potensi Manfaat	Potensi Ekonomi	Metode Layanan	Unit Pelaksana/Unit Kerja
LEMHANNAS-DAL.02.04.04.02	Layanan Pengawasan Internal (utama)	Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Lemhannas RI	a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern b. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan kegiatan lainnya c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur Lemhannas RI d. Penyusunan hasil laporan pengawasan	Unit Kerja Lemhannas RI	Mencegah terjadinya penyimpangan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan, menjaga integritas organisasi	Potensi penghematan biaya akibat pencegahan kerugian, peningkatan kepercayaan publik	Elektronik dan Non Elektronik	Inspektorat
LEMHANNAS-DAL.02.04.04.03	Layanan Audit	Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah	Memastikan kepatuhan. Memastikan kepatuhan ini mencakup memeriksa apakah suatu entitas atau sistem mematuhi hukum, peraturan, standar, dan kebijakan yang berlaku.	Unit Kerja Lemhannas RI	Memberikan opini independen tentang kewajaran laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, dan efektivitas sistem pengendalian internal	Potensi meningkatkan kualitas laporan keuangan, meningkatkan kepercayaan investor, mencegah fraud	Elektronik dan Non Elektronik	Inspektorat

ID Metadata	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Target Layanan	Potensi Manfaat	Potensi Ekonomi	Metode Layanan	Unit Pelaksana/Unit Kerja
LEMHANNAS-DAL.02.04.04.04	Layanan Reviu	Penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan	Untuk memberikan keyakinan terbatas atas akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebelum disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga dan Menteri Keuangan.	Unit Kerja Lemhannas RI	Memberikan keyakinan terbatas atas informasi keuangan atau non-keuangan, mendukung pengambilan keputusan	Potensi meningkatkan kualitas informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan, mendukung proses penganggaran	Elektronik dan Non Elektronik	Inspektorat
LEMHANNAS-DAL.02.04.04.05	Layanan Pemantauan	Proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan	Untuk menilai kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan	Unit Kerja Lemhannas RI	Mendeteksi perubahan dan tren, memberikan peringatan dini atas potensi risiko, mendukung pengambilan keputusan strategis	Potensi meningkatkan kemampuan antisipasi terhadap perubahan lingkungan, mengurangi risiko kerugian	Elektronik dan Non Elektronik	Inspektorat
LEMHANNAS-DAL.02.04.04.06	Layanan Evaluasi	Rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan	Sebagai alat penilaian terhadap faktor-faktor penting suatu program termasuk situasi, kemampuan, pengetahuan, dan perkembangan tujuan.	Unit Kerja Lemhannas RI	Mengukur keberhasilan program dan kegiatan, mengidentifikasi faktor keberhasilan dan kegagalan, memberikan rekomendasi perbaikan	Potensi meningkatkan efektivitas program dan kegiatan, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran	Elektronik dan Non Elektronik	Inspektorat
LEMHANNAS-DAL.02.04.04.07	Layanan Pemantauan Tindak Lanjut	Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis untuk menentukan bahwa pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil	Layanan untuk menentukan bahwa pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan dalam tenggang waktu	Unit Kerja Lemhannas RI	Memastikan rekomendasi hasil evaluasi ditindaklanjuti, meningkatkan efektivitas perbaikan	Potensi meningkatkan kualitas hasil evaluasi, meningkatkan akuntabilitas	Elektronik dan Non Elektronik	Inspektorat

ID Metadata	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Target Layanan	Potensi Manfaat	Potensi Ekonomi	Metode Layanan	Unit Pelaksana/Unit Kerja
		pengawasan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan	yang telah ditetapkan					
LEMHANNAS-DAL.02.04.04.08	Layanan Konsultasi	Layanan konsultasi ini bertujuan untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian organisasi. Dalam Standar Audit APIP, kegiatan konsultasi ini disebut dengan kegiatan pengawasan lainnya, yang terbagi dalam kegiatan berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi	Layanan untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian organisasi. Dalam Standar Audit APIP, kegiatan konsultasi ini disebut dengan kegiatan pengawasan lainnya, yang terbagi dalam kegiatan berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi	Unit Kerja Lemhannas RI	Memberikan saran dan solusi atas permasalahan yang dihadapi, meningkatkan kapasitas organisasi	Potensi meningkatkan kualitas layanan yang diberikan, potensi pendapatan dari layanan konsultasi eksternal	Elektronik dan Non Elektronik	Inspektorat
LEMHANNAS-DAL.02.04.04.09	Layanan Pembinaan dan Asistensi RB	Melakukan peningkatan kapasitas Tim RB untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan RB oleh tim RB serta memberikan asistensi terhadap permasalahan dalam pelaksanaan RB	Meningkatkan kapasitas ASN melalui pelatihan dan pendampingan dalam reformasi birokrasi. Membantu instansi menyusun rencana aksi, memfasilitasi koordinasi, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Mengembangkan instrumen dan pedoman serta menyebarluaskan	Unit Kerja Lemhannas RI	Menciptakan birokrasi yang lebih profesional, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (berdampak)	mengoptimalkan penggunaan anggaran pemerintah. Pengurangan prosedur yang tidak perlu, penyederhanaan proses bisnis, dan penggunaan teknologi informasi dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.	Elektronik dan Non Elektronik	Biro Perencanaan

ID Metadata	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Target Layanan	Potensi Manfaat	Potensi Ekonomi	Metode Layanan	Unit Pelaksana/Unit Kerja
			informasi terkait reformasi birokrasi.					
LEMHANNAS-DAL.02.04.06.01	Layanan Umum dan Perkantoran	Memfasilitasi kebutuhan administrasi, pelayanan umum dan operasional serta pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Menghasilkan pelayanan kebutuhan administrasi, pelayanan umum dan operasional serta pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran secara prima	1. Seluruh pegawai Lemhannas RI Peserta Pendidikan PPRA/PPSA 2.	Kemudahan dan kesesuaian dalam mengakomodir setiap permohonan layanan umum dan perkantoran dari seluruh unit kerja	Peningkatan kepuasan dan kepercayaan Personel Lemhannas RI serta Peserta Pendidikan PPRA/PPSA	Elektronik dan Non Elektronik	Biro Umum
LEMHANNAS-DAL.02.05.01.01	Layanan Izin Tinggal	Memberikan Kemudahan dalam pembuatan Izin tinggal bagi Calon Peserta dan Peserta PPRA dari negara sahabat beserta keluarga inti	Penyediaan izin tinggal (Multiple Entry Permit, Exit Permit Only<EPO>) bagi Calon Peserta dan Peserta PPRA dari negara sahabat beserta keluarga inti	Calon Peserta dan Peserta PPRA dari negara sahabat beserta keluarga inti	Kemudahan dalam pembuatan izin tinggal (Multiple Entry Permit, Exit Permit Only <EPO>)	Peningkatan investasi, peningkatan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan	Elektronik dan Non Elektronik	Biro Kerjasama
LEMHANNAS-DAL.02.05.01.02	Layanan Kerja Sama Dalam Negeri	Memperluas jejaring/kerja sama institusi dengan mitra di dalam negeri untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga	Memfasilitasi kerja sama antar institusi dalam negeri	Seluruh Kementerian, Lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Non Pemerintah	Unit kerja dapat melakukan kolaborasi dalam berbagai bentuk kerja sama dalam mendukung kegiatan/sasaran lembaga	Meningkatkan Efisiensi	Non Elektronik	Biro Kerjasama

ID Metadata	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Target Layanan	Potensi Manfaat	Potensi Ekonomi	Metode Layanan	Unit Pelaksana/Unit Kerja
LEMHANNAS-DAL.02.05.01.03	Layanan Seleksi PPRA, PPSA dan P3DA	Mendapatkan peserta pendidikan yang sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang telah ditentukan oleh Lembaga	Menyeleksi calon peserta pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	TNI, Polri, Seluruh Kementerian, Lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Non Pemerintah	Menghasilkan peserta pendidikan yang sesuai dengan persyaratan	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi	Non Elektronik	Biro Kerjasama
LEMHANNAS-DAL.02.05.03.01	Layanan Pembuatan Exit Permit, Paspor Dinas dan Rekomendasi Visa	Memberikan kemudahan dalam pembuatan Exit Permit, Paspor Dinas dan Rekomendasi Visa secara daring bagi Stakeholders terkait di lingkungan Lemhannas RI	Penyediaan Exit Permit, Paspor Dinas dan Rekomendasi Visa secara daring bagi Stakeholders terkait di lingkungan Lemhannas RI	PNS/TNI/POLRI/PEJABAT NEGARA	Kemudahan dalam pembuatan Exit Permit, Paspor Dinas dan Rekomendasi Visa	Peningkatan investasi, peningkatan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan	Elektronik dan Non Elektronik	Biro Kerjasama
LEMHANNAS-DAL.02.05.05.01	Layanan Izin Presiden dan Sekretariat Negara	Memberikan kemudahan dalam pembuatan izin presiden dan sekretariat negara dalam rangka perjalanan dinas luar negeri secara daring bagi Stakeholders terkait di lingkungan Lemhannas RI	Penyediaan izin presiden dan sekretariat negara dalam rangka perjalanan dinas luar negeri secara daring bagi Stakeholders terkait di lingkungan Lemhannas RI	PNS/TNI/POLRI/PEJABAT NEGARA	Kemudahan dalam pembuatan izin presiden dan sekretariat negara dalam rangka perjalanan dinas luar negeri	Peningkatan investasi, peningkatan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan	Elektronik	Biro Kerjasama

C. Arsitektur Domain Data dan Informasi

Domain arsitektur data dan informasi disusun berdasarkan kebutuhan data yang digunakan pada proses bisnis dan layanan di Lemhannas RI yang sudah diklasifikasikan dalam referensi arsitektur data dan informasi.

1. Arsitektur Data dan Informasi

Dalam domain arsitektur data dan informasi yang dihasilkan dari berbagai aktivitas dalam proses bisnis Lemhannas RI, selanjutnya diklasifikasikan substansi data dan informasi ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur data dan informasi yang terdiri dari 4 (empat) tingkat, yaitu:

- a. data pokok, yang mengelompokkan data ke dalam data yang dihasilkan pada sektor pemerintahan dan data pendukung umum sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional.
- b. data tematik, yang menjelaskan urusan pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- c. data topik, yang menjelaskan lebih rinci dari data tematik di tingkat nasional sebagai tingkat 3 (ketiga), data dan informasi yang dihasilkan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan merelasikan ke tingkat nasional.
- d. data sub topik, yang menjelaskan lebih rinci dari data topik sebagai tingkat 4 (keempat). Lemhannas RI dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan data dan informasi yang dibutuhkan.

Setiap data yang dikelola memungkinkan berupa data yang bersifat terbuka dan bersifat tertutup. Berdasarkan dari hasil survei yang dilaksanakan terhadap seluruh Unit Kerja di Lemhannas RI, selanjutnya dilakukan pemetaan terhadap referensi arsitektur data dan informasi di Lemhannas RI sesuai arahan Arsitektur SPBE Nasional. Berikut ini disajikan arsitektur data dan informasi secara terperinci yang dikelola oleh Lemhannas RI.

Tabel 3.5 Arsitektur Data dan Informasi SPBE

RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Kode	Nama Data	Uraian Data
RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD 06.02 DATA KETENAGAKERJAAN	RAD.06.02.01 PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS	LEMHANNAS-DAD.06.02.01	Data Peserta Pendidikan	Data peserta pendidikan meliputi data pribadi, data keluarga(Istri/Suami dan anak), riwayat pendidikan umum dan khusus, jabatan terakhir, dll.
			LEMHANNAS-DAD.06.02.02	Data Calon Peserta Pendidikan (PPRA, PPSA dan P3DA)	Data yang meliputi Daftar Riwayat Hidup, Kepangkatan, Pendidikan Umum dan Kedinasan, dll
RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.01 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN	LEMHANNAS-DAD.09.02.01 .01	Data Anggaran	Data kegiatan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pada Eselon I (Debiddikpimkatnas) Lemhannas RI
		RAD.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	LEMHANNAS-DAD.09.02.11 .01	Data Sarana Prasarana Kedeputian Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan	Informasi mengenai fasilitas, peralatan, dan sumber daya yang dimiliki oleh kedeputian.
	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	LEMHANNAS-DAD.09.03.03.01	Informasi Publik yang Wajib Diumumkan secara Berkala	Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, kegiatan, dan kinerja Badan Publik.
			LEMHANNAS-DAD.09.03.03.02	Informasi Yang Wajib Diumumkan Serta Merta	informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum
			LEMHANNAS-DAD.09.03.03.03	Data aspirasi masyarakat	Data
			LEMHANNAS-DAD.09.03.03.04	Data pengaduan pelayanan publik	berisi informasi mengenai pengaduan pelayanan publik yang masuk melalui SP4N-LAPOR

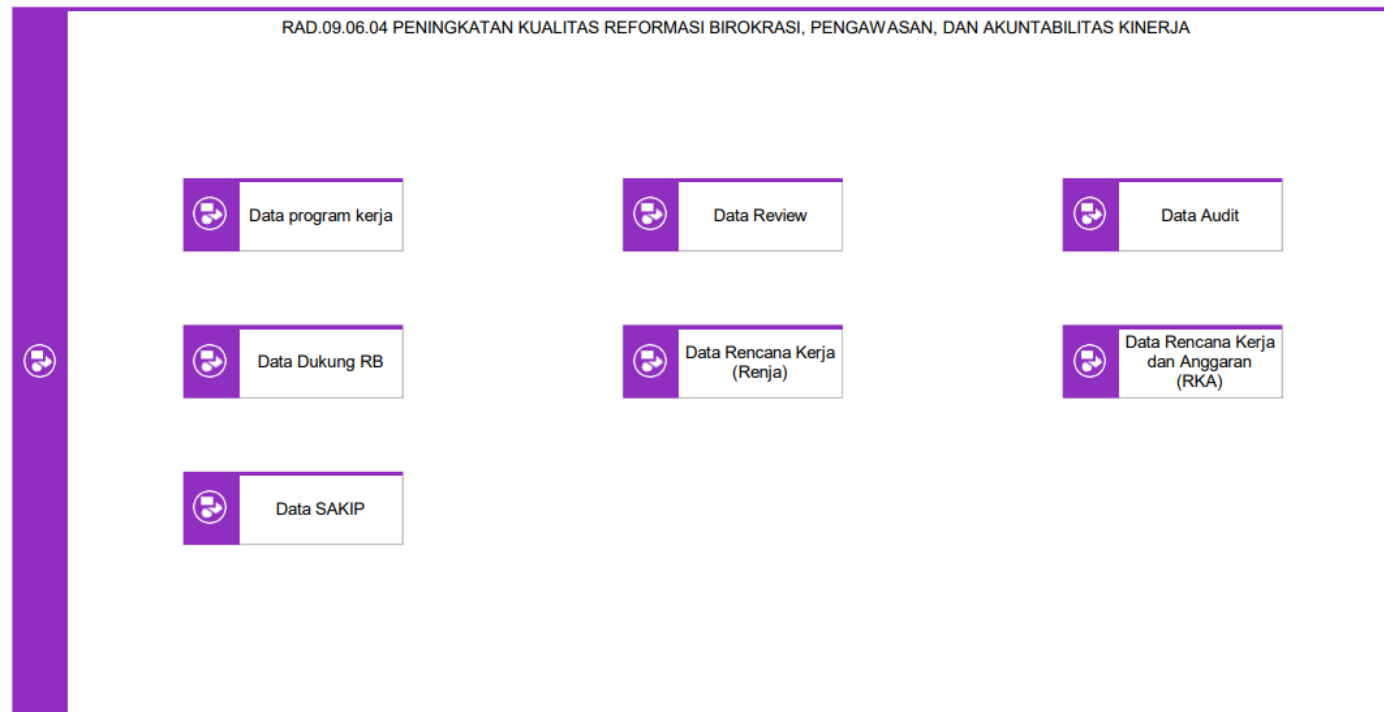
RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Kode	Nama Data	Uraian Data
			LEMHANNAS-DAD.09.03.03.05	Data Perpustakaan	1. Data katalog bahan pustaka baik cetak dan non cetak 2. Data keanggotaan perpustakaan 3. Data layanan sirkulasi (peminjaman dan pengembalian buku) 4. Data laporan statistik daftar katalog, koleksi, sirkulasi, checkpoint (daftar kunjungan), anggota dan laporan umum periodik
		RAD.09.03.05 PENGELOLAAN DATA GEOSPASIAL	LEMHANNAS-DAD.09.03.05.01	Data Spasial	Data yang diinput oleh user pemda yang menggunakan portal
	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	LEMHANNAS-DAD.09.06.01.01	Data Regulasi Bidang Tata Laksana	Data regulasi meliputi Peraturan Presiden, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur Lemhannas RI terkait ketatalaksanaan
		RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	LEMHANNAS-DAD.09.06.04.01	Data program kerja	Informasi detail mengenai program kerja yang sedang atau akan dilaksanakan, termasuk tujuan, target, dan indikator keberhasilan.
			LEMHANNAS-DAD.09.06.04.02	Data Review	Hasil evaluasi atau tinjauan terhadap suatu program, proyek, atau kebijakan.
			LEMHANNAS-DAD.09.06.04.03	Data Audit	Hasil audit terhadap suatu kegiatan atau proses, baik itu audit keuangan, kinerja, atau compliance.
			LEMHANNAS-DAD.09.06.04.04	Data Dukung RB	Meliputi Rencana Aksi, Realisasi Rencana Aksi, dan Data Monev Pelaksanaan RB

RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Kode	Nama Data	Uraian Data
			LEMHANNAS-DAD.09.06.04.05	Data Rencana Kerja (Renja)	Data Informasi Kinerja dan anggaran kegiatan pada setiap unit kerja di lingkungan Lemhannas RI
			LEMHANNAS-DAD.09.06.04.06	Data Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	Data Informasi Kinerja dan anggaran kegiatan pada setiap unit kerja di lingkungan Lemhannas RI
			LEMHANNAS-DAD.09.06.04.07	Data SAKIP	kumpulan informasi yang digunakan untuk mendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
		RAD.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	LEMHANNAS-DAD.09.06.06.01	Data Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Data Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang terjalin antara Lemhannas RI dengan Stakeholders terkait baik dalam negeri maupun luar negeri
	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIATAN NEGARA	RAD.09.07.11 PENGEMBANGAN NILAI- NILAI KEBANGSAAN	LEMHANNAS-DAD.09.07.11 .01	Informasi mengenai peserta yang mengikuti program pemantapan nilai-nilai kebangsaan, seperti identitas, latar belakang, dan hasil evaluasi.	
			LEMHANNAS-DAD.09.07.11 .02	Data Pengukuran Ketahanan Nasional	Data yang dihimpun dari berbagai sumber yang terpercaya untuk dilakukan formulasi pengukuran ketahanan nasional
RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.01 DATA KEBIJAKAN PEMERINTAH		LEMHANNAS-DAD.10.01.01	Data Regulasi Bidang Organisasi	Data regulasi meliputi Peraturan Presiden, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur Lemhannas RI terkait Organisasi

RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Kode	Nama Data	Uraian Data
			LEMHANNAS-DAD.10.01.02	Data Peraturan Gubernur Lemhannas RI	Data Peraturan Gubernur Lemhannas RI yang telah diterbitkan
			LEMHANNAS-DAD.10.01.03	Data Narasumber	Informasi mengenai narasumber yang terlibat dalam suatu kegiatan, seperti nama, afiliasi, bidang keahlian, dan kontak.
			LEMHANNAS-DAD.10.01.04	Materi dan Bahan Paparan Narasumber	Dokumen, presentasi, atau materi lain yang disiapkan oleh narasumber untuk disampaikan dalam suatu kegiatan.
			LEMHANNAS-DAD.10.01.05	Data referensi	Informasi pendukung yang berasal dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, atau laporan penelitian.

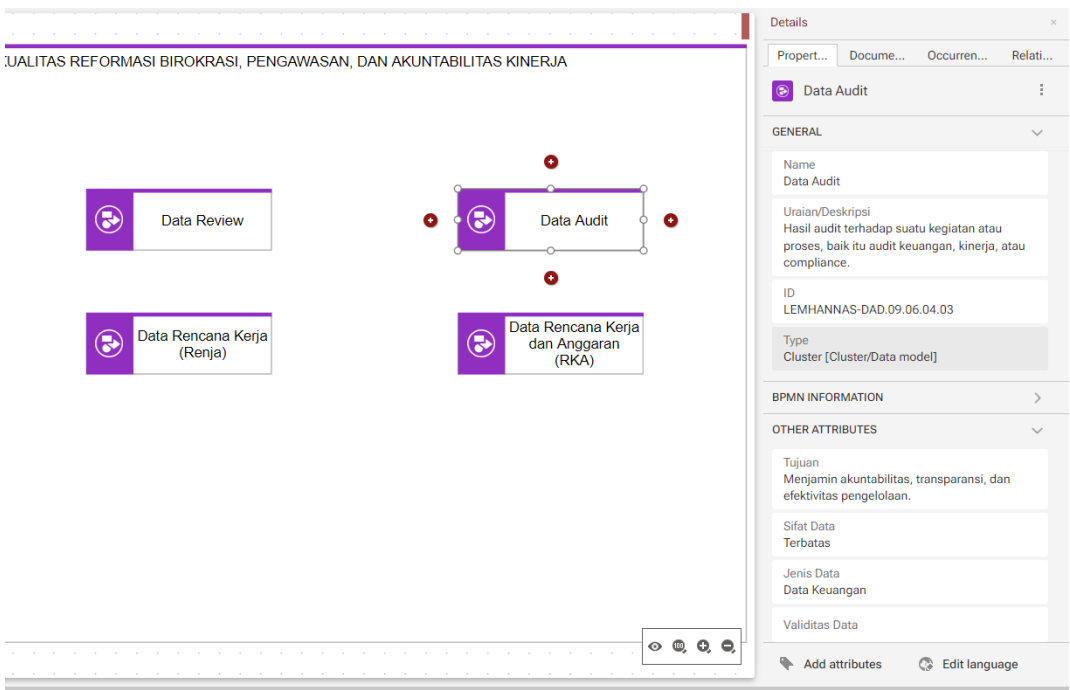
2. Dokumentasi Arsitektur Data dan Informasi

Arsitektur data dan informasi saat ini (*as is*) Lembaga Ketahanan Nasional RI dapat dilihat pada gambar 3.4 sebagai berikut.



Gambar 3.5 Arsitektur data dan informasi *as is* pada SIA

Sedangkan isian metadata data dan informasi, terdokumentasi pada setiap komponen data dan informasi seperti terlihat pada gambar 3.4 berikut.



Gambar 3.6 Metadata Arsitektur Layanan pada SIA

3. Metadata Arsitektur Data dan Informasi

Metadata dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memainkan peran krusial dalam mengorganisir, mengelola, dan menyajikan informasi yang diperlukan oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks SPBE, metadata arsitektur data memungkinkan pengidentifikasian dan penjelasan yang lebih baik tentang data yang digunakan dalam sistem. Metadata ini mencakup informasi seperti sumber data, struktur, definisi, dan hubungan antar data yang ada dalam sistem. Dengan adanya metadata yang terstruktur dengan baik, Aplikasi SPBE dapat menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berwenang, baik itu pegawai pemerintah maupun masyarakat umum. Berikut merupakan tabel Metadata Arsitektur Data dan Informasi di Lembaga Ketahanan Nasional RI .

Tabel 3.5 Metadata Arsitektur Data dan Informasi

RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Kode	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	Layanan
RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD 06.02 DATA KETENAGAKERJAAN	RAD.06.0 2.01 PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS	LEMHAN NAS- DAD.06.0 2.01	Data Peserta Pendidikan	Data peserta pendidikan meliputi data pribadi, data keluarga (istri/Suami dan anak), riwayat pendidikan umum dan khusus, jabatan terakhir, dll.	Data digunakan sebagai data base dalam memudahkan untuk proses pembelajaran	Terbatas	data lainnya	Realtime	Bintadik	Bintadik	Data Peserta	Data Peserta		Data Peserta Pendidikan
			LEMHAN NAS- DAD.06.0 2.02	Data Calon Peserta Pendidikan (PPRA, PPSA dan P3DA)	Data yang meliputi Daftar Riwayat Hidup, Kepangkatan, Pendidikan Umum dan Kedinasaan, dll	Sebagai persyaratan dari seleksi pendidikan	terbatas		Tahunan	Biro Kerja Sama dan Hukum Settama Lemhannas RI	Biro Kerja Sama dan Hukum Settama Lemhannas RI	Persyaratan Peserta Pendidikan	Persyaratan Peserta Pendidikan		
RAD.09 INFORMASI PEMERIN	RAD.09.0 2 DATA KEUANGAN	RAD.09.0 2.01 PERENCANAAN DAN	LEMHAN NAS- DAD.09.0 2.01 .01	Data Anggaran	Data kegiatan anggaran meliputi perencanaan	Data menjadi pedoman untuk merencanakan	terbatas	Data Keuangan	Realtime	Biro Perencanaan Setiap Unit kerja	Eselon I (Debidik pimpatnas) Eselon II	Data Anggaran	Data Anggaran	Tidak	Layanan Perencanaan Anggaran

RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Kode	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	Layanan
TAHAN UMUM		PENGANGGARAN APBN			aan, pelaksanaan, dan pelaporan pada Eselon I (Debiddik pimkatnas) Lemhannas RI	akan, melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi terkait anggaran				di lingkungan Eselon I (Debiddik pimkatnas)					
		RAD.09.02.11 PENGADAAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	LEMHAN NAS-DAD.09.02.11 .01	Data Sarana Prasarana Kedeputian Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan	Informasi mengenai fasilitas, peralatan, dan sumber daya yang dimiliki oleh kedeputian.	Perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana prasarana .				Direktorat Sosialisasi dan Media Pemantapan Nilai	Direktorat Sosialisasi dan Media Pemantapan Nilai				
	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	LEMHAN NAS-DAD.09.03.03.01	Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala	Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, kegiatan, dan kinerja Badan Publik.	mengimplementasikan UU No.14 Thn 2008 ttg KIP, untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan	Terbuka		Realtime	Seluruh unit di Lemhannas RI	Biro Humas			Tidak	

RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Kode	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	Layanan
						efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan									
			LEMHAN NAS-DAD.09.03.03.02	Informasi Yang Wajib Diumumkan Serta Merta	informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum	mengimplementasikan UU No. 14 Thn 2008 ttg KIP, untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan	Terbuka			Biro Humas	Biro Humas				
			LEMHAN NAS-DAD.09.03.03.03	Data aspirasi masyarakat	Data	Pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan				Biro Humas	Biro Humas				

RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Kode	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	Layanan
						masyarakat.									
			LEMHAN NAS-DAD.09.03.03.04	Data pengaduan pelayanan publik	berisi informasi mengenai pengaduan pelayanan publik yang masuk melalui SP4N-LAPOR	Peningkatan kualitas pelayanan publik.				Biro Humas	Biro Humas				
			LEMHAN NAS-DAD.09.03.03.05	Data Perpustakaan	1. Data katalog bahan pustaka baik cetak dan non cetak 2. Data keanggotaan perpustakaan 3. Data layanan sirkulasi (peminjaman dan pengembangan buku) 4. Data laporan statistik daftar katalog, koleksi, sirkulasi,	Manajemen perpustakaan, layanan informasi, dan penelitian.	Terbuka	Data Statistik	Realtime	Biro Humas	Biro Humas	Data Perpustakaan	Data Perpustakaan	Tidak	Data Perpustakaan

RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Kode	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	Layanan
					checkpoint (daftar kunjungan), anggota dan laporan umum periodik										
		RAD.09.03.05 PENGELOLAAN DATA GEOSPASIAL	LEMHAN NAS-DAD.09.03.05.01	Data Spasial	Data yang diinput oleh user pemda yang menggunakan portal	Sebagai platform penyimpanan data basis spasial baik untuk keperluan user pemerintah daerah yang menggunakan fasilitas ataupun user di pusla untuk keperluan pengukuran ketahanan nasional	Terbatas	Data Geospasial	Realtime	Pusat Laboratorium	Pusat Laboratorium	Data Pengukuran	Data Pengukuran	Ya	Data Pengukuran
	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	LEMHAN NAS-DAD.09.06.01.01	Data Regulasi Bidang Tata Laksana	Data regulasi meliputi Peraturan Presiden, Peraturan	Data digunakan untuk pedoman unit kerja dalam	Terbuka	Regulasi	Realtime	Biro Perencanaan	Biro Perencanaan	Data Regulasi Bidang Tata Laksana	Data Regulasi Bidang Tata Laksana	Tidak	Organisasi dan Tata Laksana

RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Kode	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	Layanan
					Gubernur dan Keputusan Gubernur Lemhannas RI terkait ketatalaksanaan	melaksanakan pekerjaan sehari-hari									
		RAD.09.0 6.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	LEMHAN NAS-DAD.09.0 6.04.01	Data program kerja	Informasi detail mengenai program kerja yang sedang atau akan dilaksanakan, termasuk tujuan, target, dan indikator keberhasilan.	Perencanaan, monitoring, dan evaluasi program kerja.				Direktorat Program dan Pengembangan Kajian	Direktorat Program dan Pengembangan Kajian				
			LEMHAN NAS-DAD.09.0 6.04.02	Data Review	Hasil evaluasi atau tinjauan terhadap suatu program, proyek, atau kebijakan.	Meningkatkan kualitas program, identifikasi area perbaikan, dan pengambilan keputusan.				Direktorat Program dan Pengembangan Kajian	Direktorat Program dan Pengembangan Kajian				
			LEMHAN NAS-	Data Audit	Hasil audit	Menjamin akuntabilitas				Direktorat Program	Direktorat Program				

RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Kode	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	Layanan
			DAD.09.06.04.03		terhadap suatu kegiatan atau proses, baik itu audit keuangan, kinerja, atau compliance.	tas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan.				dan Pengembangan Kajian	dan Pengembangan Kajian				
			LEMHAN NAS-DAD.09.06.04.04	Data Dukung RB	Meliputi Rencana Aksi, Realisasi Rencana Aksi, dan Data Monev Pelaksanaan RB	mendapatkan gambaran objektif perkembangan dan dampak RB dibandingkan dengan sasaran dan tujuan reformasi birokrasi.	Terbatas	Data Kinerja RB	Tahunan	Unit Kerja Lemhannas RI	Biro Perencanaan	Data Rencana Aksi dan Pelaksanaan RB	LHE RB Lemhannas RI	Tidak	Layanan Pembinaan dan Asistensi RB
			LEMHAN NAS-DAD.09.06.04.05	Data Rencana Kerja (Renja)	Data Informasi Kinerja dan anggaran kegiatan pada setiap unit kerja di lingkungan	Data digunakan untuk penyusunan Renja unit kerja dilingkungan Lemhannas RI	Terbatas	Data kinerja dan anggaran	12 bulan	Biro Perencanaan	Biro Perencanaan	Data Informasi Kinerja dan Anggaran	Data Informasi Kinerja dan Anggaran	Tidak	Data Realtime

RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Kode	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	Layanan
					Lemhannas RI										
			LEMHAN NAS-DAD.09.06.04.06	Data Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	Data Informasi Kinerja dan anggaran kegiatan pada setiap unit kerja di lingkungan Lemhannas RI	Data digunakan untuk penyusunan Renja unit kerja dilingkungan Lemhannas RI	Terbatas	Data kinerja dan anggaran	13 bulan	Biro Perencanaan	Biro Perencanaan	Data Informasi Kinerja dan Anggaran	Data Informasi Kinerja dan Anggaran	Tidak	Data Realtime
			LEMHAN NAS-DAD.09.06.04.07	Data SAKIP	kumpulan informasi yang digunakan untuk mendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Merencanakan, mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerja suatu instansi pemerintahan.	Terbatas	Data Kinerja	Tahunan	Unit Kerja Lemhannas RI	Biro Perencanaan	Data Kinerja	Laporan Kinerja	Tidak	Layanan Pembinaan dan Asistensi RB
		RAD.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	LEMHAN NAS-DAD.09.06.06.01	Data Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Data Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang terjalin antara Lemhann	Data digunakan untuk melakukan kerja sama antara Lemhannas RI dengan Stakholde	Terbatas	Data Statistik	Realtime	Biro Kerja Sama dan Hukum Settama Lemhannas RI	Biro Kerja Sama dan Hukum Settama Lemhannas RI	Data Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Data Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Tidak	Data Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Kode	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	Layanan
					as RI dengan Stakholders terkait baik dalam negeri maupun luar negeri	rs terkait baik dalam negeri maupun luar negeri									
	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIATAN NEGARA	RAD.09.07.11 PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN	LEMHAN NAS-DAD.09.07.11 .01	Informasi mengenai peserta yang mengikuti program pemantapan nilai-nilai kebangsaan, seperti identitas, latar belakang, dan hasil evaluasi.						Direktorat Sosialisasi dan Media Pemantapan Nilai	Direktorat Sosialisasi dan Media Pemantapan Nilai				
			LEMHAN NAS-DAD.09.07.11 .02	Data Pengukuran Ketahanan Nasional	Data yang dihimpun dari berbagai sumber yang terpercaya untuk dilakukan formulasi pengukuran ketahanan	Untuk mengukur kondisi ketahanan nasional di suatu wilayah	Terbatas	Data Statistik	Tahunan	Pusat Laboratorium	Pusat Laboratorium	Data Pengukuran	Data Pengukuran	Ya	Data Pengukuran

RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Kode	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	Layanan
					n nasional										
RAD.10 DATA PENDUK UNG UMUM	RAD.10.0 1 DATA KEBIJAK AN PEMERIN TAH		LEMHAN NAS- DAD.10.0 1.01	Data Regulasi Bidang Organisas i	Data regulasi meliputi Peraturan Presiden, Peraturan Gubernur dan Keputusa n Gubernur Lemhann as RI terkait Organisas i	Data digunaka n untuk pedoman unit kerja dalam melaksan akan pekerjaan sehari- hari	Terbuka	Regulasi	Realtime	Biro Perencan aan	Biro Perencan aan	Data Regulasi Bidang Organisas i	Data Regulasi Bidang Organisas i	Tidak	Organisas i dan Tata Laksana
			LEMHAN NAS- DAD.10.0 1.02	Data Peraturan Gubernur Lemhann as RI	Data Peraturan Gubernur Lemhann as RI yang telah diterbitka n	Data digunaka n untuk infentaris r dan mengklasi fikasikan Peraturan Gubernur Lemhann as RI berdasark an materi muatanny a	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Biro Kerja Sama dan Hukum Settama Lemhann as RI	Biro Kerja Sama dan Hukum Settama Lemhann as RI	Peraturan Gubernur	Data Peraturan Gubernur	Tidak	Data Infentaris r Peraturan Gubernur Lemhann as RI
			LEMHAN NAS- DAD.10.0 1.03	Data Narasum ber	Informasi mengenai narasumb er yang terlibat dalam suatu kegiatan,	Manajeme n narasumb er, persiapan materi, dan				Direktorat Program dan Pengemba ngan Kajian, Direktorat Pengkajia	Direktorat Program dan Pengemba ngan Kajian, Direktorat Pengkajia				

RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Kode	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	Layanan
					seperti nama, afiliasi, bidang keahlian, dan kontak.	evaluasi kegiatan.				n Pertahana n Keamana n dan Geografi	n Pertahana n Keamana n dan Geografi				
			LEMHAN NAS-DAD.10.0 1.04	Materi dan Bahan Paparan Narasumber	Dokumen , presentasi, atau materi lain yang disiapkan oleh narasumber untuk disampaikan dalam suatu kegiatan.	Sebagai bahan acuan dan referensi dalam kegiatan.				Direktorat Program dan Pengembangan Kajian, Direktorat Pengkajian n Pertahana n Keamana n dan Geografi	Direktorat Program dan Pengembangan Kajian, Direktorat Pengkajian n Pertahana n Keamana n dan Geografi				
			LEMHAN NAS-DAD.10.0 1.05	Data referensi	Informasi pendukung yang berasal dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, atau laporan penelitian .	Mendukung pengambilan keputusan, pengembangan kebijakan , dan penyusunan laporan.				Direktorat Pengkajian n Pertahana n Keamana n dan Geografi	Direktorat Pengkajian n Pertahana n Keamana n dan Geografi				

D. Arsitektur Domain Aplikasi

Arsitektur Aplikasi SPBE merupakan salah satu komponen utama dalam arsitektur SPBE Nasional. Arsitektur Aplikasi SPBE menerjemahkan serangkaian proses bisnis dalam suatu layanan yang didukung oleh aplikasi. Oleh karena itu, aplikasi yang dibangun hendaknya memperhatikan prinsip keterpaduan, berbagi pakai, efisiensi dan optimasi layanan. Selain itu, penyusunan Arsitektur Aplikasi SPBE dapat disesuaikan dengan referensi arsitektur proses bisnis dan layanan. Dalam hal penyusunan Arsitektur Aplikasi SPBE juga harus memperhatikan standarisasi aplikasi yang terdiri dari teknologi yang digunakan, lisensi, kode sumber terbuka dan *delivery*/prosesnya.

1. Arsitektur Aplikasi

Arsitektur Aplikasi SPBE di Lembaga Ketahanan Nasional RI diharapkan mampu mengategorikan aplikasi untuk membantu dalam identifikasi peluang untuk berbagi, penggunaan kembali, kolaborasi dan konsolidasi dari aplikasi. Definisi dari aplikasi itu sendiri, adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan pemerintah (Perpres No. 95/2018 tentang SPBE, Pasal 1 ayat 21).

Analisis kondisi aplikasi saat ini dilakukan dengan menyusun arsitektur aplikasi SPBE untuk memetakan sejauh mana transformasi digital telah dilakukan oleh Lembaga Ketahanan Nasional RI dalam menjalankan layanan yang dimilikinya. Penyusunan arsitektur aplikasi SPBE ini dilakukan dengan survey ke seluruh unit kerja. Hasil dari arsitektur aplikasi SPBE ini dijadikan acuan untuk menyusun kebutuhan pengembangan aplikasi di Lembaga Ketahanan Nasional RI. Berikut ini disajikan arsitektur aplikasi SPBE di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI.

Tabel. 3.6 Arsitektur Aplikasi

RAA Tingkat 1	RAA Tingkat 2	Kode	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Basis Aplikasi	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	LEMHANAS-DAA.01.01.01	JDIH	Aplikasi untuk pengelolaan dan pendokumentasian produk hukum	Pendokumentasian dan publikasi produk hukum	Web Based	Kementerian Hukum dan HAM	Biro Kerja Sama dan Hukum Settama Lemhannas RI
		LEMHANAS-DAA.01.01.02	SP4N-LAPOR!	1. Penyerapan aspirasi 2. Penerimaan pengaduan pelayanan publik	Layanan informasi publik	Web Based	KemenPANRB	Biro Humas
	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	LEMHANAS-DAA.01.02.01	Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)	aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.	Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran 2. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen Supplier dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran 3. Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan.	Web Based		Kementerian Keuangan
		LEMHANAS-DAA.01.02.02	Online Monitoring SPAN (OMSPAN)	Aplikasi yang digunakan untuk memberikan layanan informasi yang cepat, akurat, terinci dan terintegrasi mengenai implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)	1. Modul Penganggaran 2. Modul Komitmen 3. Modul Pembayaran dan Informasi Lainnya terkait implementasi SPAN.	Web Based	Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan

		LEMHANAS-DAA.01.02.03	Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI)	Sistem billing yang dikelola oleh Kemenkeu RI untuk memfasilitasi pembayaran/penyetoran PNPB dan penerimaan non anggaran	Pembuatan Billing Sisa UP/TUP, Pembuatan Billing PNPB, Setor Billing, Laporan PNPB	Web Based	Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan
		LEMHANAS-DAA.01.02.04	Single Source Database PNPB (SSD.PNPB)	Aplikasi yang digunakan untuk modul pelaporan PNPB	Target PNPB, Realiasi PNPB dan Pelaporan PNPB	Web Based	KEMENTERIAN KEUANGAN	KEMENTERIAN KEUANGAN
		LEMHANAS-DAA.01.02.05	DJP Online	situs milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu RI yang berisi berbagai macam aplikasi perpajakan.	Melaporkan SPT secara online dan real time, pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode billing,	Web Based	Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan
		LEMHANAS-DAA.01.02.06	MPN g3	sistem yang dibangun Kemenkeu dalam rangka mengelola penerimaan negara secara jauh lebih akurat, tepat waktu, dan juga dalam rangka memberikan layanan lebih baik kepada seluruh masyarakat dalam menjalankan kewajiban membayar pajak dan kewajiban lainnya	melayani penyetoran penerimaan negara hingga 1.000 transaksi per detik,	Web Based	Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan
		LEMHANAS-DAA.01.02.07	Gaji Web	program aplikasi komputer berbasis web yang disediakan oleh Direktorat cJenderal Perbendaharaan dan digunakan untuk melakukan pcngelolaan administrasi belanja pegawai	melakukan pcngelolaan administrasi belanja pegawai bagi pegawai Aparatur Sipil Negara pusat, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia	Web Based	Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan
		LEMHANAS-DAA.01.02.08	Mon SAKTI	Monitoring Sistem Aplikasi SAKTI Tools yang digunakan oleh pengguna SAKTI	Platform monitoring, pengendalian, pengawasan, rekonsiliasi, pelaporan, dan	Web Based	Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan

					evaluasi transaksi keuangan negara.			
		LEMHANAS-DAA.01.02.09	KRISNA	aplikasi yang digunakan untuk mendukung seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi sampai dengan audit serta feedback.	meningkatkan sinergi perencanaan pusat untuk mendukung pencapaian prioritas nasional dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga	Web Based	BAPPENAS dan Kemenkeu	BAPPENAS dan Kemenkeu
		LEMHANAS-DAA.01.02.10	LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)	layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada Kementerian/Lembaga/Pe rangkat Daerah (K/L/PD) yang tidak memiliki LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Selain memfasilitasi UKPBJ dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, LPSE juga melayani pendaftaran Pelaku Usaha baru yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.	melaksanakan pengadaan dibawah 200 jt dan diatas 200 juta baik pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dan jasa konsultansi yang dilaksanakan melalui tender / seleksi	Web Based	LKPP RI	LKPP RI

		LEMHANAS-DAA.01.02.11	SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)	aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP	sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam meng-akses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.	Web Based	LKPP RI	LKPP RI
		LEMHANAS-DAA.01.02.12	Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN)	aplikasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan data ASN secara nasional meliputi seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah	seluruh manajemen kepegawaian mulai dari pengadaan ASN sampai dengan pensiun ASN	Web Based	BKN RI	BKN RI
		LEMHANAS-DAA.01.02.13	Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN)	SSCASN atau Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara adalah situs resmi pendaftaran ASN secara nasional sebagai pintu pendaftaran pertama seleksi ASN ke seluruh Instansi baik Pusat maupun Daerah dan dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara RI	pelaksanaan pendaftaran dan seleksi ASN	Web Based	BKN RI	BKN RI
		LEMHANAS-DAA.01.02.14	Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (SIMPEGNAS)	SIMPEGNAS merupakan aplikasi umum berbagi pakai nasional bidang Kepegawaian. Aplikasi SIMPEGNAS berbasis website yang terintegrasi dengan layanan pada SIASN dalam hal manajemen ASN	layanan perencanaan kepegawaian, pengadaan ASN, KP, pemberhentian, peremajaan data, pindah instansi, status dan kedudukan, dashboard dan monitoring dan layanan referensi.	Web Based	BKN RI	BKN RI

		LEMHANAS-DAA.01.02.15	Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit (SIPINTER)	SIPINTER adalah Sistem Informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk menyampaikan hasil penilaian mandiri beserta buktinya ke KASN. Sistem informasi ini juga digunakan KASN untuk menyampaikan hasil verifikasi dan penilaian sistem merit ke instansi pemerintah.	untuk menyampaikan hasil penilaian mandiri dari instansi ke KASN serta untuk menyampaikan hasil verifikasi penilaian sistem merit dari KASN ke instansi	Web Based	KASN	KASN
		LEMHANAS-DAA.01.02.16	Digitalisasi Sistem Penilaian Angka Kredit Konvensional ke Integrasi (Dispakati)	Aplikasi Dispakati adalah aplikasi berbasis online yang ditujukan untuk membantu instansi pemerintah pusat/daerah dan/atau instansi pembina dalam melakukan penyesuaian angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi bagi pejabat fungsional di lingkungannya dan/atau yang menjadi binaannya	melakukan penyesuaian angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi bagi pejabat fungsional di lingkungannya dan/atau yang menjadi binaannya	Web Based	BKN RI	BKN RI
		LEMHANAS-DAA.01.02.17	Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi)	Aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	untuk mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Web Based		
		LEMHANAS-DAA.01.02.18	Portal RB Nasional	dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia.	mengakses data dan informasi terkait reformasi birokrasi, mengukur kinerja, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan menyusun rencana aksi, memantau dan mengevaluasi	Web Based	Kemen PANRB RI	Kemen PANRB RI

				Portal ini berfungsi sebagai pusat informasi, data, dan berbagai alat yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah dalam melaksanakan evaluasi dan pengembangan reformasi birokrasi.	pelaksanaan reformasi birokrasi			
		LEMHANAS-DAA.01.02.19	Aplikasi Sistem Kerja (evinbalaks.spbe.go.id)	Aplikasi yang bertujuan untuk pengisian data berkaitan dengan evaluasi kelembagaan dan sistem kerja	untuk mendukung proses berkaitan dengan evaluasi kelembagaan dan sistem kerja	Web Based	Kemen PANRB RI	Kemen PANRB RI
		LEMHANAS-DAA.01.02.20	E-Sakip Reviu (ESR) Menpan	sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk mendukung pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Aplikasi ini dirancang untuk memfasilitasi proses pengumpulan, pengelolaan, dan evaluasi data kinerja instansi pemerintah.	Mengumpulkan data kinerja instansi pemerintah, mulai dari perencanaan strategis, perjanjian kinerja, hingga laporan kinerja.	Web Based	Kemen PANRB RI	Kemen PANRB RI
		LEMHANAS-DAA.01.02.21	AEPSILON	Aplikasi untuk pengurusan Exit Permit, Paspor Dinas, Dan Rekomendasi secara daring	1. Exit Permit 2. Paspor Dinas 3. Rekomendasi Visa	Mobile	Kementerian Luar Negeri RI	Biro Kerja Sama dan Hukum Settama Lemhannas RI
		LEMHANAS-DAA.01.02.22	SIMPEL SETNEG	Aplikasi untuk pengurusan izin presiden dan sekretariat negara	1. Izin Presiden 2. Izin Sekretariat Negara	Web Based	Kemensetneg RI	Biro Kerja Sama dan Hukum Settama Lemhannas RI

				dalam rangka perjalanan dinas luar negeri				
		LEMHANAS-DAA.01.02.23	Layanan Diplomatik Kemlu	Aplikasi untuk pengurusan izin tinggal (Multiple Entry Permit, Exit Permit Only <EPO>)	1. Exit Permit Only 2. Multiple Entry	Web Based	Kementerian Luar Negeri RI	Biro Kerja Sama dan Hukum Settama Lemhannas RI
		LEMHANAS-DAA.01.02.24	e-Integrity SPIP	Aplikasi yang merupakan alat penilaian tingkat maturitas SPIP berbasis elektronik, sehingga dapat memperlancar proses penilaian maturitas SPIP	Memberikan kemudahan bagi seluruh perangkat daerah untuk mengelola dan memantau pelaksanaan SPIP secara lebih terstruktur dan sistematis	Web Based	BPKP	INSPEKTORAT
		LEMHANAS-DAA.01.02.25	Penilaian Kapabilitas APIP	Aplikasi yang digunakan untuk suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP		Web Based	BPKP	INSPEKTORAT
		LEMHANAS-DAA.01.02.26	Reviu PAPBJ (Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa	Aplikasi yang mendukung upaya percepatan penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan Jasa serta memastikan bahwa telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan		Web Based	BPKP	INSPEKTORAT
		LEMHANAS-DAA.01.02.27	SIPTL (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut)	Aplikasi berbasis informasi teknologi yang dirancang untuk monitor tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	Untuk mengelola data pemantauan tindak lanjut secara real time antara BPK dengan entitas yang diperiksa	Web Based	BPK	INSPEKTORAT

	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	LEMHANNAS-DAA.02.02.01	MyTunkin	Aplikasi untuk perekaman data absensi, penghitungan presensi untuk uang makan dan penghitungan tunjangan kinerja pegawai	1. Perekaman data absensi 2. Penghitungan dan rekap presensi untuk uang makan dan tunjangan kinerja 3. Penghitungan tunjangan kinerja pegawai	Web Based	Biro Telematika	Biro Telematika dan Biro Umum
		LEMHANNAS-DAA.02.02.02	EMAIL LEMHANNAS RI	Aplikasi Mail Server milik Lemhannas RI Open Source (Zimbra) yang memungkinkan seluruh personel Lemhannas RI memiliki email Lembaga dengan domain @lemhannas.go.id	Pengelolaan Email Instansi Lemhannas RI	Web Based	Biro Telematika	Biro Telematika
		LEMHANNAS-DAA.02.02.03	DRIVE LEMHANNAS RI	Aplikasi Cloud Storage Open Source (Nextcloud) milik Lemhannas RI	Wadah Penyimpanan file untuk organik Lemhannas	Web Based	Biro Telematika	Biro Telematika
		LEMHANNAS-DAA.02.02.04	PRISMA NUTANIX HCI	Aplikasi Dashboard milik Nutanix HCI	Berfungsi sebagai manajemen Virtual Machine pada perangkat Nutanix milik Lemhannas RI	Web Based	Biro Telematika	Biro Telematika
		LEMHANNAS-DAA.02.02.05	Security Information and Event Management (SIEM)	Sistem Aplikasi berbasis Open Source yang berfungsi sebagai sistem deteksi intrusi berbasis host (endpoint)	Melakukan analisis log pemeriksaan integritas, pemantauan registri Windows, deteksi rootkit, peringatan berbasis waktu dan respons aktif.	Web Based	Biro Telematika	Biro Telematika
		LEMHANNAS-DAA.02.02.06	Aplikasi Dashboard integration	Aplikasi integrasi absensi Lemhannas RI	Melakukan integrasi antara mesin absen fingerprint dan mesin absen Face Recognition	Web Based	Biro Telematika	Biro Telematika
		LEMHANNAS-DAA.02.02.07	Portal Lemhannas RI	Penyediaan informasi terkait Lembaga	Layanan informasi publik	Web Based	Biro Humas	Biro Humas
		LEMHANNAS-DAA.02.02.08	PPID Lemhannas RI	1. Penyediaan informasi publik 2. Pelayanan permohonan informasi dari masyarakat	Layanan informasi publik	Web Based	Biro Humas	Biro Humas

		LEMHANNAS-DAA.02.02.09	E-LIBRARY	1. Pendataan katalog bahan pustaka baik cetak dan non cetak 2. Pendaftaran keanggotaan perpustakaan 3. Pelayanan sirkulasi (peminjaman dan pengembalian buku) 4. Laporan statistik daftar katalog, koleksi, sirkulasi, checkpoint (daftar kunjungan), anggota dan laporan umum periodik	Layanan informasi publik	Web Based	Biro Humas	Biro Humas
		LEMHANNAS-DAA.02.02.10	E-LEARNING	Manajemen Sistem Pembelajaran	Platform yang dapat memudahkan akses pembelajaran	Web Based	Biro Telematika Lemhannas RI	Kedeputian Pendidikan
		LEMHANNAS-DAA.02.02.11	E Peserta	Aplikasi Untuk mengisi bioadata peserta pendidikan sebagai bentuk data base peserta pendidikan	Menginput data peserta	Web Based	Biro Telematika Lemhannas RI	Bintadik
		LEMHANNAS-DAA.02.02.12	NextCloud (Drive Lemhannas)	Aplikasi yang digunakan untuk penyimpanan data/dokumen secara daring	Penyimpanan dokumen secara daring.	Cloud		Lemhannas RI
		LEMHANNAS-DAA.02.02.13	-Repository	platform digital yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan berbagai jenis dokumen dan informasi dalam bentuk elektronik.	tempat penyimpanan terpusat yang mudah diakses dan dikelola.	Web Based	DIREKTORAT JIAN PROGBANGJIAN	DIREKTORAT JIAN PROGBANGJIAN
		LEMHANNAS-DAA.02.02.14	Drive Lemhannas	Penyimpanan dokumen secara daring.	Penyimpanan dokumen secara daring.	Web Based	DIREKTORAT JIAN HANKAM & GEOGRAFI	DIREKTORAT JIAN HANKAM & GEOGRAFI
		LEMHANNAS-DAA.02.02.15	E-Taplay Data Alumni			Web Based	DIREKTORAT SOSIALISASI DAN MEDIA	DIREKTORAT SOSIALISASI DAN MEDIA PEMANTAPAN NILAI

							PEMANTAPAN NILAI	
		LEMHANNAS- DAA.02.02.16	Portal E-Taplai			Web Based	DIREKTORAT SOSIALISASI DAN MEDIA PEMANTAPAN NILAI	DIREKTORAT SOSIALISASI DAN MEDIA PEMANTAPAN NILAI
		LEMHANNAS- DAA.02.02.17	Portal Siskurtannas Puslab	Media sistem informasi yang digunakan untuk menyediakan layanan informasi Lemhannas RI dalam upaya mewujudkan target akselerasi pembangunan nasional serta meningkatkan kondisi ketahanan nasional di wilayah NKRI melalui proses mengukur dan meneliti kondisi ketahanan nasional dan analisis isu strategis	Melakukan operasi Pengukuran Ketahanan Nasional, perumusan analisis isu strategis, simulasi kebijakan publik, menyajikan kondisi ketahanan nasional.	Web Based		
		LEMHANNAS- DAA.02.02.18	Portal GIS Siskurtannas Puslab	Penyediaan portal layanan GIS bagi pemerintah disamping untuk pengelolaan data yang diperlukan untuk pengukuran ketahanan nasional dengan akses terintegrasi data spasial secara real-time	Layanan portal GIS yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan data berbasis geospasial	Web Based	Puslab Lemhannas	Puslab Lemhannas
		LEMHANNAS- DAA.02.02.19	Siskurtannas Mobile	Pada dasarnya aplikasi ini merupakan aplikasi statik yang didesain dan diimplementasikan untuk berjalan pada platform android sehingga user dapat memantau skor	Memberikan kemudahan akses informasi pengukuran ketahanan nasional	Mobile	Puslab Lemhannas	Puslab Lemhannas

				ketahanan nasional melalui hand phone				
		LEMHANNAS-DAA.02.02.20	Aplikasi Statik Siskurtannas Puslab	Bagian dari aplikasi siskurtannas yang memberikan laporan skor ketahanan nasional sampai tingkat kabupaten/kota dalam bentuk tabular.	melakukan pengukuran dan memberikan laporan skor ketahanan nasional sampai tingkat kabupaten/kota dalam bentuk tabular.	Web Based	Puslab Lemhannas	Puslab Lemhannas
		LEMHANNAS-DAA.02.02.21	Aplikasi Dinamis Siskurtannas Puslab	Bagian dari aplikasi siskurtannas yang melakukan prediksi skor ketahanan nasional secara multi-years berdasarkan parameter yang diberikan oleh user.	melakukan prediksi skor ketahanan nasional secara multi-years berdasarkan parameter yang diberikan oleh user dan menghasilkan simulasi kebijakan publik	Web Based	Puslab Lemhannas	Puslab Lemhannas
		LEMHANNAS-DAA.02.02.22	Data Integrator	Aplikasi ini berkomunikasi dengan sistem yang dikembangkan oleh BPS dan Kemdikbud dalam bentuk API (Application Programming Interface).	menjadi penghubung antar sistem dalam melakukan proses integrasi data	Web Based	Puslab Lemhannas	Puslab Lemhannas
		LEMHANNAS-DAA.02.02.23	Aplikasi GIS	Aplikasi ini menerapkan konsep Geographic Information System. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat melihat sebaran skor ketahanan nasional yang di-superposisi-kan ke dalam peta geografis. Dengan pengidentifikasian warna yang unik untuk setiap rentang skor, pengguna dapat melihat dengan	Memberikan kemudahan akses informasi pengukuran ketahanan nasional dengan cara tampilan data berbasis spasial	Web Based	Puslab Lemhannas	Puslab Lemhannas

				cepat sebaran tingkat ketahanan wilayah secara spasial.				
		LEMHANNAS-DAA.02.02.24	Web Application Firewall	Web Application Firewall	berfungsi untuk melindungi aplikasi web dari serangan yang sering menargetkan kerentanannya, seperti injeksi SQL, cross-site scripting (XSS), dan serangan DDoS. WAF bekerja dengan memantau, memfilter, dan memblokir lalu lintas HTTP/S yang masuk ke aplikasi web berdasarkan aturan keamanan yang ditentukan. Dengan cara ini, WAF membantu mencegah serangan berbahaya mencapai aplikasi web, menjaga data sensitif dan integritas sistem tetap aman.		Biro Telematika	Biro Telematika

		LEMHANNAS-DAA.02.02.25	Lisensi Zimbra Collaboration Suite Premier - Professional Edition	Lisensi Email server Zimbra Collaboration Suite Premier - Professional Edition adalah solusi komprehensif untuk manajemen email dan kolaborasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan enterprise. Lisensi ini menawarkan fitur-fitur unggulan seperti manajemen email, kalender, tugas, serta kolaborasi dokumen yang terintegrasi dalam satu platform.	Lisensi ini menyediakan keamanan tingkat lanjut dengan anti-spam, anti-virus, dan enkripsi, serta mendukung integrasi multi-platform dan aplikasi pihak ketiga. Ini memungkinkan Lemhannas RI untuk meningkatkan perlindungan data dan efisiensi komunikasi, sambil memastikan kelancaran operasional dalam lingkungan yang aman.		Biro Telematika	Biro Telematika
		LEMHANNAS-DAA.02.02.26	Aplikasi TRK (Tunjangan Remunerasi Kinerja)	merupakan aplikasi untuk mengelola Kinerja Individu yang akan menentukan besaran remunerasi yang diterima	Penetapan kinerja, pengukuran kinerja, Pelaporan Kinerja, Penilaian Kinerja, Perhitungan Tunjangan Kinerja Pelaporan & Analisis Kinerja, Integrasi dengan Sistem Kepegawaian	Web Based	Biro Telematika	Biro Telematika
		LEMHANNAS-DAA.02.02.27	SLiMS Perpustakaan Lemhannas RI	1. Pendataan katalog bahan pustaka baik cetak dan non cetak 2. Pendaftaran keanggotaan perpustakaan 3. Pelayanan sirkulasi (peminjaman dan pengembalian buku) 4. Laporan statistik daftar katalog, koleksi, sirkulasi, checkpoint (daftar kunjungan), anggota dan laporan umum periodik	Online catalog, sirkulasi perpustakaan, pengolahan bahan pustaka		Perpustakaan Lemhannas RI	Biro Humas
		LEMHANNAS-DAA.02.02.28	Portal Perpustakaan Lemhannas RI	Sebagai website resmi perpustakaan Lemhannas RI	Portal informasi perpustakaan		Perpustakaan Lemhannas RI	Biro Humas

		LEMHANNAS-DAA.02.02.29	Lembayung	1. Mengarsipkan dan menilai tone berita secara otomatis 2. Otomatisasi pengelolaan media sosial dan memantau pertumbuhan kinerja akun dari waktu ke waktu 3. Penyediaan penyimpanan komputasi awan	1. Layanan Media Monitoring 2. Layanan Manajemen Media Sosial 3. Layanan Komputasi Awan Pemerintah			Biro Humas
--	--	------------------------	-----------	--	--	--	--	------------

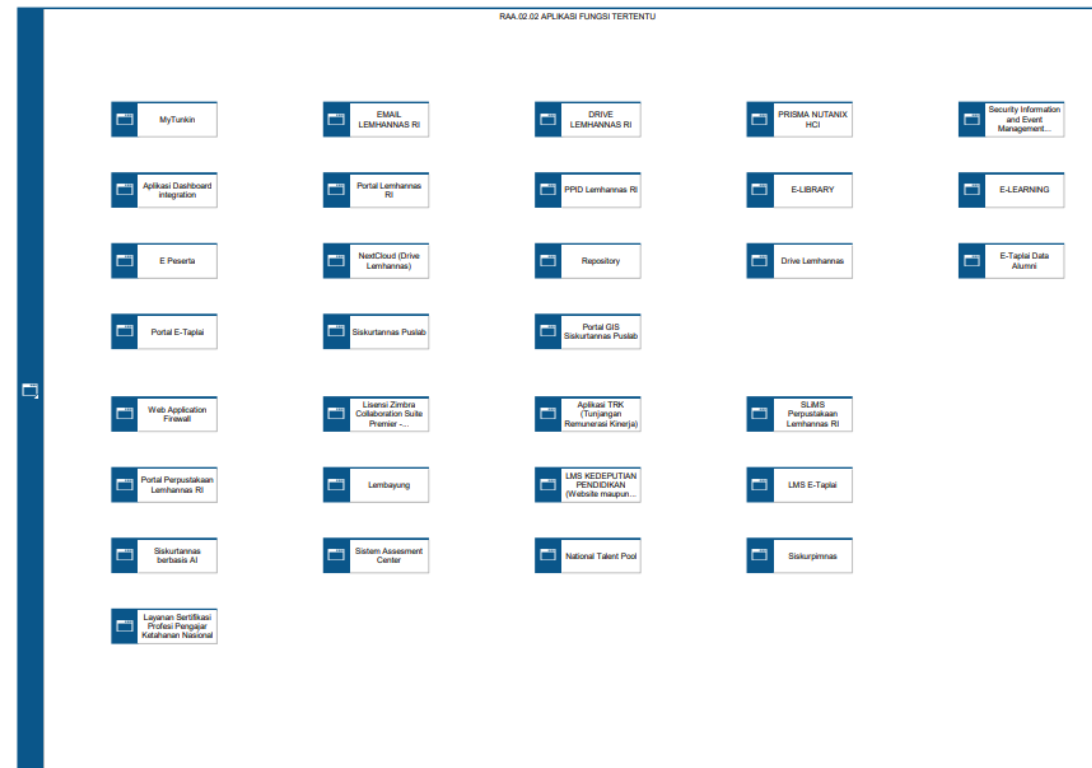
		LEMHANNAS-DAA.02.02.30	LMS KEDEPUTIAN PENDIDIKAN (Website maupun Aplikasi Mobile Android dan Ios)	Manajemen Sistem Pembelajaran	Platform yang dapat memudahkan akses pembelajaran, menu dan fitur aplikasi mudah dicari dan digunakan oleh user/pengguna aplikasi (Peserta dan Organik Kedeputian Pendidikan) baik itu website maupun mobile, Menu dan fitur yang diharapkan dapat berfungsi seperti: 1. Kemudahan mengisi presensi yang akuntabel 2. Kemudahan mengisi dan pengajuan form data peserta, form ijin peserta, form evaluasi dan form kebutuhan lainnya, 3. Rekap ketidakhadiran secara aktual yang bisa dilihat oleh peserta dan dikelola oleh staf 4. Pengumuman untuk peserta pendidikan yang dapat diakses oleh peserta dan organik pendidikan dan dapat memberikan notifikasi melalui aplikasi mobile 5. Kemudahan mengakses data atau informasi mengenai Tutor Pendamping, Tajar, Taji dan Taprof serta penceramah atau narasumber 6. Kemudahan mengunduh dan mengunggah materi, bahan pembelajaran serta kegiatan pembelajaran 7. Adanya kolom pengajuan	Web Based	DIREKTORAT OPSDIK, BINTADIK	DIREKTORAT OPSDIK, BINTADIK
--	--	------------------------	--	-------------------------------	---	-----------	-----------------------------	-----------------------------

					keluhan sarparas dan pelayanan pendidikan 8. Mempunyai Fitur Penilaian Peserta yang mudah untuk digunakan dan diakses 9. Notifikasi Pemberitahuan kegiatan pembelajaran maupun kegiatan kedeputian			
		LEMHANNAS-DAA.02.02.31	LMS E-Taplai				DIREKTORAT SOSIALISASI DAN MEDIA PEMANTAPAN NILAI	DIREKTORAT SOSIALISASI DAN MEDIA PEMANTAPAN NILAI
		LEMHANNAS-DAA.02.02.32	Siskurtannas berbasis AI				PUSAT LABORATORIUM	PUSAT LABORATORIUM

		LEMHANNAS-DAA.02.02.33	Sistem Assesment Center				PUSAT LABORATORIUM	PUSAT LABORATORIUM
		LEMHANNAS-DAA.02.02.34	National Talent Pool				PUSAT LABORATORIUM	PUSAT LABORATORIUM
		LEMHANNAS-DAA.02.02.35	Siskurpimnas				PUSAT LABORATORIUM	PUSAT LABORATORIUM
		LEMHANNAS-DAA.02.02.36	Layanan Sertifikasi Profesi Pengajar Ketahanan Nasional				PUSAT LABORATORIUM	PUSAT LABORATORIUM

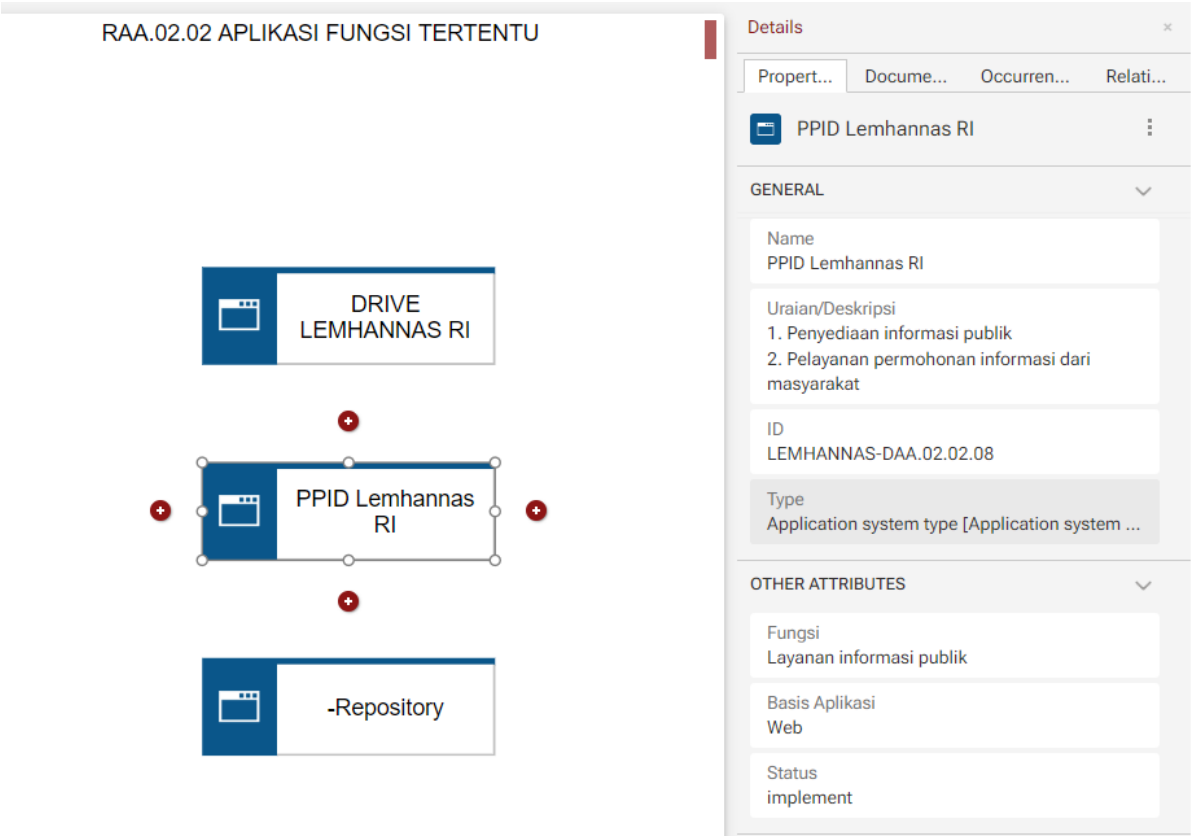
2. Dokumentasi Arsitektur Aplikasi

Arsitektur aplikasi saat ini (as is) Lembaga Ketahanan Nasional RI dapat dilihat pada gambar 3.4 sebagai berikut.



Gambar 3.7 Arsitektur Aplikasi as is pada Sistem Informasi Arsitektur

Sedangkan isian metadata aplikasi, terdokumentasi pada setiap komponen data dan informasi seperti terlihat pada gambar 3.4 berikut.



Gambar 3.8 Metadata Arsitektur Aplikasi pada SIA

3. Metadata Arsitektur Aplikasi

Di dalam Metadata Arsitektur Aplikasi SPBE ini dapat memudahkan Lembaga Ketahanan Nasional RI dalam mengelola, mengidentifikasi, dan melakukan pencarian (proses menemukan kembali) terhadap domain arsitekturnya. Metadata Arsitektur Aplikasi SPBE memiliki beberapa atribut yang merupakan karakteristik/ciri yang mendefinisikan metadata arsitekturnya.

Tabel. 3.7 Metadata Arsitektur Aplikasi

RAA Tingkat 1	RAA Tingkat 2	Kode	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Layanan	Inputan Data	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	LEMHANAS-DAA.01.01.01	JDIH	Aplikasi untuk pengelolaan dan pendokumentasi an produk hukum	Pendokumentasi an dan publikasi produk hukum	Layanan informasi publik	Biro Kerja Sama dan Hukum Lemhannas RI	Unit Kerja di Lingkungan Lemhannas RI	Dashboard dan Rekapitulasi Data Hasil Perkembangan Kegiatan	BPHN Kementerian Hukum dan HAM	Web Based		Kementerian Hukum dan HAM	Biro Kerja Sama dan Hukum Settama Lemhannas RI
		LEMHANAS-DAA.01.01.02	SP4N-LAPOR !	1. Penyerapan aspirasi 2. Penerimaan pengaduan pelayanan publik	Layanan informasi publik		Unit Kerja di Lingkungan Lemhannas RI		Pejabat di Lingkungan Lemhannas RI	Web Based	Web Based		KemenPANRB	Biro Humas
	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	LEMHANAS-DAA.01.02.01	Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)	aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.	Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran 2. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen Supplier dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran 3. Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan.	Layanan informasi internal	Unit Kerja di Lingkungan Lemhannas RI	Unit Kerja dan Pihak Ketiga di Lingkungan Lemhannas RI	Dashboard dan Rekapitulasi Data Hasil Perkembangan Kegiatan	Kemenkeu RI, Pihak Ketiga, Internal Lemhannas RI, BPK RI	Web Based			Kementerian Keuangan

RAA Tingkat 1	RAA Tingkat 2	Kode	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Layanan	Inputan Data	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
		LEMHANAS-DAA.01.02.02	Online Monitoring SPAN (OMSPAN)	Aplikasi yang digunakan untuk memberikan layanan informasi yang cepat, akurat, terinci dan terintegrasi mengenai implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)	1.Modul Penganggaran 2.Modul Komitmen 3.Modul Pembayaran dan Informasi Lainnya terkait implementasi SPAN.	Layanan informasi internal	Unit Kerja di Lingkungan Lemhannas RI	Unit Kerja dan Pihak Ketiga di Lingkungan Lemhannas RI	Informasi DIPA, Data Ketersediaan Dana, Data Realisasi Belanja, Data Realisasi Penerimaan, Modul Pembayaran, Modul Penerimaan, Bank, Monitoring SP2D gaji.	Kemenkeu RI, Pihak Ketiga, Internal Lemhannas RI, BPK RI	Web Based		Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan
		LEMHANAS-DAA.01.02.03	Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI)	Sistem billing yang dikelola oleh Kemenkeu RI untuk memfasilitasi pembayaran/penyetoran PNPB dan penerimaan non anggaran	Pembuatan Billing Sisa UP/TUP, Pembuatan Billing PNPB, Setor Billing, Laporan PNPB	Layanan informasi Internal	Unit Kerja di Lingkungan Lemhannas RI	Unit Kerja dan Pihak Ketiga di Lingkungan Lemhannas RI	Kode Billing Penyetoran dan Pelaporan PNPB	Kemenkeu RI, Pihak Ketiga, Internal Lemhannas RI, BPK RI	Web Based		Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan
		LEMHANAS-DAA.01.02.04	Single Source Database PNPB (SSD.PNPB)	Aplikasi yang digunakan untuk modul pelaporan PNPB	Target PNPB, Realisasi PNPB dan Pelaporan PNPB	Layanan informasi Internal	Unit Kerja di Lingkungan Lemhannas RI	Unit Kerja dan Pihak Ketiga di Lingkungan Lemhannas RI	Laporan PNPB	Kemenkeu RI, Pihak Ketiga, Internal Lemhannas RI, BPK RI	Web Based		KEMENTERIAN KEUANGAN	KEMENTERIAN KEUANGAN
		LEMHANAS-DAA.01.02.05	DJP Online	situs milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu RI yang berisi berbagai macam aplikasi perpajakan.	Melaporkan SPT secara online dan real time, pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode billing,	Layanan informasi Internal	Unit Kerja di Lingkungan Lemhannas RI	Unit Kerja dan Pihak Ketiga di Lingkungan Lemhannas RI	Laporan SPT	Kemenkeu RI, Pihak Ketiga, Internal Lemhannas RI, BPK RI	Web Based		Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan

RAA Tingkat 1	RAA Tingkat 2	Kode	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Layanan	Inputan Data	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
		LEMHANAS-DAA.01.02.06	MPN g3	sistem yang dibangun Kemenkeu dalam rangka mengelola penerimaan negara secara jauh lebih akurat, tepat waktu, dan juga dalam rangka memberikan layanan lebih baik kepada seluruh masyarakat dalam menjalankan kewajiban membayar pajak dan kewajiban lainnya	melayani penyetoran penerimaan negara hingga 1.000 transaksi per detik,	Layanan informasi Internal	Unit Kerja di Lingkungan Lemhannas RI	Unit Kerja dan Pihak Ketiga di Lingkungan Lemhannas RI	kode billing untuk seluruh jenis penerimaan negara yang dapat dilanjutkan ke proses penyetoran.	Kemenkeu RI, Pihak Ketiga, Internal Lemhannas RI, BPK RI	Web Based		Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan
		LEMHANAS-DAA.01.02.07	Gaji Web	program aplikasi komputer berbasis web yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan digunakan untuk melakukan pengelolaan administrasi belanja pegawai	melakukan pengelolaan administrasi belanja pegawai bagi pegawai Aparatur Sipil Negara pusat, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia	Layanan informasi Internal	Unit Kerja di Lingkungan Lemhannas RI	Unit Kerja dan Pihak Ketiga di Lingkungan Lemhannas RI			Web Based		Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan
		LEMHANAS-DAA.01.02.08	Mon SAKTI	Monitoring Sistem Aplikasi SAKTI Tools yang digunakan oleh pengguna SAKTI	Platform monitoring, pengendalian, pengawasan, rekonsiliasi, pelaporan, dan evaluasi transaksi keuangan negara.	Layanan informasi Internal	Unit Kerja di Lingkungan Lemhannas RI	Unit Kerja dan Pihak Ketiga di Lingkungan Lemhannas RI			Web Based		Kementerian Keuangan	Kementerian Keuangan

RAA Tingkat 1	RAA Tingkat 2	Kode	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Layanan	Inputan Data	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
		LEMHANAS-DAA.01.02.09	KRISNA	aplikasi yang digunakan untuk mendukung seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi sampai dengan audit serta feedback.	meningkatkan sinergi perencanaan pusat untuk mendukung pencapaian prioritas nasional dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga	Layanan informasi Internal	Unit Kerja di Lingkungan Lemhannas RI	Unit Kerja dan Pihak Ketiga di Lingkungan Lemhannas RI	RKA K/L	Kemenkeu RI, Pihak Ketiga, Internal Lemhannas RI, BPK RI	Web Based		BAPPENAS dan Kemenkeu	BAPPENAS dan Kemenkeu
		LEMHANAS-DAA.01.02.10	LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)	layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) yang tidak memiliki LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Selain memfasilitasi UKPBJ dalam melaksanakan Pengadaan	melaksanakan pengadaan dibawah 200 jt dan diatas 200 juta baik pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dan jasa konsultasi yang dilaksanakan melalui tender / seleksi	Layanan Informasi Publik	Unit Kerja di Lingkungan Lemhannas RI	Unit Kerja dan Pihak Ketiga di Lingkungan Lemhannas RI	E - Kontrak, SPPBJ dan Penyedia terpilih	Unit Kerja dan Pimpinan di lingkungan Lemhannas RI	Web Based		LKPP RI	LKPP RI

RAA Tingkat 1	RAA Tingkat 2	Kode	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Layanan	Inputan Data	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
				Barang/Jasa secara elektronik, LPSE juga melayani pendaftaran Pelaku Usaha baru yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.										
		LEMHANAS-DAA.01.02.11	SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)	aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP	sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.	Layanan Informasi Publik	Unit Kerja di Lingkungan Lemhannas RI	Unit Kerja dan Pihak Ketiga di Lingkungan Lemhannas RI	Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Unit Kerja dan Pimpinan di lingkungan Lemhannas RI	Web Based		LKPP RI	LKPP RI
		LEMHANAS-DAA.01.02.12	Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN)	aplikasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan data ASN secara nasional meliputi seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah	seluruh manajemen kepegawaian mulai dari pengadaan ASN sampai dengan pensiun ASN	Layanan internal	Unit Kerja di Lingkungan Lemhannas RI	Unit Kerja di Lingkungan Lemhannas RI	Data Kepegawaian	Unit Kerja dan Pimpinan di lingkungan Lemhannas RI	Web Based		BKN RI	BKN RI
		LEMHANAS-DAA.01.02.13	Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN)	SSCASN atau Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara adalah situs resmi pendaftaran ASN secara	pelaksanaan pendaftaran dan seleksi ASN	Layanan Informasi Publik	para pendaftar CASN		Riwayat pendaftar CASN	Biro Umum	Web Based		BKN RI	BKN RI

RAA Tingkat 1	RAA Tingkat 2	Kode	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Layanan	Inputan Data	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
				nasional sebagai pintu pendaftaran pertama seleksi ASN ke seluruh Instansi baik Pusat maupun Daerah dan dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara RI										
		LEMHANAS-DAA.01.02.14	Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (SIMPEGNAS)	SIMPEGNAS merupakan aplikasi umum berbagi pakai nasional bidang Kepegawaian. Aplikasi SIMPEGNAS berbasis website yang terintegrasi dengan layanan pada SIASN dalam hal manajemen ASN	layanan perencanaan kepegawaian, pengadaan ASN, KP, pemberhentian, peremajaan data, pindah instansi, status dan kedudukan, dashboard dan monitoring dan layanan referensi.	Layanan Informasi Publik	Unit Kerja di Lingkungan Lemhannas RI	Unit Kerja di Lingkungan Lemhannas RI	Data Kepegawaian	Unit Kerja di Lingkungan Lemhannas RI	Web Based		BKN RI	BKN RI
		LEMHANAS-DAA.01.02.15	Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit (SIPINTER)	SIPINTER adalah Sistem Informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk menyampaikan hasil penilaian mandiri beserta buktinya ke KASN. Sistem informasi ini juga digunakan KASN untuk menyampaikan hasil verifikasi dan penilaian sistem merit ke instansi pemerintah.	untuk menyampaikan hasil penilaian mandiri dari instansi ke KASN serta untuk menyampaikan hasil verifikasi penilaian sistem merit dari KASN ke instansi	Layanan Informasi Publik	Unit Kerja di Lingkungan Lemhannas RI	Unit Kerja di Lingkungan Lemhannas RI	hasil penilaian mandiri sistem merit	Unit Kerja di Lingkungan Lemhannas RI	Web Based		KASN	KASN

RAA Tingkat 1	RAA Tingkat 2	Kode	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Layanan	Inputan Data	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
		LEMHANAS-DAA.01.02.16	Digitalisasi Sistem Penilaian Angka Kredit Konvensional ke Integrasi (Dispakati)	Aplikasi Dispakati adalah aplikasi berbasis online yang ditujukan untuk membantu instansi pemerintah pusat/daerah dan/atau instansi pembina dalam melakukan penyesuaian angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi bagi pejabat fungsional di lingkungannya dan/atau yang menjadi binaannya	melakukan penyesuaian angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi bagi pejabat fungsional di lingkungannya dan/atau yang menjadi binaannya	Layanan internal			Hasil angka kredit yang telah diintegrasikan				BKN RI	BKN RI
		LEMHANAS-DAA.01.02.17	Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi)	Aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	untuk mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik						Web Based			
		LEMHANAS-DAA.01.02.18	Portal RB Nasional	dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di	mengakses data dan informasi terkait reformasi birokrasi, mengukur kinerja, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan menyusun rencana aksi, memantau dan mengevaluasi	Layanan Pembinaan dan Asistensi RB	Unit Kerja Lemhannas RI	Unit Kerja Lemhannas RI	Data Rencana Aksi dan Realisasi Kinerja RB Lemhannas RI	Pimpinan Lemhannas RI dan Kemenpan RB RI	Web Based		Kemen PANRB RI	Kemen PANRB RI

RAA Tingkat 1	RAA Tingkat 2	Kode	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Layanan	Inputan Data	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
				Indonesia. Portal ini berfungsi sebagai pusat informasi, data, dan berbagai alat yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah dalam melaksanakan evaluasi dan pengembangan reformasi birokrasi.	pelaksanaan reformasi birokrasi									
		LEMHANAS-DAA.01.02.19	Aplikasi Sistem Kerja (evinbal.aks.spb e.go.id)	Aplikasi yang bertujuan untuk pengisian data berkaitan dengan evaluasi kelembagaan dan sistem kerja	untuk mendukung proses berkaitan dengan evaluasi kelembagaan dan sistem kerja						Web Based		Kemen PANRB RI	Kemen PANRB RI
		LEMHANAS-DAA.01.02.20	E-Sakip Reviu (ESR) Menpan	sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk mendukung pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Aplikasi ini dirancang untuk memfasilitasi proses pengumpulan, pengelolaan, dan evaluasi data kinerja	Mengumpulkan data kinerja instansi pemerintah, mulai dari perencanaan strategis, perjanjian kinerja, hingga laporan kinerja.	Layanan Pembinaan dan Asistensi RB	Unit Kerja di Lingkungan Lemhannas RI	Unit Kerja di Lingkungan Lemhannas RI	Data Pelaksanaan SAKIP	Pimpinan di Lingkungan Lemhannas RI dan Kemenpan RB RI	Web Based		Kemen PANRB RI	Kemen PANRB RI

RAA Tingkat 1	RAA Tingkat 2	Kode	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Layanan	Inputan Data	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
				instansi pemerintah.										
		LEMHANAS-DAA.01.02.21	AEPSILON	Aplikasi untuk pengurusan Exit Permit, Paspor Dinas, Dan Rekomendasi secara daring	1. Exit Permit 2. Paspor Dinas 3. Rekomendasi Visa	Layanan informasi internal	Unit Kerja di Lingkungan Lemhannas RI	Unit Kerja di Lingkungan Lemhannas RI	Dashboard dan Rekapitulasi Data Hasil Perkembangan Kegiatan	Dirkonsuler Kementerian Luar Negeri RI	Mobile	PHP	Kementerian Luar Negeri RI	Biro Kerja Sama dan Hukum Settama Lemhannas RI
		LEMHANAS-DAA.01.02.22	SIMPEL SETNEG	Aplikasi untuk pengurusan izin presiden dan sekretariat negara dalam rangka perjalanan dinas luar negeri	1. Izin Presiden 2. Izin Sekretariat Negara	Layanan informasi internal	Unit Kerja di Lingkungan Lemhannas RI	Unit Kerja di Lingkungan Lemhannas RI	Dashboard dan Rekapitulasi Data Hasil Perkembangan Kegiatan	Biro KTLN Kementerian Sekretariat Negara RI	Web Based	PHP	Kemensetneg RI	Biro Kerja Sama dan Hukum Settama Lemhannas RI
		LEMHANAS-DAA.01.02.23	Layanan Diplomatik Kemlu	Aplikasi untuk pengurusan izin tinggal (Multiple Entry Permit, Exit Permit Only <EPO>)	1. Exit Permit Only 2. Multiple Entry	Layanan informasi internal	Unit Kerja di Lingkungan Lemhannas RI	Unit Kerja di Lingkungan Lemhannas RI	Dashboard dan Rekapitulasi Data Hasil Perkembangan Kegiatan	Dirkonsuler Kementerian Luar Negeri RI	Web Based	PHP	Kementerian Luar Negeri RI	Biro Kerja Sama dan Hukum Settama Lemhannas RI
		LEMHANAS-DAA.01.02.24	e-Integritas SPIP	Aplikasi yang merupakan alat penilaian tingkat maturitas SPIP berbasis elektronik, sehingga dapat memperlancar proses penilaian maturitas SPIP	Memberikan kemudahan bagi seluruh perangkat daerah untuk mengelola dan memantau pelaksanaan SPIP secara lebih terstruktur dan sistematis	Layanan informasi publik	Unit Kerja di Lingkungan Lemhannas RI	Unit Kerja di Lingkungan Lemhannas RI		Pimpinan di Lingkungan Lemhannas RI	Web Based		BPKP	INSPEKTORAT

RAA Tingkat 1	RAA Tingkat 2	Kode	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Layanan	Inputan Data	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
		LEMHANAS-DAA.01.02.25	Penilaian Kapabilitas APIP	Aplikasi yang digunakan untuk suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP		Layanan informasi publik	Unit Kerja di Lingkungan Lemhannas RI	Unit Kerja di Lingkungan Lemhannas RI		Pimpinan di Lingkungan Lemhannas RI	Web Based		BPKP	INSPEKTORAT
		LEMHANAS-DAA.01.02.26	Reviu PAPBJ (Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa)	Aplikasi yang mendukung upaya percepatan penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan Jasa serta memastikan bahwa telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan		Layanan informasi publik	Unit Kerja di Lingkungan Lemhannas RI	Unit Kerja di Lingkungan Lemhannas RI	Data Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa	Pimpinan di Lingkungan Lemhannas RI	Web Based		BPKP	INSPEKTORAT
		LEMHANAS-DAA.01.02.27	SIPTL (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut)	Aplikasi berbasis informasi teknologi yang dirancang untuk monitor tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	Untuk mengelola data pemantauan tindak lanjut secara real time antara BPK dengan entitas yang diperiksa	Layanan informasi publik	Unit Kerja di Lingkungan Lemhannas RI	Unit Kerja di Lingkungan Lemhannas RI	Data Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Pimpinan di Lingkungan Lemhannas RI	Web Based		BPK	INSPEKTORAT
	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	LEMHANNAS-DAA.02.02.01	MyTun kin	Aplikasi untuk perekaman data absensi, penghitungan presensi untuk uang makan dan penghitungan	1. Perekaman data absensi 2. Penghitungan dan rekap presensi untuk uang makan dan tunjangan kinerja	Layanan Internal	Pegawai Lemhannas	Biro Telematika	Data rekapitulasi kehadiran pegawai	Biro Umum	Web Based		Biro Telematika	Biro Telematika dan Biro Umum

RAA Tingkat 1	RAA Tingkat 2	Kode	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Layanan	Inputan Data	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
				tunjangan kinerja pegawai	3. Penghitungan tunjangan kinerja pegawai									
		LEMHANNAS- DAA.02.02.02	EMAIL LEMHA NNAS RI	Aplikasi Mail Server milik Lemhannas RI Open Source (Zimbra) yang memungkinkan seluruh personel Lemhannas RI memiliki email Lembaga dengan domain @lemhannas.go .id	Pengelolaan Email Instansi Lemhannas RI	Layanan Komunikasi dan Data Informasi					Web Based	Zimbra	Biro Telematika	Biro Telematika
		LEMHANNAS- DAA.02.02.03	DRIVE LEMHA NNAS RI	Aplikasi Cloud Storage Open Source (Nextcloud) milik Lemhannas RI	Wadah Penyimpanan file untuk organik Lemhannas						Web Based	Nextcloud	Biro Telematika	Biro Telematika
		LEMHANNAS- DAA.02.02.04	PRISM A NUTAN IX HCI	Aplikasi Dashboard milik Nutanix HCI	Berfungsi sebagai manajemen Virtual Machine pada perangkat Nutanix milik Lemhannas RI	Layanan Manajemen Infrastruktur TIK					Web Based		Biro Telematika	Biro Telematika
		LEMHANNAS- DAA.02.02.05	Securit y Informa tion and Event Manag ement (SIEM)	Sistem Aplikasi berbasis Open Source yang berfungsi sebagai sistem deteksi intrusi berbasis host (endpoint)	Melakukan analisis log pemeriksaan integritas, pantauan registri Windows, deteksi rootkit, peringatan berbasis waktu dan respons aktif.	Layanan Manajemen Infrastruktur TIK					Web Based	Wazuh	Biro Telematika	Biro Telematika
		LEMHANNAS- DAA.02.02.06	Aplikasi Dashbo ard	Aplikasi integrasi absensi Lemhannas RI	Melakukan integrasi antara mesin absen fingerprint dan	Layanan Aplikasi dan Data					Web Based	PHP	Biro Telematika	Biro Telematika

RAA Tingkat 1	RAA Tingkat 2	Kode	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Layanan	Inputan Data	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
			integrat ion		mesin absen Face Recognition									
		LEMHANNAS-DAA.02.02.07	Portal Lemhannas RI	Penyediaan informasi terkait Lembaga	Layanan informasi publik		Unit Kerja di Lingkungan Lemhannas RI		Publik internal dan eksternal Lemhannas RI	Web Based	Web Based		Biro Humas	
		LEMHANNAS-DAA.02.02.08	PPID Lemhannas RI	1. Penyediaan informasi publik 2. Pelayanan permohonan informasi dari masyarakat	Layanan informasi publik		Unit Kerja di Lingkungan Lemhannas RI		Publik internal dan eksternal Lemhannas RI	Web Based	Web Based		Biro Humas	
		LEMHANNAS-DAA.02.02.09	E-LIBRARY	1. Pendataan katalog bahan pustaka baik cetak dan non cetak 2. Pendaftaran keanggotaan perpustakaan 3. Pelayanan sirkulasi (peminjaman dan pengembalian buku) 4. Laporan statistik daftar katalog, koleksi, sirkulasi, checkpoint (daftar kunjungan), anggota dan laporan umum periodik	Layanan informasi publik	1. Data katalog bahan pustaka baik cetak dan non cetak 2. Data keanggotaan perpustakaan 3. Data layanan sirkulasi (peminjaman dan pengembalian buku) 4. Data laporan statistik daftar katalog, koleksi, sirkulasi, checkpoint (daftar kunjungan), anggota dan laporan umum periodik	Unit Kerja di Lingkungan Lemhannas RI	1. Informasi katalog bahan pustaka baik cetak dan non cetak melalui OPAC 2. Informasi keanggotaan perpustakaan 3. Informasi layanan sirkulasi (peminjaman dan pengembalian buku) 4. Informasi laporan statistik daftar katalog, koleksi, sirkulasi, checkpoint (daftar kunjungan), anggota dan laporan umum periodik	Publik internal dan eksternal Lemhannas RI	Web Based	Web Based		Biro Humas	

RAA Tingkat 1	RAA Tingkat 2	Kode	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Layanan	Inputan Data	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
		LEMHANNAS-DAA.02.02.10	E-LEARNING	Manajemen Sistem Pembelajaran	Platform yang dapat memudahkan akses pembelajaran	Layanan pembelajaran peserta pendidikan	Unit Kerja di Lingkungan Kedepuitan Pendidikan	unit Kerja di Lingkungan Kedepuitan pendidikan	Dashboard	Peserta Pendidikan, internal kedepuitan pendidikan	Web Based		Biro Telematika Lemhannas RI	Kedepuitan Pendidikan
		LEMHANNAS-DAA.02.02.11	E Peserta	Aplikasi Untuk mengisi bioadata peserta pendidikan sebagai bentuk data base peserta pendidikan	Menginput data peserta	Layanan informasi Internal	Unit Kerja di lingkungan Bintadik	Unit Kerja di lingkungan Bintadik	Dashboard dan data hasil input peserta pendidikan	Peserta Pendidikan dan unit kerja lingkungan kedepuitan pendidikan	Web Based		Biro Telematika Lemhannas RI	Bintadik
		LEMHANNAS-DAA.02.02.12	NextCloud (Drive Lemhannas)	Aplikasi yang digunakan untuk penyimpanan data/dokumen secara daring	Penyimpanan dokumen secara daring.	Pelaksanaan Kajian Strategis (layanan data/informasi internal)	Ditjian Sosial Budaya dan Demografi	Ditjian Sosial Budaya dan Demografi	Seluruh dokumen pendukung pelaksanaan kajian strategis tersimpan secara daring.	Pimpinan dan Staf di Ditjian Sosial Budaya dan Demografi	Cloud			Lemhannas RI
		LEMHANNAS-DAA.02.02.13	- Repository	platform digital yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan berbagai jenis dokumen dan informasi dalam bentuk elektronik.	tempat penyimpanan terpusat yang mudah diakses dan dikelola.	mendukung penyimpanan dokumen dalam berbagai format, termasuk teks, gambar, audio, dan video.	Direktorat di lingkungan Deputi Pengkajian Strategik	Direktorat pengkajian di lingkungan Deputi Bidang Pengkajian	Dokumen Ikkajian, narasumber	Pimpinan (Direktur, Deputi, Sestama, Wagub, dan Gubernur)	Web Based	HTML, Javascript, PHP	DIREKTORAT JIAN PROGBANGJIAN	DIREKTORAT JIAN PROGBANGJIAN
		LEMHANNAS-DAA.02.02.14	Drive Lemhannas	Penyimpanan dokumen secara daring.	Penyimpanan dokumen secara daring.	Penyelenggaraan Kajian Strategis	Ditjian Hankam dan Geografi	Ditjian Hankam dan Geografi	Seluruh dokumen pendukung penyelenggaraan kajian strategis tersedia secara daring.	Seluruh anggota Ditjian Hankam dan Geografi			DIREKTORAT JIAN HANKAM & GEOGRAFI	DIREKTORAT JIAN HANKAM & GEOGRAFI
		LEMHANNAS-DAA.02.02.15	E-Taplay										DIREKTORAT SOSIALISASI DAN MEDIA	DIREKTORAT SOSIALISASI DAN MEDIA

RAA Tingkat 1	RAA Tingkat 2	Kode	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Layanan	Inputan Data	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
			Data Alumni										PEMANTAPAN NILAI	PEMANTAPAN NILAI
		LEMHANNAS-DAA.02.02.16	Portal E-Taplai										DIREKTORAT SOSIALISASI DAN MEDIA PEMANTAPAN NILAI	DIREKTORAT SOSIALISASI DAN MEDIA PEMANTAPAN NILAI
		LEMHANNAS-DAA.02.02.17	Portal Siskurt annas Puslab	Media sistem informasi yang digunakan untuk menyediakan layanan informasi Lemhannas RI dalam upaya mewujudkan target akselerasi pembangunan nasional serta meningkatkan kondisi ketahanan nasional di wilayah NKRI melalui proses mengukur dan meneliti kondisi ketahanan nasional dan analisis isu strategis	Melakukan operasi Pengukuran Ketahanan Nasional, perumusan analisis isu strategis, simulasi kebijakan publik, menyajikan kondisi ketahanan nasional.	Layanan informasi publik terbatas	K/L/PD yang menghasilkan data olahan	K/L/PD yang menghasilkan data olahan	Indeks Ketahanan Nasional, Simulasi Kebijakan Publik	K/L/PD yang menggunakan data Indeks Ketahanan Nasional	Web Based	PHP	Puslab Lemhannas	Puslab Lemhannas
		LEMHANNAS-DAA.02.02.18	Portal GIS Siskurt annas Puslab	Penyediaan portal layanan GIS bagi pemerintah disamping untuk pengelolaan data yang diperlukan untuk pengukuran ketahanan nasional dengan akses terintegrasi data spasial secara real-time	Layanan portal GIS yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan data berbasis geospasial	Layanan informasi publik terbatas	K/L/PD yang menggunakan layanan portal	K/L/PD yang menggunakan layanan portal	Inventaris data spasial	K/L/PD yang menggunakan layanan portal	Web Based	PHP	Puslab Lemhannas	Puslab Lemhannas

RAA Tingkat 1	RAA Tingkat 2	Kode	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Layanan	Inputan Data	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
		LEMHANNAS-DAA.02.02.19	Siskurt annas Mobile	Pada dasarnya aplikasi ini merupakan aplikasi statik yang didesain dan diimplementasikan untuk berjalan pada platform android sehingga user dapat memantau skor ketahanan nasional melalui hand phone	Memberikan kemudahan akses informasi pengukuran ketahanan nasional	Layanan informasi publik terbatas	K/L/PD yang menggunakan layanan data	K/L/PD yang menggunakan layanan data	Indeks Ketahanan Nasional	K/L/PD yang menggunakan layanan data	Mobile	Java	Puslab Lemhannas	Puslab Lemhannas
		LEMHANNAS-DAA.02.02.20	Aplikasi Statik Siskurt annas Puslab	Bagian dari aplikasi siskurtannas yang memberikan laporan skor ketahanan nasional sampai tingkat kabupaten/kota dalam bentuk tabular.	melakukan pengukuran dan memberikan laporan skor ketahanan nasional sampai tingkat kabupaten/kota dalam bentuk tabular.	Layanan informasi publik terbatas	K/L/PD yang menggunakan layanan data	K/L/PD yang menggunakan layanan data	Indeks Ketahanan Nasional	K/L/PD yang menggunakan layanan data	Web Based	asp.net, c-sharp	Puslab Lemhannas	Puslab Lemhannas
		LEMHANNAS-DAA.02.02.21	Aplikasi Dinamis Siskurt annas Puslab	Bagian dari aplikasi siskurtannas yang melakukan prediksi skor ketahanan nasional secara multi-years berdasarkan parameter yang diberikan oleh user.	melakukan prediksi skor ketahanan nasional secara multi-years berdasarkan parameter yang diberikan oleh user dan menghasilkan simulasi kebijakan publik	Layanan informasi publik terbatas	K/L/PD yang menggunakan layanan data	K/L/PD yang menggunakan layanan data	data prediktif untuk simulasi kebijakan publik	K/L/PD yang menggunakan layanan data	Web Based	asp.net, typescript, c-sharp	Puslab Lemhannas	Puslab Lemhannas
		LEMHANNAS-DAA.02.02.22	Data Integrator	Aplikasi ini berkomunikasi dengan sistem yang dikembangkan oleh BPS dan Kemdikbud dalam bentuk API (Application	menjadi penghubung antar sistem dalam melakukan proses integrasi data	Layanan informasi publik terbatas	K/L/PD yang menggunakan layanan data	K/L/PD yang menggunakan layanan data	data integratif	K/L/PD yang menggunakan layanan data	Web Based	php	Puslab Lemhannas	Puslab Lemhannas

RAA Tingkat 1	RAA Tingkat 2	Kode	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Layanan	Inputan Data	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
				Programming Interface).										
		LEMHANNAS-DAA.02.02.23	Aplikasi GIS	Aplikasi ini menerapkan konsep Geographic Information System. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat melihat sebaran skor ketahanan nasional yang di-superposisikan ke dalam peta geografis. Dengan pengidentifikasian warna yang unik untuk setiap rentang skor, pengguna dapat melihat dengan cepat sebaran tingkat ketahanan wilayah secara spasial.	Memberikan kemudahan akses informasi pengukuran ketahanan nasional dengan cara tampilan data berbasis spasial	Layanan informasi publik terbatas	K/L/PD yang menggunakan layanan data	K/L/PD yang menggunakan layanan data	Inventaris data spasial	K/L/PD yang menggunakan layanan data	Web Based	php	Puslab Lemhannas	Puslab Lemhannas

RAA Tingkat 1	RAA Tingkat 2	Kode	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Layanan	Inputan Data	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
		LEMHANNAS-DAA.02.02.24	Web Applica tion Firewall	Web Application Firewall	berfungsi untuk melindungi aplikasi web dari serangan yang sering menargetkan kerentanannya, seperti injeksi SQL, cross-site scripting (XSS), dan serangan DDoS. WAF bekerja dengan memantau, memfilter, dan memblokir lalu lintas HTTP/S yang masuk ke aplikasi web berdasarkan aturan keamanan yang ditentukan. Dengan cara ini, WAF membantu mencegah serangan berbahaya mencapai aplikasi web, menjaga data sensitif dan integritas sistem tetap aman.	Layanan Manajemen Infrastruktur TIK							Biro Telematika	Biro Telematika
		LEMHANNAS-DAA.02.02.25	Lisensi Zimbra Collabo ration Suite Premier - Profess ional Edition	Lisensi Email server Zimbra Collaboration Suite Premier - Professional Edition adalah solusi komprehensif untuk manajemen	Lisensi ini menyediakan keamanan tingkat lanjut dengan anti-spam, anti-virus, dan enkripsi, serta mendukung integrasi multi-	Layanan							Biro Telematika	Biro Telematika

RAA Tingkat 1	RAA Tingkat 2	Kode	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Layanan	Inputan Data	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
				email dan kolaborasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan enterprise. Lisensi ini menawarkan fitur-fitur unggulan seperti manajemen email, kalender, tugas, serta kolaborasi dokumen yang terintegrasi dalam satu platform.	platform dan aplikasi pihak ketiga. Ini memungkinkan Lemhannas RI untuk meningkatkan perlindungan data dan efisiensi komunikasi, sambil memastikan kelancaran operasional dalam lingkungan yang aman.									
		LEMHANNAS-DAA.02.02.26	Aplikasi TRK (Tunjangan Remunerasi Kinerja)	merupakan aplikasi untuk mengelola Kinerja Individu yang akan menentukan besaran remunerasi yang diterima	Penetapan kinerja, pengukuran kinerja, Pelaporan Kinerja, Penilaian Kinerja, Perhitungan Tunjangan Kinerja Pelaporan & Analisis Kinerja, Integrasi dengan Sistem Kepegawaian	Pengelolaan Kinerja Secara Online	data kepegawaian, pohon kinerja seluruh individu	Unit Kerja Lemhannas RI	capaian kinerja individu		Web Based	Biro Telematika	Biro Telematika	Biro Telematika
		LEMHANNAS-DAA.02.02.27	SLiMS Perpustakaan Lemhannas RI	1. Pendataan katalog bahan pustaka baik cetak dan non cetak 2. Pendaftaran keanggotaan perpustakaan 3. Pelayanan sirkulasi (peminjaman dan pengembalian buku)	Online catalog, sirkulasi perpustakaan, pengolahan bahan pustaka						Web Based		Perpustakaan Lemhannas RI	Biro Telematika

RAA Tingkat 1	RAA Tingkat 2	Kode	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Layanan	Inputan Data	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
				4. Laporan statistik daftar katalog, koleksi, sirkulasi, checkpoint (daftar kunjungan), anggota dan laporan umum periodik										
		LEMHANNAS-DAA.02.02.28	Portal Perpustakaan Lemhannas RI	Sebagai website resmi perpustakaan Lemhannas RI	Portal informasi perpustakaan					Web Based			Perpustakaan Lemhannas RI	Biro Perencanaan
		LEMHANNAS-DAA.02.02.29	Lemhannas RI	1. Mengarsipkan dan menilai tone berita secara otomatis 2. Otomatisasi pengelolaan media sosial dan memantau pertumbuhan kinerja akun dari waktu ke waktu 3. Penyediaan penyimpanan komputasi awan	1. Layanan Media Monitoring 2. Layanan Manajemen Media Sosial 3. Layanan Komputasi Awan Pemerintah	1. Informasi sentimen pemberitaan lembaga di media 2. Informasi kinerja akun-akun media sosial lembaga 3. Informasi berkas foto dan video hasil liputan	1. Mesin pencari Google 2. Platform-platform media sosial 3. Tim Peliputan Humas Lemhannas RI	1. Informasi sentimen pemberitaan lembaga di media 2. Informasi kinerja akun-akun media sosial lembaga 3. Informasi berkas foto dan video hasil liputan	Internal Lemhannas RI	Web Based				Biro Humas

RAA Tingkat 1	RAA Tingkat 2	Kode	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Layanan	Inputan Data	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
		LEMHANNAS- DAA.02.02.30	LMS KEDEP UTIAN PENDI DIKAN (Websit e maupu n Aplikasi Mobile Android dan Ios)	Manajemen Sistem Pembelajaran	Platform yang dapat memudahkan akses pembelajaran, menu dan fitur aplikasi mudah dicari dan digunakan oleh user/pengguna aplikasi (Peserta dan Organik Kedeputian Pendidikan) baik itu website maupun mobile, Menu dan fitur yang diharapkan dapat berfungsi seperti: 1. Kemudahan mengisi presensi yang akuntabel 2. Kemudahan mengisi dan pengajuan form data peserta, form ijin peserta, form evaluasi dan form kebutuhan lainnya, 3. Rekap ketidak hadiran secara aktual yang bisa dilihat oleh peserta dan dikelola oleh staf 4. Pengumuman untuk peserta pendidikan yang dapat diakses oleh peserta dan organik pendidikan dan dapat memberikan notifikasi melalui aplikasi mobile	Layanan pembelajaran peserta pendidikan	Unit Kerja di Lingkungan Kedeputian pendidikan	unit kerja di lingkungan kedeputian pendidikan	dashboard, data hasil rekapitulasi kehadiran, pengumuman, data kegiatan terkini pembelajaran	Peserta Pendidikan, Internal Kedeputian Pendidikan	Web Based		DIREKTORAT OPSDIK, BINTADIK	DIREKTORAT OPSDIK, BINTADIK

RAA Tingkat 1	RAA Tingkat 2	Kode	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Layanan	Inputan Data	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
					5. Kemudahan mengakses data atau informasi mengenai Tutor Pendamping, Tajar, Taji dan Taprof serta penceramah atau narasumber 6. Kemudahan mengunduh dan mengunggah materi, bahan pembelajaran serta kegiatan pembelajaran 7. Adanya kolom pengajuan keluhan sarpras dan pelayanan pendidikan 8. Mempunyai Fitur Penilaian Peserta yang mudah untuk digunakan dan diakses 9. Notifikasi Pemberitahuan kegiatan pembelajaran maupun kegiatan kedeputian									
		LEMHANNAS-DAA.02.02.31	LMS E-Taplai										DIREKTORAT SOSIALISASI DAN MEDIA PEMANTAPAN NILAI	DIREKTORAT SOSIALISASI DAN MEDIA PEMANTAPAN NILAI

RAA Tingkat 1	RAA Tingkat 2	Kode	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Layanan	Inputan Data	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
		LEMHANNAS-DAA.02.02.32	Siskurt annas berbasis AI										PUSAT LABORATORI UM	PUSAT LABORATORI UM
		LEMHANNAS-DAA.02.02.33	Sistem Assesment Center										PUSAT LABORATORI UM	PUSAT LABORATORI UM
		LEMHANNAS-DAA.02.02.34	National Talent Pool										PUSAT LABORATORI UM	PUSAT LABORATORI UM
		LEMHANNAS-DAA.02.02.35	Siskurp imnas										PUSAT LABORATORI UM	PUSAT LABORATORI UM
		LEMHANNAS-DAA.02.02.36	Layanan Sertifikasi Profesi Pengajar Ketahanan Nasional										PUSAT LABORATORI UM	PUSAT LABORATORI UM

E. Arsitektur Domain Infrastruktur

Arsitektur Infrastruktur SPBE memainkan peran vital dalam tata kelola teknologi informasi Lembaga Ketahanan Nasional RI. Selain menyelaraskan teknologi dengan model bisnis, arsitektur ini juga berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan risiko terkait penggunaan infrastruktur. Ketidakpatuhan terhadap standar dapat mengakibatkan berbagai masalah, mulai dari kesulitan berbagi data hingga keterbatasan dalam mengadopsi teknologi baru. Mengingat dinamika perkembangan teknologi yang pesat, arsitektur infrastruktur SPBE dirancang dengan fleksibilitas untuk mengakomodasi perubahan.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, integrasi menjadi prinsip kunci dalam pengembangan arsitektur infrastruktur SPBE. Pendekatan ini tidak hanya diterapkan pada level data dan aplikasi, tetapi juga mencakup infrastruktur jaringan secara keseluruhan. Tujuannya adalah menghapuskan fragmentasi infrastruktur antar unit kerja, sehingga tercipta pengelolaan jaringan yang lebih efisien dan konsisten. Melalui pendekatan terintegrasi ini, Lembaga Ketahanan Nasional RI dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat keamanan informasi, dan merespons lebih cepat terhadap kebutuhan pemangku kepentingan, sejalan dengan semangat transformasi digital.

Kerangka kerja dari arsitektur infrastruktur SPBE terdiri atas referensi arsitektur infrastruktur SPBE dan dokumentasi arsitektur infrastruktur SPBE.

1. Arsitektur Infrastruktur

Berikut ini dijelaskan mengenai katalog layanan dari seluruh Unit Kerja di Lemhannas RI. Dimana untuk Level 1 dan 2 mengacu pada kodifikasi referensi arsitektur infrastruktur SPBE nasional. Selanjutnya untuk level 3 mengacu pada infrastruktur yang ada di seluruh unit kerja. Berdasarkan pemetaan data infrastruktur di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI, berikut adalah informasi keselarasan layanan Lembaga Ketahanan Nasional

RI. Adapun rincian taksonomi referensi arsitektur infrastruktur SPBE Lembaga Ketahanan Nasional RI adalah pada gambar 3.12 berikut



Gambar 3.9 Taksonomi Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE Lembaga Ketahanan Nasional RI pada SIA

Tabel 3.8 Arsitektur Infrastruktur SPBE

RAI Tingkat 1	RAI Tingkat 2	RAI Tingkat 3	Unit Kerja	Satuan Kerja
RAI.01 Fasilitas Komputasi	RAI.01.01 Pusat Data	RAI.01.01.01 Pusat Data Nasional	Biro Telematika	Biro Telematika
		RAI.01.01.02 Pusat Data Instansi Pusat	Biro Telematika	Biro Telematika
		RAI.01.01.03 Pusat Data Instansi Daerah	Biro Telematika	Biro Telematika
		RAI.01.01.04 Pusat Data Non Pemerintah	Biro Telematika	Biro Telematika
		RAI.01.01.05 Pusat Data Pemulihan	Biro Telematika	Biro Telematika
	RAI.01.02 Pusat Kendali	RAI.01.02.01 Network Operation Center	Biro Telematika	Biro Telematika
		RAI.01.02.02 Data Operation Center	Biro Telematika	Biro Telematika
		RAI.01.02.03 Command/Operation Center	Biro Telematika	Biro Telematika
		RAI.01.02.04 Security Operation Center	Biro Telematika	Biro Telematika
		RAI.01.02.05 Emergency Operation Center	Biro Telematika	Biro Telematika
	RAI.01.03 Fasilitas Komputasi	RAI.01.03.01 Laboratorium Komputer	Biro Telematika	Biro Telematika
		RAI.01.03.02 Ruang Server Farm	Biro Telematika	Biro Telematika
		RAI.01.03.03 Workstation Farm	Biro Telematika	Biro Telematika
RAI.02 Sistem Integrasi	RAI.02.01 Jaringan Intra	RAI.02.01.01 Jaringan Intra Pemerintah	Biro Telematika	Biro Telematika
		RAI.02.01.02 Jaringan Intra Instansi Pusat	Biro Telematika	Biro Telematika

RAI Tingkat 1	RAI Tingkat 2	RAI Tingkat 3	Unit Kerja	Satuan Kerja
		RAI.02.01.03 Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Biro Telematika	Biro Telematika
		RAI.02.01.03 Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Biro Telematika	Biro Telematika
		RAI.02.01.03 Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Biro Telematika	Biro Telematika
		RAI.02.01.04 Jaringan Komersial/Umum	Biro Telematika	Biro Telematika
		RAI.02.02.01 Sistem Penghubung Pemerintah	Biro Telematika	Biro Telematika
	RAI.02.02 Sistem Penghubung	RAI.02.02.01 Sistem Penghubung Pemerintah	Biro Telematika	Biro Telematika
		RAI.02.02.02 Sistem Penghubung non Pemerintah	Biro Telematika	Biro Telematika
		RAI.02.02.02 Sistem Penghubung non Pemerintah	Biro Telematika	Biro Telematika
RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.01 Server	Biro Telematika	Biro Telematika
		RAI.03.01.02 Media Penyimpan (Data Storage)	Biro Telematika	Biro Telematika
		RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Biro Telematika	Biro Telematika
		RAI.03.01.04 Perangkat Keras Keamanan	Biro Telematika	Biro Telematika
		RAI.03.01.05 Peripheral	Biro Telematika	Biro Telematika
		RAI.03.01.06 Mobile Device	Biro Telematika	Biro Telematika
		RAI.03.01.07 Perangkat Lunak Platform	Biro Telematika	Biro Telematika

RAI Tingkat 1	RAI Tingkat 2	RAI Tingkat 3	Unit Kerja	Satuan Kerja
	RAI.03.02 Teknologi Awan	RAI.03.02.01 PaaS	Biro Telematika	Biro Telematika
		RAI.03.02.02 IaaS	Biro Telematika	Biro Telematika
		RAI.03.02.03 SaaS	Biro Telematika	Biro Telematika
		RAI.03.02.04 BaaS	Biro Telematika	Biro Telematika

Penjelasan pada setiap komponen dalam arsitektur infrastruktur SPBE tingkat 1 (pertama) dan tingkat 2 (kedua) sebagai berikut:

a. Fasilitas Komputasi (RAI 01)

Lapisan ini terdiri dari pusat data nasional (RAI 01.01), pusat komputasi (RAI 01.02), dan pusat kendali (RAI01.03) yang bersifat nasional. Fasilitas komputasi ini dapat berupa fasilitas komputasi milik Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah terintegrasi dengan fasilitas komputasi nasional.

b. Sistem Integrasi (RAI 02), lapisan ini terdiri dari:

1. Jaringan Intra Pemerintah (RAI 02.01) Lapisan jaringan intra merupakan lapisan penghubung untuk membentuk jaringan yang menghubungkan antar komponen dari lapisan di bawahnya dan membentuk layanan infrastruktur dari lapisan atasnya, serta memastikan keamanan informasi dalam komunikasi data antar sistem informasi; dan
2. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (RAI 02.02) Lapisan sistem penghubung merupakan lapisan logikal yang menghubungkan fisik dari lapisan di bawahnya menjadi hubungan logikal yang mendukung lapisan domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur layanan SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, serta domain arsitektur infrastruktur SPBE di atasnya.

c. Platform (RAI 03), lapisan ini terdiri dari:

1. Kerangka infrastruktur dan aplikasi (RAI 03.01)

Lapisan ini merupakan lapisan yang menentukan standar dari perangkat keras maupun lunak, model komunikasi dan standar platform lainnya yang dapat digunakan sebagai acuan desain pengembangan infrastruktur dari lapisan di bawahnya maupun di atasnya; dan

2. Komputasi Awan (RAI 03.02)

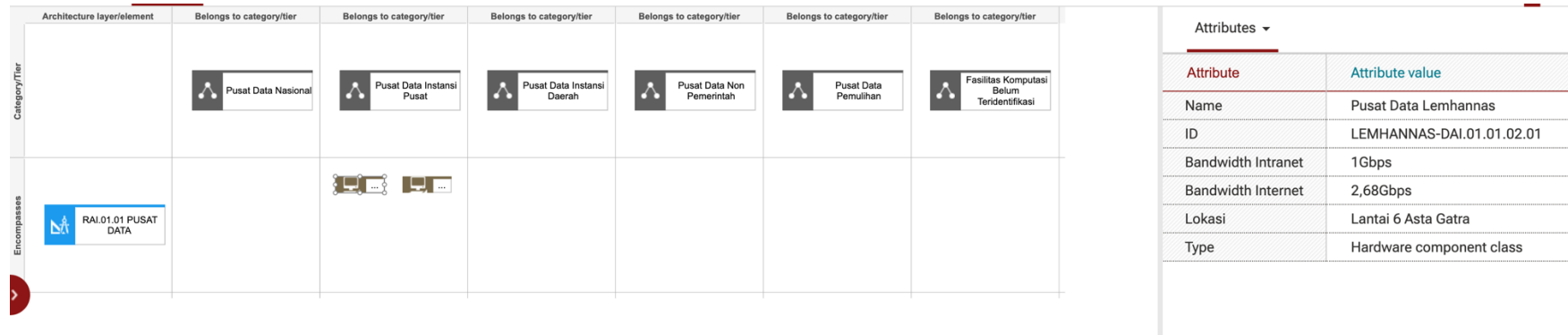
Merupakan lapisan yang menghubungkan lapisan arsitektur lainnya secara logikal dalam bentuk layanan infrastruktur SPBE berbagi pakai berupa sistem *Infrastructure as a Services* (IaaS), *Platform as a Services* (PaaS), dan *Software as a Services* (SaaS), dimana data dan informasi didalamnya, diolah menggunakan *Big Data as a Services* (BdaaS), serta didukung aspek keamanan untuk keseluruhan komputasi awan dengan *Security as a Services* (SecaaS).

2. Dokumentasi Arsitektur Infrastruktur

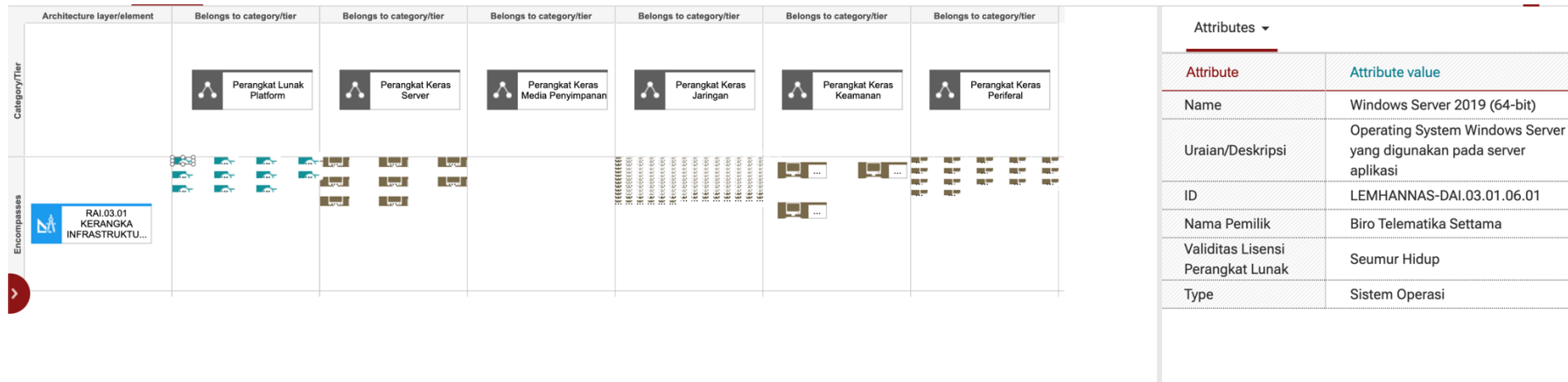
Domain infrastruktur SPBE akan memetakan semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya, yang digunakan untuk menghasilkan layanan.

Metadata Arsitektur Infrastruktur SPBE Lembaga Ketahanan Nasional RI dituangkan dalam 9 (sembilan) atribut metadata. Dengan Referensi Arsitektur Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan dapat di akses pada repositori arsitektur SPBE Nasional adapun rincian terkait metadata arsitektur infrastruktur SPBE Lembaga Ketahanan Nasional RI adalah pada gambar 3.10 dan 3.11 berikut.

Gambar 3.10 Dokumentasi Infrastruktur Pusat Data SPBE as is pada SIA



Gambar 3.11 Dokumentasi Arsitektur Infrastruktur Sistem Operasi as is pada SIA



3. Metadata Arsitektur Infrastruktur

Metadata Arsitektur Infrastruktur SPBE di Lembaga Ketahanan Nasional RI mencakup 8 atribut metadata yang secara rinci menggambarkan elemen-elemen penting yang mendukung operasional sistem dan aplikasi, serta komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya yang digunakan untuk menyediakan layanan.

Setiap tabel metadata infrastruktur SPBE memberikan informasi terperinci mengenai domain infrastruktur yang dikelola oleh unit kerja di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI. Informasi yang disajikan termasuk ID Metadata sebagai kode identifikasi unik, Nama, Deskripsi, Jenis Penggunaan, Status Kepemilikan, Nama Pemilik, Unit Pengelola dari setiap unit infrastruktur.

Rincian metadata arsitektur infrastruktur SPBE ini tercantum dalam tabel di bawah ini, yang menjadi acuan utama dalam pengelolaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi di Lembaga Ketahanan Nasional RI. Metadata ini disusun dengan mempertimbangkan standar Arsitektur SPBE Nasional, regulasi dari Peraturan Gubernur Lemhannas, serta peta proses bisnis organisasi, untuk memastikan konsistensi, integrasi, dan efisiensi dalam penerapan teknologi informasi yang mendukung tujuan dan layanan Lembaga Ketahanan Nasional RI.

Tabel 3.9 Metadata Arsitektur Infrastruktur SPBE - Fasilitas Komputasi

ID Metadata	Nama Fasilitas Komputasi	Bandwidth Intranet	Bandwidth Internet	Lokasi	Kepemilikan	Unit Kerja Penanggung Jawab	Klasifikasi Tier Fasilitas	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Instansi
LEMHANNA S-DAI.01.01.02.01	Pusat Data Lemhanas	1Gbps	2,68Gbps	Gd. Astagatra Lt. 6 Lemhanas RI	Sendiri	Biro Telematika	Non Tier	RAI.01 Fasilitas Komputasi	RAI.01.01 Pusat Data	RAI.01.01.02 Pusat Data Instansi Pusat	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
LEMHANNA S-DAI.01.01.02.02	Pusat Data Puslat	1Gbps	2,68Gbps	Gd. Astagatra Lt. 8 Lemhanas RI	Sendiri	Pusat Labrotarium	Non Tier	RAI.01 Fasilitas Komputasi	RAI.01.01 Pusat Data	RAI.01.01.02 Pusat Data Instansi Pusat	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Tabel 3.10 Metadata Arsitektur Infrastruktur SPBE – Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

ID Metadata	Nama Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Deskripsi Sistem Penghubung	Jenis Sistem Penghubung	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Aplikasi	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Instansi
LEMHANNAS-DAI.02.01.01.01	SPLP Aplikasi E-Peserta	Integrasi data API data peserta pendidikan	Sistem Penghubung Pemerintah	Sendiri	Biro Telematika	E-Peserta Lemhannas RI	RAI.02 Sistem Integrasi	RAI. 02.01. SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH	RAI.02.01.01. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
LEMHANNAS-DAI.02.01.01.02	API BPS	Untuk sinkronisasi dynamic data bps dan simulasi (masih dalam tahap pengembangan)	Sistem Penghubung Pemerintah	Sendiri	Pusat Labrotarium	BPS	RAI.02 Sistem Integrasi	RAI. 02.01. SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH	RAI.02.01.01. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
LEMHANNAS-DAI.02.01.01.03	Kemendikbud	siskurtannas (ada 7 aplikasi dilamnya salah satunya portal GIS)	Sistem Penghubung Pemerintah	Sendiri	Pusat Labrotarium	Sikurtannas	RAI.02 Sistem Integrasi	RAI. 02.01. SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH	RAI.02.01.01. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Tabel 3.11 Metadata Arsitektur Infrastruktur SPBE – Perangkat Keras Server

ID Metadata	Nama Server	Deskripsi Server	Nama Pemilik	Jenis Penggunaan Server	Status Kepemilikan	Unit Pengelola Server	Perangkat Lunak Platform	Kapasitas Memori	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Instansi
LEMHAN NAS-DAI.03.01.01.01	Nutanix NX-6035-G5	Nutanix NX-6035-G5 Sebagai server menggabungkan komputasi, penyimpanan, dan virtualisasi dalam satu platform terpadu.	Biro Telematika	Server Aplikasi	Sendiri	Biro Telematika	-	1.87 TB	High End	-	Non Raid	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.01 Server	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
LEMHAN NAS-DAI.03.01.01.02	Nutanix NX-6035-G5	Nutanix NX-6035-G5 Sebagai server menggabungkan komputasi, penyimpanan, dan virtualisasi dalam satu platform terpadu.	Biro Telematika	Server Aplikasi	Sendiri	Biro Telematika	-	1.87 TB	High End	-	Non Raid	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.01 Server	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

ID Metadata	Nama Server	Deskripsi Server	Nama Pemilik	Jenis Penggunaan Server	Status Kepemilikan	Unit Pengelola Server	Perangkat Lunak Platform	Kapasitas Memori	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Instansi
LEMHAN NAS-DAI.03.01.01.03	Nutanix NX-3060-G6	Nutanix NX-6035-G5 Sebagai server menggabungkan komputasi, penyimpanan, dan virtualisasi dalam satu platform terpadu.	Biro Telematika	Server Aplikasi	Sendiri	Biro Telematika	-	1.87 TB	High End	-	Non Raid	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.01 Server	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
LEMHAN NAS-DAI.03.01.01.04	Nutanix NX-8035-G5	Nutanix NX-6035-G5 Sebagai server menggabungkan komputasi, penyimpanan, dan virtualisasi dalam satu platform terpadu.	Biro Telematika	Server Aplikasi	Sendiri	Biro Telematika	-	1.87 TB	High End	-	Non Raid	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.01 Server	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

LEMHAN NAS- DAI.03.0 1.01.05	Dell power edge R750 xs	Server rack 2U yang menawar kan performa tinggi dengan prosesor Intel Xeon Scalable, fleksibilit as konfigura si, dan kapasitas penyimpa nan besar. Fitur unggulan nya mencaku p dukunga n untuk virtualisa si, komputas i cloud, dan keamana n canggih, menjadik annya solusi ideal untuk aplikasi bisnis	Biro Telema tika	Server Aplikas i	Sendiri	Biro Telema tika	-	32 GB	Mid End	-	Non Raid	RAI. 03 Platf orm	RAI.03. 01 Kerang ka Infrastr uktur dan Aplikasi	RAI.03. 01.01 Server	Lemb aga Ketah anan Nasio nal Repub lik Indon esia
---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------	------------------------	---------	------------------------	---	----------	------------	---	-------------	----------------------------	---	----------------------------	---

ID Metadata	Nama Server	Deskripsi Server	Nama Pemilik	Jenis Penggunaan Server	Status Kepemilikan	Unit Pengelola Server	Perangkat Lunak Platform	Kapasitas Memori	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Instansi
LEMHAN NAS-DAI.03.01.01.06	HPE Proliant DL380 Gen9	Server HP Enterprise seri DL380 Gen9 menggabungkan komputasi, penyimpanan, dan virtualisasi dalam satu platform terpadu.	Puslab Lemhanas RI	Server Aplikasi	Sendiri	Puslab Lemhanas RI	Windows Server 2019	128Gb	High End	1,5TB	NON RAID	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.01 Server	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
LEMHAN NAS-DAI.03.01.01.07	HPE Proliant DL380 Gen9	Server HP Enterprise seri DL380 Gen9 menggabungkan komputasi, penyimpanan, dan virtualisasi dalam satu platform terpadu.	Puslab Lemhanas RI	Server Aplikasi	Sendiri	Puslab Lemhanas RI	Windows Server 2019	64Gb	High End	1TB	NON RAID	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.01 Server	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

ID Metadata	Nama Server	Deskripsi Server	Nama Pemilik	Jenis Penggunaan Server	Status Kepemilikan	Unit Pengelola Server	Perangkat Lunak Platform	Kapasitas Memori	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Instansi
LEMHAN NAS-DAI.03.01.01.08	HPE Proliant DL380 Gen9	Server HP Enterprise seri DL380 Gen9 menggabungkan komputasi, penyimpanan, dan virtualisasi dalam satu platform terpadu.	Puslab Lemhannas RI	Server Aplikasi	Sendiri	Puslab Lemhannas RI	Windows Server 2019	64Gb	High End	1TB	NON RAID	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.01 Server	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Tabel 3.12 Metadata Arsitektur Infrastruktur SPBE – Perangkat Keras Jaringan

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.01	Cisco WS-C2960G-48TC-L	Switch WAN management	Multilayer Switch	Sendiri	Biro Telematika Settam a	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangk a Infrastr uktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangk at Keras Jaringa n	Pusat Data Lemha nnas	Lemba ga Ketah anan Nasion al Repub lik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.02	Cisco WS-C3850-24T	SWICTH CORE CISCO	Multilayer Switch	Sendiri	Biro Telematika Settam a	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangk a Infrastr uktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangk at Keras Jaringa n	Pusat Data Lemha nnas	Lemba ga Ketah anan Nasion al Repub lik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.03	Dell Networking N4032F	SWITCH DELL NUTANIK	Multilayer Switch	Sendiri	Biro Telematika Settam a	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangk a Infrastr uktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangk at Keras Jaringa n	Pusat Data Lemha nnas	Lemba ga Ketah anan Nasion al Repub lik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.04	Cisco ws-c3850-24s	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.05	Cisco ws-c3850-24s	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.06	HP PROCURVE 2810 28 G	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.07	HP PROCURVE 2810 28 G	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.08	HP PROCURVE 2810	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.09	HP PROCURVE 2810	SWITCH	Switch L3	BUMN	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.10	HP PROCURVE 2810	SWITCH	Switch L3	BUMN	Biro Telematika Settimana	Bag Jaringan Rotelematika Settimana	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.11	HP PROCURVE 2810	SWITCH	Switch L3	BUMN	Biro Telematika Settimana	Bag Jaringan Rotelematika Settimana	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.12	HP PROCURVE 2810	SWITCH	Switch L3	BUMN	Biro Telematika Settimana	Bag Jaringan Rotelematika Settimana	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.13	HP PROCURVE 2810	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.14	HP PROCURVE 2810	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.15	HP PROCURVE 2810	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.16	HP PROCURVE 2810	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.17	HP PROCURVE 2810	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.18	HP PROCURVE 2810	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.19	HP PROCURVE 2811	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.20	HP PROCURVE 2810	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.21	HP PROCURVE 2810	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.22	HP PROCURVE 2810	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.23	HP PROCURVE 2810	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.24	HP PROCURVE 2810	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.25	HP PROCURVE 2350	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.26	HP PROCURVE 2350	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.27	HP PROCURVE 2350	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.28	HP PROCURVE 2350	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.29	HP PROCURVE 2350	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.30	HP PROCURVE 2350	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.31	HP PROCURVE 2350	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.32	HP PROCURVE 2350	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.33	HP PROCURVE 2350	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.34	HP PROCURVE 2350	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.35	HP PROCURVE 2350	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.36	HP PROCURVE 2350	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.37	HP PROCURVE 2530 24G	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.38	HP V1910 24G	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.39	HP V1910 24G	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.40	HP V1910 24G	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.41	HP V1910 24G	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.42	HP V1910 24G	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.43	HP PROCURVE 2530 48 G PoE	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.44	HP PROCURVE 2530 48 G PoE	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.45	HP PROCURVE 2530 48 G PoE	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.46	HP PROCURVE 2530 48 G PoE	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.47	HP PROCURVE 2530 48 G PoE	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.48	HP PROCURVE 2530 48 G PoE	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.49	HP PROCURVE 2530 48 G PoE	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastr uktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangk at Keras Jaringa n	Pusat Data Lemha nnas	Lemba ga Ketah anan Nasion al Repub lik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.50	HP PROCURVE 2530 48 G PoE	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastr uktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangk at Keras Jaringa n	Pusat Data Lemha nnas	Lemba ga Ketah anan Nasion al Repub lik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.51	HP PROCURVE 2530 48 G PoE	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastr uktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangk at Keras Jaringa n	Pusat Data Lemha nnas	Lemba ga Ketah anan Nasion al Repub lik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.52	HP PROCURVE 2530 48 G PoE	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.53	HP PROCURVE 2530 48 G PoE	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.54	HP PROCURVE 2530 48 G PoE	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.55	HP PROCURVE 2530 48 G PoE	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.56	HP PROCURVE 2530 48 G PoE	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.57	HP PROCURVE 2530 48 G PoE	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.58	HP PROCURVE 2530 48 G PoE	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastr uktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangk at Keras Jaringa n	Pusat Data Lemha nnas	Lemba ga Ketah anan Nasion al Repub lik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.59	HP PROCURVE 2530 48 G PoE	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastr uktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangk at Keras Jaringa n	Pusat Data Lemha nnas	Lemba ga Ketah anan Nasion al Repub lik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.60	HP PROCURVE 2530 48 G PoE	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastr uktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangk at Keras Jaringa n	Pusat Data Lemha nnas	Lemba ga Ketah anan Nasion al Repub lik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.61	HP PROCURVE 2530 48 G PoE	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.62	HP PROCURVE 2530 48 G PoE	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.63	HP PROCURVE 2530 48 G PoE	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.64	HP PROCURVE 2530 48 G PoE	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.65	HP PROCURVE 2530 48 G PoE	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.66	HP PROCURVE 2530 48 G PoE	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.67	HP PROCURVE 2530 48 G PoE	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastr uktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangk at Keras Jaringa n	Pusat Data Lemha nnas	Lemba ga Ketah anan Nasion al Repub lik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.68	HP PROCURVE 2530 48 G PoE	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastr uktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangk at Keras Jaringa n	Pusat Data Lemha nnas	Lemba ga Ketah anan Nasion al Repub lik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.69	HP PROCURVE 2530 48 G PoE	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastr uktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangk at Keras Jaringa n	Pusat Data Lemha nnas	Lemba ga Ketah anan Nasion al Repub lik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.70	HP PROCURVE 2530 48 G PoE	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.71	HP PROCURVE 2530 48 G PoE	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.72	D-LINK DGS-1210-52	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.73	CISCO WS-C2960+24PC-S	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.74	HP PROCURVE 2530 48 G PoE	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.75	HP PROCURVE 2530 48 G PoE	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.76	HP PROCURVE 2530 48 G PoE	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.77	HP PROCURVE 2530 48 G PoE	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.78	HP 1810-8G	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.79	HP PROCURVE 2530 24G	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.80	HP PROCURVE 2530 24G	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.81	HPE OfficeConnect Switch 1820 48G J9981A	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.82	HP 2530-48G-PoEP Switch (J9772A)	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.83	HP PROCURVE 2530 48 G PoE	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.84	PLANET WGSW-48040HP	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.85	PLANET WGSW-48040HP	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.86	HP 2530-48G-PoEP Switch (J9772A)	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.87	1820 48G J9981A	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.88	1820 48G J9981A	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.89	HP J9776A 2530-24G	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.90	HPE OfficeConnect Switch 1820 48G J9981A	SWITCH	Switch L3	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.91	UniFi UAP-AC-EDU	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indonesia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.92	UniFi UAP-AC-EDU	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indonesia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.93	UniFi UAP-Pro	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indonesia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.94	UniFi UAP-Pro	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settimana	Bag Jaringan Rotelematika Settimana	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indonesia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.95	UniFi UAP-Pro	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settimana	Bag Jaringan Rotelematika Settimana	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indonesia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.96	UniFi UAP-Pro	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settimana	Bag Jaringan Rotelematika Settimana	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indonesia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.97	UniFi UAP-Pro	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.98	UniFi UAP-Pro	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.99	UniFi UAP-AC-EDU	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.100	UniFi UAP-AC-EDU	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indonesia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.101	UniFi UAP-AC-EDU	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indonesia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.102	UniFi UAP-AC-EDU	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indonesia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.103	UniFi UAP-AC-HD	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settimana	Bag Jaringan Rotelematika Settimana	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indonesia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.104	UniFi UAP-AC-HD	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settimana	Bag Jaringan Rotelematika Settimana	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indonesia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.105	UniFi UAP-AC-HD	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settimana	Bag Jaringan Rotelematika Settimana	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indonesia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.106	UniFi UAP-AC-HD	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.107	UniFi UAP-AC-HD	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.108	UniFi UAP-AC-HD	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.109	UniFi UAP-AC-HD	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indonesia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.110	UniFi UAP-AC-HD	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indonesia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.111	UniFi UAP-AC-HD	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indonesia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.112	UniFi UAP-AC-HD	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.113	UniFi UAP-AC-HD	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.114	UniFi UAP-AC-HD	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.115	UniFi UAP-AC-HD	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.116	UniFi UAP-AC-HD	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.117	UniFi UAP-AC-HD	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.118	UniFi UAP-AC-HD	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.119	UniFi UAP-AC-HD	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.120	UniFi UAP-AC-HD	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.121	UniFi UAP-AC-HD	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settimana	Bag Jaringan Rotelematika Settimana	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indonesia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.122	UniFi UAP-AC-HD	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settimana	Bag Jaringan Rotelematika Settimana	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indonesia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.123	UniFi UAP-AC-HD	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settimana	Bag Jaringan Rotelematika Settimana	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indonesia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.124	UniFi UAP-AC-HD	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settimana	Bag Jaringan Rotelematika Settimana	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indonesia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.125	UniFi UAP-AC-HD	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settimana	Bag Jaringan Rotelematika Settimana	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indonesia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.126	UniFi UAP-AC-HD	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settimana	Bag Jaringan Rotelematika Settimana	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indonesia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.127	UniFi UAP-AC-HD	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.128	UniFi UAP-AC-HD	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.129	UniFi UAP-AC-HD	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.130	UniFi UAP-AC-HD	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.131	UniFi UAP-AC-HD	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.132	UniFi UAP-AC-HD	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.133	UniFi UAP-AC-HD	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indonesia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.134	UniFi UAP-AC-HD	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indonesia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.135	UniFi UAP-AC-HD	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indonesia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.136	UniFi UAP-AC-HD	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.137	UniFi UAP-AC-HD	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.138	UniFi UAP-AC-HD	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.139	UniFi UAP-AC-HD	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.140	UniFi UAP-AC-HD	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.141	UniFi UAP-AC-HD	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.142	UniFi UAP-AC-EDU	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indonesia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.143	UniFi UAP-AC-Pro	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indonesia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.144	UniFi UAP-AC-HD	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indonesia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.145	UniFi UAP-AC-HD	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.146	UniFi UAP-AC-HD	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.147	UniFi UAP-AC-EDU	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.148	UniFi UAP-AP-AC-PRO	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.149	UniFi UAP-AP-AC-PRO	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.150	UniFi UAP-AP-AC-PRO	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.151	UniFi UAP-AP-AC-PRO	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settimana	Bag Jaringan Rotelematika Settimana	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indonesia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.152	UniFi UAP-AP-AC-PRO	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settimana	Bag Jaringan Rotelematika Settimana	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indonesia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.153	UniFi UAP-AP-AC-PRO	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settimana	Bag Jaringan Rotelematika Settimana	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indonesia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.154	UniFi UAP-AP-AC-PRO	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.155	UniFi UAP-AP-AC-PRO	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.156	UniFi UAP-AP-AC-PRO	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANNAS-DAI.03.01.03.157	UniFi UAP-AP-AC-PRO	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANNAS-DAI.03.01.03.158	UniFi UAP-AP-AC-PRO	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANNAS-DAI.03.01.03.159	UniFi UAP-AP-AC-PRO	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.160	UniFi UAP-AP-AC-PRO	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.161	UniFi UAP-AP-AC-PRO	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.162	UniFi UAP-AP-AC-PRO	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.163	UniFi UAP-AP-AC-PRO	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.164	UniFi UAP-AP-AC-LR	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.165	UniFi UAP-AP-AC-LR	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settama	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.166	UniFi UAP-AP-AC-LR	Access Point Wifi RUANG KERJA	Wireless Equipment	Sendiri	Biro Telematika Settimana	Bag Jaringan Rotelematika Settma	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Lemhannas	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.167	Cisco 4300 series	Router	Router	Sendiri	Puslab Lemhannas RI	Puslab Lemhannas RI	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Puslat	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.168	Cisco Catalyst 3750 Series	Switch Manajemen Jaringan	Switch L3	Sendiri	Puslab Lemhannas RI	Puslab Lemhannas RI	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Puslat	Lemba ga Ketahan Nasional Republik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.169	Access Point Cisco Aironet 1242 AG	Access Point Wifi Ruang Puslat	Wireless Equipment	Sendiri	Puslab Lemhannas RI	Puslab Lemhannas RI	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastr uktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Puslat	Lemba ga Ketahan anan Nasion al Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.170	Access Point Cisco Aironet 1242 AG	Access Point Wifi Ruang Puslat	Wireless Equipment	Sendiri	Puslab Lemhannas RI	Puslab Lemhannas RI	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastr uktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Puslat	Lemba ga Ketahan anan Nasion al Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.171	Access Point Cisco Aironet 1242 AG	Access Point Wifi Ruang Puslat	Wireless Equipment	Sendiri	Puslab Lemhannas RI	Puslab Lemhannas RI	RAI.03 Platf orm	RAI.03.01 Kerangka Infrastr uktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Puslat	Lemba ga Ketahan anan Nasion al Republik Indone sia

ID Metadata	Nama Network/Communication Device	Deskripsi Network/Communication Device	Tipe Network/Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komputasi	Instansi
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.172	Access Point Cisco Aironet 1242 AG	Access Point Wifi Ruang Puslat	Wireless Equipment	Sendiri	Puslab Lemhannas RI	Puslab Lemhannas RI	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Puslat	Lemba ga Ketahan anan Nasion al Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.173	Hub TP-Link 24 port	Switch Hub	Switch L3	Sendiri	Puslab Lemhannas RI	Puslab Lemhannas RI	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Puslat	Lemba ga Ketahan anan Nasion al Republik Indone sia
LEMHANN AS-DAI.03.01.03.174	Hub D-link 4 port	Switch Hub	Switch L3	Sendiri	Puslab Lemhannas RI	Puslab Lemhannas RI	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pusat Data Puslat	Lemba ga Ketahan anan Nasion al Republik Indone sia

Tabel 3.13 Metadata Arsitektur Infrastruktur SPBE – Perangkat Keras Keamanan

Level 4 ID Metadata	Nama Perangk at Keaman an	Deskripsi Security Device	Tipe Securi ty Device	Status Kepemilik an	Nama Pemilik	Unit Pengelola Security Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Fasilitas Komput asi	Perangk at Lunak Platfor m	Instansi
LEMHANNAS - DAI.03.01.04 .01	Palo Alto	Perangka t Jaringan yang digunaka n untuk FIREWAL L Lemhann as RI	Firewa ll	Sendiri	Biro Telematik a Settama	Bag Jaringan Rotelemati ka Settma	RAI.03 Platfor m	RAI.03.01 Kerangka Infrastrukt ur dan Aplikasi	RAI.03.01. 04 Perangkat Keras Keamanan	Pusat Data	PAN-OS	Lembaga Ketahan an Nasional Republik Indonesi a
LEMHANNAS - DAI.03.01.04 .02	Fortigate 310 B	Perangka t Jaringan yang digunaka n untuk Firewall utama pada Puslab	Firewa ll	Sendiri	Puslab Lemhann as RI	Puslab Lemhanna s RI	RAI.03 Platfor m	RAI.03.01 Kerangka Infrastrukt ur dan Aplikasi	RAI.03.01. 04 Perangkat Keras Keamanan	Pusat Data Puslat	Forti- OS	Lembaga Ketahan an Nasional Republik Indonesi a
LEMHANNAS - DAI.03.01.04 .03	Fortigate 90D	Perangka t Jaringan yang digunaka n untuk Firewall VPN pada Puslab	Firewa ll	Sendiri	Puslab Lemhann as RI	Puslab Lemhanna s RI	RAI.03 Platfor m	RAI.03.01 Kerangka Infrastrukt ur dan Aplikasi	RAI.03.01. 04 Perangkat Keras Keamanan	Pusat Data Puslat	Forti- OS	Lembaga Ketahan an Nasional Republik Indonesi a

Tabel 3.14 Metadata Arsitektur Infrastruktur SPBE – Perangkat Keras Periferal

ID Metadata	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Lokasi Penempatan Periferal	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Instansi
LEMHANNAS-DAI.03.01.05.01	AC SPLIT	Pendingin udara untuk ruang data center	Output	Pusat Data GSP Lantai 6	Biro Telematika Settama	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.05 Peripheral	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
LEMHANNAS-DAI.03.01.05.02	FENWAL FIRE SUPPRESSION SYSTEM	Perangkat Pendeteksi asap dan api yang dapat beroperasi secara otomatis	Input	Pusat Data GSP Lantai 6	Biro Telematika Settama	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.05 Peripheral	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
LEMHANNAS-DAI.03.01.05.03	Rak Server/Switch Wallmount	Rak Switch Backbone	Input	Pusat Data GSP Lantai 6	Biro Telematika Settama	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.05 Peripheral	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
LEMHANNAS-DAI.03.01.05.04	Rak Server/Switch Wallmount	Rak Switch Backbone	Input	Pusat Data GSP Lantai 6	Biro Telematika Settama	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.05 Peripheral	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

ID Metadata	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Lokasi Penempatan Periferal	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Instansi
LEMHANNAS-DAI.03.01.05.05	Rak Server/Switch Wallmount	Rak Switch Backbone	Input	Pusat Data GSP Lantai 6	Biro Telematika Settama	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.05 Peripheral	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
LEMHANNAS-DAI.03.01.05.06	Rak Server/Switch Wallmount	Rak Switch Backbone	Input	Pusat Data GSP Lantai 6	Biro Telematika Settama	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.05 Peripheral	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
LEMHANNAS-DAI.03.01.05.07	Rak Server/Switch Wallmount	Rak Switch Backbone	Input	Pusat Data GSP Lantai 6	Biro Telematika Settama	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.05 Peripheral	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
LEMHANNAS-DAI.03.01.05.08	Rak Server/Switch Wallmount	Rak Switch Backbone	Input	Pusat Data GSP Lantai 6	Biro Telematika Settama	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.05 Peripheral	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
LEMHANNAS-DAI.03.01.05.09	Rak Server/Switch Wallmount	Rak Switch Backbone	Input	Pusat Data GSP Lantai 6	Biro Telematika Settama	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.05 Peripheral	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

ID Metadata	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Lokasi Penempatan Periferal	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Instansi
LEMHANNAS-DAI.03.01.05.10	Rak Server/Switch Wallmount	Rak Switch Backbone	Input	Pusat Data GSP Lantai 6	Biro Telematika Settama	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.05 Peripheral	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
LEMHANNAS-DAI.03.01.05.11	Rak Server/Switch Wallmount	Rak Switch Backbone	Input	Pusat Data GSP Lantai 6	Biro Telematika Settama	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.05 Peripheral	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
LEMHANNAS-DAI.03.01.05.12	Rak Server/Switch Wallmount	Rak Switch Backbone	Input	Pusat Data GSP Lantai 6	Biro Telematika Settama	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.05 Peripheral	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
LEMHANNAS-DAI.03.01.05.13	AC Presisi Citec GD 30A	AC Presisi	Output	Pusat Data Gd. Astagatra Lt.8	Puslab Lemhannas RI	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.05 Peripheral	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
LEMHANNAS-DAI.03.01.05.14	AC Presisi Citec GD 15A	AC Presisi	Output	Pusat Data Gd. Astagatra Lt.8	Puslab Lemhannas RI	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.05 Peripheral	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

ID Metadata	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Lokasi Penempatan Periferal	Unit Pengelola Network/Communication Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Instansi
LEMHANNAS-DAI.03.01.05.15	UPS Emerson Liebert NX 30kVA	UPS	Input/Output	Pusat Data Gd. Astagatra Lt.8	Puslab Lemhannas RI	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.05 Peripheral	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
LEMHANNAS-DAI.03.01.05.16	UPS Emerson Liebert NX 30kVA	UPS	Input/Output	Pusat Data Gd. Astagatra Lt.8	Puslab Lemhannas RI	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.05 Peripheral	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
LEMHANNAS-DAI.03.01.05.17	Fenwall Fire Alarm System FM2000	Fire Alarm System	Input/Output	Pusat Data Gd. Astagatra Lt.8	Puslab Lemhannas RI	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.05 Peripheral	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Tabel 3.15 Metadata Arsitektur Infrastruktur SPBE – Perangkat Lunak Platform

ID Metadata	Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis Sistem Operasi	Jenis Sistem Database	Jenis Lisensi	Nama Pemilik Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Instansi
LEMHANNAS - DAI.03.01.06.01	Windows Server 2019 (64-bit)	Operating System Windows Server yang digunakan pada server aplikasi	Sistem Operasi	Windows	-	Seumur Hidup	Biro Telematika Settama	Microsoft	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI-03.01.06 Perangkat Lunak Platform	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
LEMHANNAS - DAI.03.01.06.02	Windows Server 2016 (64-bit)	Operating System Windows Server yang digunakan pada server aplikasi	Sistem Operasi	Windows	-	Seumur Hidup	Biro Telematika Settama	Microsoft	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI-03.01.06 Perangkat Lunak Platform	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
LEMHANNAS - DAI.03.01.06.03	MariaBD	Database yang digunakan pada beberapa aplikasi kementerian	Sistem Database	UNIX	Database Management System	Kode Sumber Terbuka	Biro Telematika Settama	-	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI-03.01.06 Perangkat Lunak Platform	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

ID Metadata	Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis Sistem Operasi	Jenis Sistem Database	Jenis Lisensi	Nama Pemilik Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Instansi
LEMHANNAS - DAI.03.01.06.04	PostgreSQL	Database yang digunakan pada aplikasi LPSE kemenparekraf	Sistem Database	UNIX	Database Management System	Kode Sumber Terbuka	Biro Telematika Settama	-	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI-03.01.06 Perangkat Lunak Platform	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
LEMHANNAS - DAI.03.01.06.05	MySQL	Database yang digunakan pada beberapa aplikasi kemenparekraf	Sistem Database	UNIX	Database Management System	Kode Sumber Terbuka	Biro Telematika Settama	-	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI-03.01.06 Perangkat Lunak Platform	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
LEMHANNAS - DAI.03.01.06.06	FortiOS	Operating System Firewall	Sistem Database	Networking OS	-	Periodik	Puslab Lemhannas RI	-	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI-03.01.06 Perangkat Lunak Platform	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

ID Metadata	Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis Sistem Operasi	Jenis Sistem Database	Jenis Lisensi	Nama Pemilik Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Instansi
LEMHANNAS - DAI.03.01.06.07	CentOS 6 (64-bit)	Operating System Opensource Linux Server yang digunakan pada server aplikasi	Sistem Operasi	UNIX	-	Kode Sumber Terbuka	Biro Telematika Settama	-	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI-03.01.06 Perangkat Lunak Platform	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
LEMHANNAS - DAI.03.01.06.08	CentOS 7.3	Operating System Opensource Linux Server yang digunakan pada server aplikasi	Sistem Operasi	UNIX	-	Kode Sumber Terbuka	Biro Telematika Settama	-	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI-03.01.06 Perangkat Lunak Platform	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
LEMHANNAS - DAI.03.01.06.09	Ubuntu Linux 22.04 (64-bit)	Operating System Opensource Linux Server yang digunakan pada server aplikasi	Sistem Operasi	UNIX	-	Kode Sumber Terbuka	Biro Telematika Settama	-	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI-03.01.06 Perangkat Lunak Platform	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

ID Metadata	Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis Sistem Operasi	Jenis Sistem Database	Jenis Lisensi	Nama Pemilik Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Instansi
LEMHANNAS - DAI.03.01.06.10	Nutanix	Hypervisor Nutanix	Sistem Utilitas	UNIX	-	Seumur Hidup	Biro Telematika Settama	Licensi Support per tahun	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI-03.01.06 Perangkat Lunak Platform	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
LEMHANNAS - DAI.03.01.06.11	PAN OS	Operating System Firewall Managemen t	Sistem Utilitas	Networking OS	-	Periodik	Biro Telematika Settama	-	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI-03.01.06 Perangkat Lunak Platform	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

F. Arsitektur Domain Keamanan

Arsitektur keamanan SPBE memiliki tiga domain keamanan yang meliputi Standar Keamanan, Penerapan Keamanan, dan Kelaikan Keamanan. Standar Keamanan merujuk pada aturan dan pedoman yang harus dipatuhi dalam menjaga keamanan data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE. Standar Keamanan meliputi berbagai macam aspek keamanan, seperti klasifikasi keamanan, pembatasan akses, pengendalian keamanan, dan mekanisme verifikasi dan validasi. Penerapan Keamanan merujuk pada implementasi standar keamanan dalam SPBE. Penerapan keamanan mencakup pengendalian teknis dan non-teknis untuk memastikan bahwa standar keamanan terpenuhi. Hal ini meliputi penggunaan perangkat lunak keamanan, sistem deteksi intrusi, dan protokol keamanan jaringan, serta pelaksanaan kebijakan keamanan dan pelatihan keamanan. Kelaikan Keamanan merujuk pada evaluasi dan pengujian untuk memastikan bahwa sistem SPBE memenuhi standar keamanan dan dapat dioperasikan secara aman. Kelaikan Keamanan juga meliputi pengujian rentang, penetrasi, dan ketahanan serangan, serta pelaporan hasil pengujian dan evaluasi keamanan.

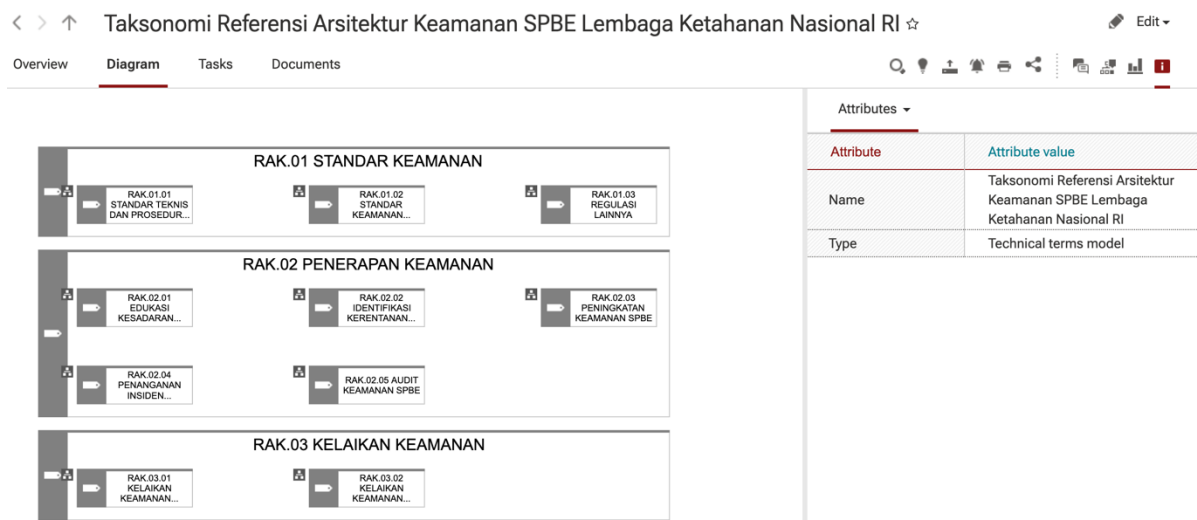
Dengan adanya arsitektur keamanan SPBE yang terintegrasi dan komprehensif, diharapkan keamanan data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE dapat dijaga dengan baik dan terhindar dari ancaman keamanan yang berpotensi merugikan.

1. Arsitektur Keamanan

Berikut ini adalah katalog arsitektur kemananan di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI, dimana untuk Level 1 dan 2 mengacu pada kodifikasi referensi arsitektur layanan SPBE nasional. Sedangkan level selanjutnya merupakan arsitektur keamanan di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI. Kelaikan Keamanan merujuk pada evaluasi dan pengujian untuk memastikan bahwa sistem SPBE memenuhi standar keamanan dan dapat dioperasikan secara aman. Kelaikan Keamanan juga meliputi pengujian rentang, penetrasi, dan ketahanan serangan, serta pelaporan hasil pengujian dan evaluasi keamanan. Adapun rincian taksonomi referensi

arsitektur keamanan SPBE Lembaga Ketahanan Nasional RI pada gambar 3.12 berikut

Gambar 3.12 Taksonomi Referensi Arsitektur Keamanan SPBE Lembaga Ketahanan Nasional RI pada SIA



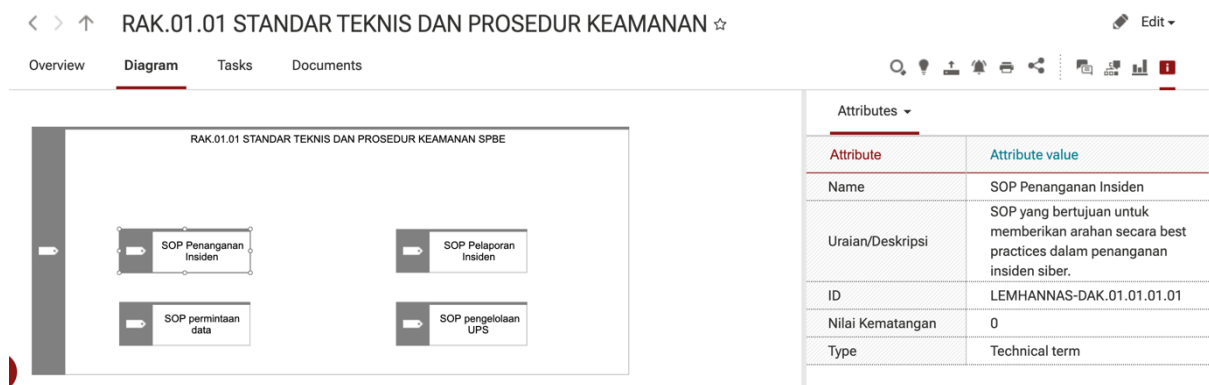
Tabel 3.16 Arsitektur Keamanan SPBE

RAK Level 1	RAK Level 2	RAK Level 3	RAK Level 4 Kode	Nama	Jenis Arsitektur Keamanan SPBE
RAK 01. STANDAR KEAMANAN	RAK. 01.01. STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR KEAMANAN SPBE	RAK.01.01.01. Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Aplikasi	RAK.01.01.01.01	SOP Penanganan Insiden	Standar Nasional dan/atau Peraturan Terkait Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE
		RAK.01.01.02. Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Data dan Informasi	RAK.01.01.02.01	SOP permintaan data	Standar Nasional dan/atau Peraturan Terkait Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE
		RAK.01.01.05. Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Pusat Data	RAK.01.01.05.01	SOP pengelolaan UPS	Standar Nasional dan/atau Peraturan Terkait Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE
		RAK.01.01.06. Standar Teknis dan Prosedur Manajemen Keamanan	RAK.01.01.06.01	SOP Pelaporan Insiden	Standar Nasional dan/atau Peraturan Terkait Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE
RAK 02. PENERAPAN KEAMANAN	RAK 02.01. Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	RAK 02.01.01 Edukasi Kesadaran Keamanan Aplikasi	RAK.02.01.01.01	Pelatihan Linux Networking and Security	Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE
		RAK 02.01.01 Edukasi Kesadaran Keamanan Aplikasi	RAK.02.01.01.02	Sertifikasi Ec-Council Certified Incident Handler for Ministri and Province CSIRT Registered in BSSN	Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE
RAK 02. PENERAPAN KEAMANAN	RAK 02.04. Penanganan Insiden Keamanan SPBE	RAK 02.04.01. Penanganan Insiden Keamanan	RAK.02.04.01.01	PENANGANAN INSIDEN WEB DEFACEMENT PADA WEBSITE JDIH DAN EVAL LEMHANNAS RI	Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE

2. Dokumentasi Arsitektur Keamanan

Arsitektur standar keamanan berupa Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE dapat dilihat pada gambar 3.12 sebagai berikut.

Gambar 3.12 Dokumentasi Arsitektur Keamanan SPBE Lembaga Ketahanan Nasional RI pada SIA



3. Metadata Arsitektur Keamanan

Metadata arsitektur keamanan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Lembaga Ketahanan Nasional RI merupakan komponen penting yang mencakup informasi mengenai kebijakan keamanan, hak akses, tingkat keamanan, dan kontrol yang diterapkan. Elemen memfasilitasi identifikasi dan pengelolaan risiko keamanan, implementasi tindakan keamanan yang tepat, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Lebih jauh, metadata ini mendukung proses audit keamanan, pelacakan aktivitas pengguna, dan penguatan perlindungan terhadap ancaman siber. Dalam konteks manajemen risiko yang lebih luas, metadata arsitektur keamanan juga berperan krusial dalam mendukung proses pemulihan bencana dan sistem, memungkinkan Lemhannas RI untuk mengidentifikasi kerentanan, merencanakan langkah pemulihan yang efektif, dan memfasilitasi pemulihan data yang akurat. Metadadata arsitektur keamanan disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.17 Metadata Standar Keamanan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan SPBE

ID Metadata	Nama	Jenis Standar Keamanan	Deskripsi	Tanggal Mulai Penerapan	Tanggal Akhir Penerapan	Instansi
LEMHANNAS-DAK.01.01.01.01	SOP Penanganan Insiden	Standar Nasional dan/atau Peraturan Terkait Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	SOP yang bertujuan untuk memberikan arahan secara best practices dalam penanganan insiden siber.	10 Oktober 2023	Sekarang	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
LEMHANNAS-DAK.01.01.02.01	SOP permintaan data	Standar Nasional dan/atau Peraturan Terkait Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	SOP terkait permintaan data informasi hasil pengukuran (berupa indeks)	5 Januari 2017	Sekarang	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
LEMHANNAS-DAK.01.01.05.01	SOP pengelolaan UPS	Standar Nasional dan/atau Peraturan Terkait Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	SOP untuk mengelola penggunaan UPS	-	Sekarang	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

ID Metadata	Nama	Jenis Standar Keamanan	Deskripsi	Tanggal Mulai Penerapan	Tanggal Akhir Penerapan	Instansi
LEMHANNAS-DAK.01.01.06.01	SOP Pelaporan Insiden	Standar Nasional dan/atau Peraturan Terkait Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	Prosedur ini bertujuan untuk menetapkan langkah-langkah yang harus diambil dalam melaporkan dan menangani insiden siber di lingkungan Lemhannas RI.	10 Oktober 2023	Sekarang	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Tabel 3.18 Metadata Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE

ID Metadata	Nama Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Instansi
LEMHANNAS-DAK.02.01.01.01	Pelatihan Linux Networking and Security	Pelatihan Linux Networking and Security dari BSSN untuk Instansi Pemerintahan	08/08/2022 - 12/08/2022	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
LEMHANNAS-DAK.02.01.01.02	Sertifikasi Ec-Council Certified Incident Handler for Ministri and Province CSIRT Registered in BSSN	pembekalan Sertifikasi ECIH oleh BSSN	15/08/2022 - 18/08/2022	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Tabel 3.19 Metadata Penanganan Insiden Keamanan SPBE

ID Metadata	Nama Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Instansi
LEMHANNAS-DAK.02.04.01.01	PENANGANAN INSIDEN WEB DEFACEMENT PADA WEBSITE JDIH DAN EVAL LEMHANNAS RI	Pihak Biro Telematika telah berhasil mengembalikan fungsi website jdih.lemhannas.go.id dan eval.lemhannas.go.id ke keadaan semula setelah insiden defacement, sambil terus melakukan proses digital forensic untuk menganalisis pola penyerangan, mengumpulkan bukti serangan, dan mencari tahu celah keamanan yang dimanfaatkan oleh pelaku. Selain itu, tim juga mengidentifikasi bahwa pelaku menggunakan eksploitasi kerentanan pada komponen pkexec yang dikenal sebagai “PwnKit” untuk mendapatkan hak akses root pada sistem. Tindakan pencegahan dan perbaikan keamanan harus segera dilakukan. Meskipun serangan saat ini hanya berupa defacement yang sifatnya dapat dipulihkan, potensi ancaman di masa depan, seperti ransomware, dapat mengakibatkan dampak yang jauh lebih serius terhadap operasional Lemhannas RI secara keseluruhan.	16 JUNI 2023	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

BAB IV

KONDISI MASA MENDATANG (*To Be*)

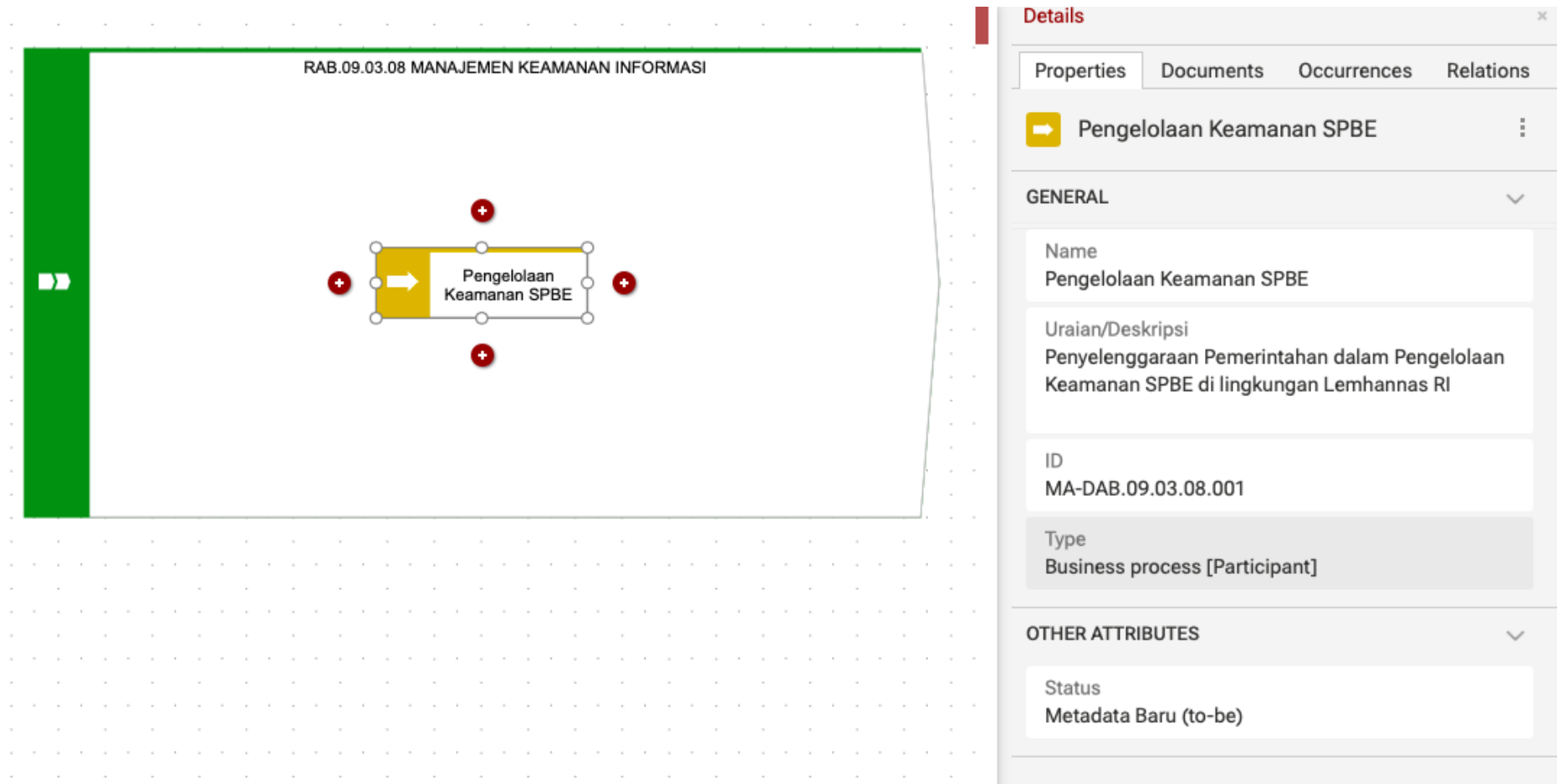
4.1 Arsitektur Proses Bisnis (*To Be*)

Proses bisnis masa mendatang adalah serangkaian aktivitas yang akan semakin dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, terutama dalam hal otomatisasi dan digitalisasi. Otomatisasi akan mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan produktivitas, memungkinkan sumber daya manusia untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis dan kreatif. Selain efisiensi operasional, kolaborasi dan komunikasi dalam proses bisnis juga akan mengalami transformasi signifikan. Proses bisnis masa mendatang khususnya dalam hal penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tidak hanya akan lebih efisien dan inovatif, tetapi juga lebih aman dan dapat diandalkan.

Desain arsitektur proses bisnis SPBE harus memperhatikan beberapa aspek penting. Pertama, sistem harus memastikan integrasi yang mulus antara berbagai unit dan satuan kerja dalam ekosistem digital, memungkinkan pertukaran data yang aman dan efisien. Hal ini menuntut standarisasi protokol dan format data yang digunakan, serta interoperabilitas sistem yang tinggi. Kedua, sistem perlu dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna akhir yang mencakup antarmuka pengguna yang intuitif, aksesibilitas, dan dukungan teknis yang memadai. Ketiga, arsitektur proses bisnis harus inklusif dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan mereka yang tinggal di daerah terpencil.

Pemetaan Arsitektur Proses Bisnis masa mendatang didokumentasikan dalam Sistem Informasi Arsitektur Nasional. Adapun proses bisnis *to be* pada salah satu unit kerja di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI dapat dilihat pada gambar 4.1.

Gambar 4.1 Arsitektur Proses Bisnis To Be



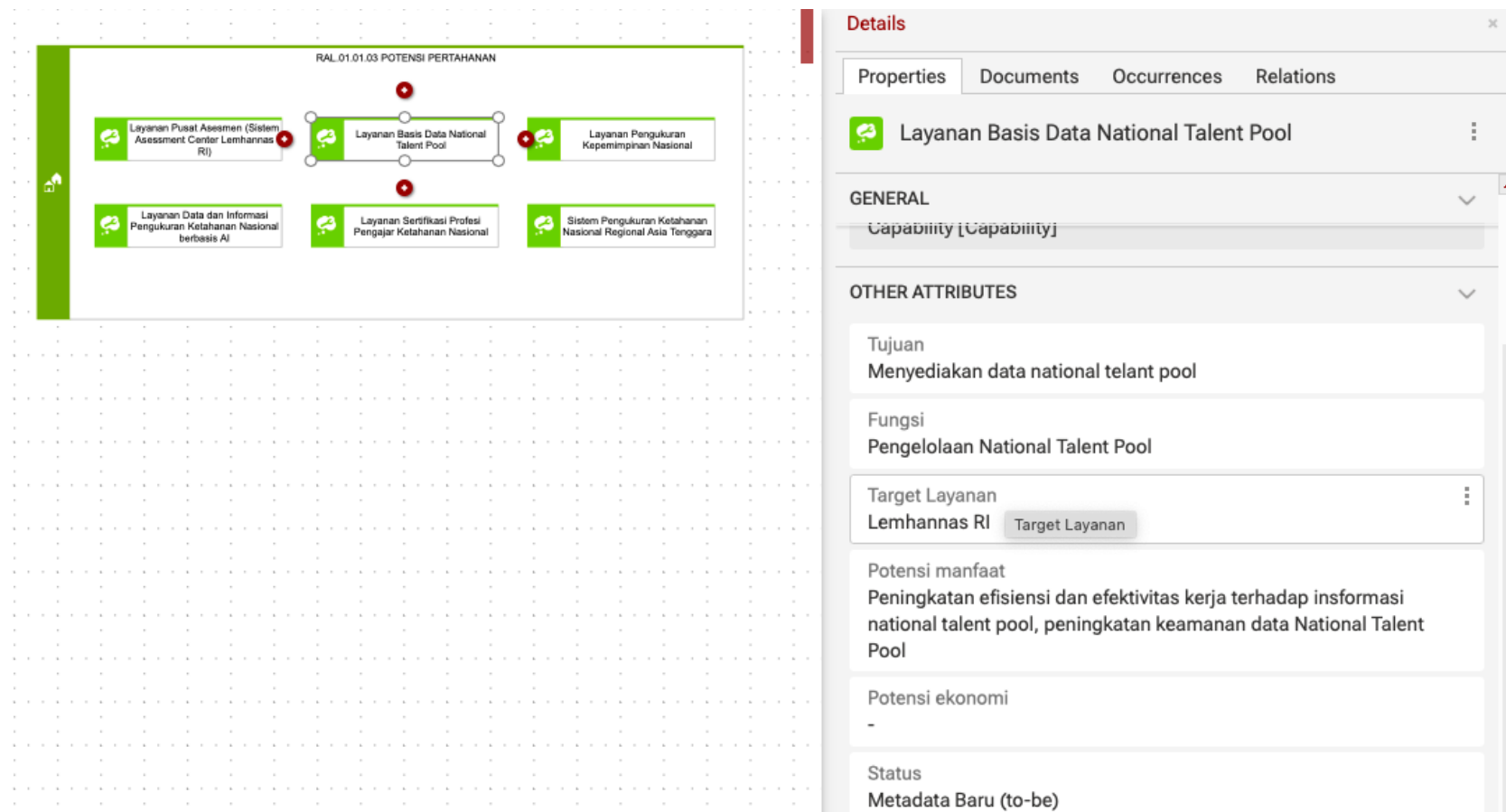
Tabel 4.1 Arsitektur Proses Bisnis SPBE Masa Mendatang (*to be*)

RAB Level 1	RAB Level 2	Kode RAB Level 3	RAB Level 3	RAB Level 4	Nama Bisnis/Urusan	Unit Kerja	Status
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.02	Penatakelolaan Aplikasi Informatika	MA-DAB.09.03.02.001	Pelaksanaan Koordinasi dan Penerapan Kebijakan SPBE	Sekretariat Utama Lemhannas RI	Baru
				MA-DAB.09.03.02.002	Perencanaan dan Tata Kelola SPBE	Biro Telematika	Baru
		RAB.09.03.06	Manajemen Keamanan Informasi	MA-DAB.09.03.08.001	Pengelolaan Keamanan SPBE	Biro Telematika	Baru
	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.01	Penataan Sistem Tata Laksana	MA-DAB.09.06.01.001	Pengelolaan Perubahan SPBE	Biro Perencanaan	Baru
		RAB.09.06.03	Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur	MA-DAB.09.06.03.001	Pengelolaan Kompetensi SDM SPBE	Biro Umum	Baru
		RAB.09.06.04	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi, Pengawasan, dan Akuntabilitas Kinerja	MA-DAB.09.06.04.001	Pengelolaan Risiko SPBE	Inspektorat	Baru

4.2 Arsitektur Layanan (*To Be*)

Dalam upaya modernisasi dan peningkatan layanan kepada masyarakat, pemerintah di seluruh dunia berusaha mengadopsi teknologi digital untuk menciptakan sistem pemerintahan yang efisien, transparan, dan responsif. Konsep Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan kunci dalam transformasi ini, yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyederhanakan proses pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini tidak hanya terkait digitalisasi layanan, tetapi juga tentang menciptakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mendukung pengambilan keputusan, penyampaian layanan, dan interaksi masyarakat dengan Lembaga Ketahanan Nasional RI.

Dalam penerapan arsitektur layanan SPBE masa depan, terdapat beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan. Pertama adalah keselarasan dengan tujuan strategis pemerintah dan kebutuhan warga. Kedua, arsitektur harus fleksibel dan skalabel, dapat menyesuaikan dengan perubahan teknologi dan kebutuhan sosial yang dinamis. Ketiga, harus ada fokus pada interoperabilitas dan standarisasi, memungkinkan berbagai entitas pemerintah untuk berbagi data dan layanan dengan aman dan efisien. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, SPBE masa depan tidak hanya akan memudahkan interaksi warga dengan pemerintah tetapi juga mendorong transparansi, akuntabilitas, dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berikut contoh layanan SPBE masa mendatang (*to be*) Lembaga Ketahanan Nasional RI yang terdokumentasi dalam Sistem Informasi Arsitektur.

Gambar 4.2 Salah Satu Arsitektur Layanan *To Be*

Tabel 4.2 Arsitektur Layanan SPBE Masa Mendatang (*to be*)

Kode RAL Level 1	Kode RAL Level 2	Kode RAL Level 3	RAL Level 3	Kode RAL Level 4	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Target Layanan	Metode Layanan	Unit Pelaksana
RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.01 PERTAHANAN	RAL.01.01.03	Potensi Pertahanan	LEMHANNAS-DAL.01.01.03.001	Layanan Pusat Asesmen (Sistem Assessment Center Lemhannas RI)	Mendukung operasional Assessment Center	Lemhannas RI	Elektronik	Pusat Laboratorium
				LEMHANNAS-DAL.01.01.03.002	Layanan Basis Data National Talent Pool	Menyediakan data national talent pool	Lemhannas RI	Elektronik	Pusat Laboratorium
				LEMHANNAS-DAL.01.01.03.003	Layanan Pengukuran Kepemimpinan Nasional	Mendukung Sistem Pengukuran Kepemimpinan Nasional	Lemhannas RI dan stakeholder terkait	Elektronik	Pusat Laboratorium
				LEMHANNAS-DAL.01.01.03.004	Layanan Data dan Informasi Pengukuran Ketahanan Nasional berbasis AI	Menyediakan data dan informasi pengukuran ketahanan nasional berbasis AI	1. Presiden 2. Bappeda 3. Peneliti	Elektronik	Pusat Laboratorium
				LEMHANNAS-DAL.01.01.03.005	Layanan Sertifikasi Profesi Pengajar Ketahanan Nasional	Wadah sertifikasi profesi bagi calon pengajar ketahanan nasional	Masyarakat/praktisi yang ingin mengajar ketahanan nasional	Elektronik	Pusat Laboratorium

Kode RAL Level 1	Kode RAL Level 2	Kode RAL Level 3	RAL Level 3	Kode RAL Level 4	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Target Layanan	Metode Layanan	Unit Pelaksana
				LEMHANNAS-DAL.01.01.03.006	Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional Regional Asia Tenggara	Melakukan pengukuran ketahanan nasional negara-negara di kawasan Asia tenggara	1. Presiden 2. Bappenas 3. Peneliti	Elektronik	Pusat Laboratorium
	RAL.01.28 HUKUM	RAL.01.28.01	Penyelenggaraan Peraturan Perundang-Undangan	LEMHANNAS-DAL.01.28.01.001	Layanan Informasi Penyusunan dan Pendokumentasian Hukum	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penyusunan produk hukum	Seluruh unit kerja Lemhannas RI	Elektronik	Biro Kerjasama
	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.03	Pendidikan Non Formal	LEMHANNAS-DAL.01.31.03.001	Layanan Kegiatan Pembelajaran Peserta	Menginformasikan Kegiatan Pembelajaran Peserta	Peserta Pendidikan	Elektronik	Direktorat Operasional Pendidikan
				LEMHANNAS-DAL.01.31.03.002	Layanan Penugasan Peserta	Menginformasikan Penugasan Peserta	Peserta Pendidikan	Elektronik	Direktorat Operasional Pendidikan
				LEMHANNAS-DAL.01.31.03.003	Layanan Video Conference Pembelajaran Jarak Jauh	Menyelenggarakan Kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh secara Video Conference	Peserta Pendidikan	Elektronik	Direktorat Operasional Pendidikan
				LEMHANNAS-DAL.01.31.03.004	Layanan Taskap	Memantau perkembangan taskap peserta	Peserta Pendidikan	Elektronik	Direktorat Operasional Pendidikan
				LEMHANNAS-DAL.01.31.03.005	Layanan Database Kegiatan SSDN, SSLN dan POP	Menginformasikan kegiatan SSDN, SSLN dan POP	Dedik, Dirops, Subdit Giattama	Elektronik	Direktorat Operasional Pendidikan

Kode RAL Level 1	Kode RAL Level 2	Kode RAL Level 3	RAL Level 3	Kode RAL Level 4	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Target Layanan	Metode Layanan	Unit Pelaksana
				LEMHANNAS-DAL.01.31.03.006	Layanan Laporan Harian Kegiatan SSDN, SSLN dan POP	Memantau pelaksanaan kegiatan SSDN, SSLN dan POP	Gub, Dedik, Dirops, Biro Humas, Subdit Giattama	Elektronik	Direktorat Operasional Pendidikan
				LEMHANNAS-DAL.01.31.03.007	Layanan Sertifikat Elektronik Kegiatan Seminar	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan IT	Peserta pendidikan dan undangan	Elektronik	Direktorat Operasional Pendidikan
				LEMHANNAS-DAL.01.31.03.008	Layanan Pengolahan Data Peserta	Meninput, menghimpun dan mengelola data Peserta Pendidikan	Peserta Pendidikan	Elektronik	Direktorat Pembinaan Peserta Pendidikan
				LEMHANNAS-DAL.01.31.03.009	Layanan Presensi/Kehadiran Peserta Pendidikan	Menyiapkan daftar Kehadiran Peserta Pendidikan	Peserta Pendidikan	Elektronik	Direktorat Pembinaan Peserta Pendidikan
				LEMHANNAS-DAL.01.31.03.010	Layanan Rekapitulasi Ketidakhadiran Peserta Pendidikan	Menyiapkan rekap ketidakhadiran peserta pendidikan	Peserta Pendidikan	Elektronik	Direktorat Pembinaan Peserta Pendidikan
				LEMHANNAS-DAL.01.31.03.011	Layanan Perizinan Peserta Pendidikan	Menginput dan mengelola perizinan peserta pendidikan	Peserta Pendidikan	Elektronik	Direktorat Pembinaan Peserta Pendidikan
				LEMHANNAS-DAL.01.31.03.012	Dukungan dan pelayanan kebutuhan sarpras peserta pendidikan	Menghimpun, mengelola dan menindaklanjuti aspirasi peserta pendidikan tentang perbaikan kebutuhan sarpras peserta pendidikan	Peserta Pendidikan	Elektronik	Direktorat Pembinaan Peserta Pendidikan
	RAL.01.33 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	RAL.01.33.02	Riset dan Inovasi	LEMHANNAS-DAL.01.33.02.001	Layanan Berbagi Pengetahuan	memberikan kontribusi dalam bentuk pengetahuan, pengalaman, dan pemikiran yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara	Unit Kerja Lemhannas RI	Elektronik	Biro Perencanaan

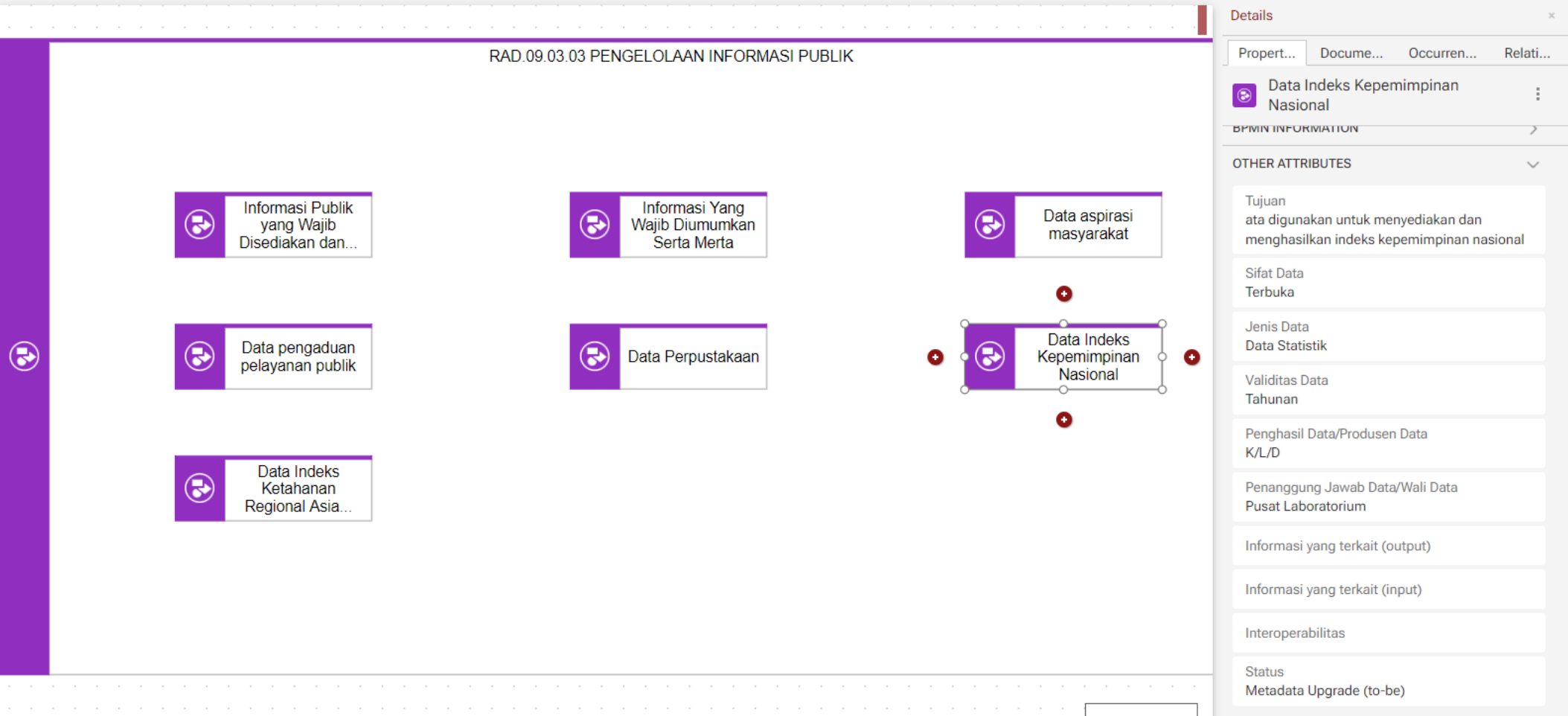
Kode RAL Level 1	Kode RAL Level 2	Kode RAL Level 3	RAL Level 3	Kode RAL Level 4	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Target Layanan	Metode Layanan	Unit Pelaksana
	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.01	Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Informatika	LEMHANNAS-DAL.01.43.01.01	Layanan Komputasi Awan Pemerintah	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya TI pemerintah	Biro Hubungan Masyarakat	Elektronik	Biro Humas
		RAL.01.43.03	Pengelolaan Informasi Publik	LEMHANNAS-DAL.01.43.03.01	Layanan Manajemen Media Sosial	Mengelola akun-akun media sosial lembaga	Biro Hubungan Masyarakat	Elektronik	Biro Humas
	RAL.01.44 KOMUNIKASI	RAL.01.44.02	Pengelolaan Komunikasi Publik	LEMHANNAS-DAL.01.44.02.01	Layanan Media Monitoring	Memonitor pemberitaan lembaga di media	Biro Hubungan Masyarakat	Elektronik	Biro Humas
RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.01	Penataan Sistem Tata Laksana	LEMHANNAS-DAL.02.04.01.01	Layanan Asistensi Bidang Ortala (Online)	memastikan pengelolaan organisasi dapat berjalan secara efisien, transparan, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan	Unit Kerja Lemhannas RI	Elektronik dan Non Elektronik	Biro Perencanaan
		RAL.02.04.04	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi, Pengawasan, dan Akuntabilitas Kinerja	LEMHANNAS-DAL.02.04.04.01	Layanan Pengelolaan Kinerja (Online)	layanan didapatkan dari aplikasi kinerja replikasi dari Pemprov Jabar, kinerja setiap individu akan terukur secara transparan dan mendukung dan berakibat pada kinerja diatasnya. tercapai atau tidak tercapainya kinerja akan mempengaruhi	seluruh unit kerja Lemhannas RI	Elektronik	Biro Perencanaan

Kode RAL Level 1	Kode RAL Level 2	Kode RAL Level 3	RAL Level 3	Kode RAL Level 4	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Target Layanan	Metode Layanan	Unit Pelaksana
						besaran tunjangan kinerja yg diperoleh			
				LEMHANNAS-DAL.02.04.04.002	Monev Pelaksanaan RB	layanan didapatkan dari aplikasi RB replikasi dari Pemprov Jabar. merupakan aplikasi untuk menetapkan dan memonitoring progres pelaksanaan rencana aksi RB general dan tematik	Tim RB Lemhannas RI	Elektronik	Biro Perencanaan
	RAL.02.05 KESEKR ETARIAT AN NEGARA	RAL.02.05.03	Penyele nggaraa n Koordin asi Kerja Sama Teknik Luar Negeri dan Penang anan Adminis trasi Perjalan an Dinas Luar Negeri	LEMHANNAS-DAL.02.05.03.001	Sistem Pendaftaran Calon Peserta PPRA, PPSA dan P3DA	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pendaftaran calon peserta	TNI, Polri, Seluruh Kementerian, Lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Non Pemerintah	Elektronik	Biro Kerjasama

4.3 Arsitektur Domain Data dan Informasi (To Be)

Domain Arsitektur Data dan Informasi SPBE mencakup integrasi data yang komprehensif dan interoperabilitas antar instansi pemerintah. Dalam arsitektur ini, data dari berbagai sumber akan dikumpulkan, disimpan, dan dikelola dalam satu pusat data nasional yang aman dan terdesentralisasi. Sistem ini akan menggunakan standar data yang konsisten untuk memastikan kualitas dan akurasi data yang tinggi. Dengan adanya data yang terintegrasi, instansi pemerintah dapat berbagi informasi secara efisien, mengurangi duplikasi data, dan mempercepat pengambilan keputusan. Selain itu, pengelolaan data yang baik juga akan mendukung analisis yang lebih mendalam dan penyusunan kebijakan yang berbasis data.

Di sisi lain, kondisi masa mendatang ini juga menekankan pentingnya perlindungan data dan privasi. Sistem keamanan yang canggih akan diterapkan untuk melindungi data dari ancaman siber dan penyalahgunaan. Teknologi seperti enkripsi, autentikasi multi-faktor, dan pemantauan real-time akan digunakan untuk menjaga integritas dan kerahasiaan data. Selain itu, regulasi dan kebijakan terkait perlindungan data pribadi akan diperkuat untuk memastikan bahwa data masyarakat digunakan secara etis dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan arsitektur data dan informasi yang kuat, SPBE akan mampu menyediakan layanan yang lebih aman, efisien, dan transparan bagi masyarakat. Adapun gambar arsitektur data dan informasi *to be* yaitu sebagai berikut:



Gambar 4.3 Arsitektur Data Dan Informasi Lembaga Ketahanan Nasional RI Masa Mendatang

Tabel 4.4 Arsiektur dan Metadata Data Dan Informasi To Be

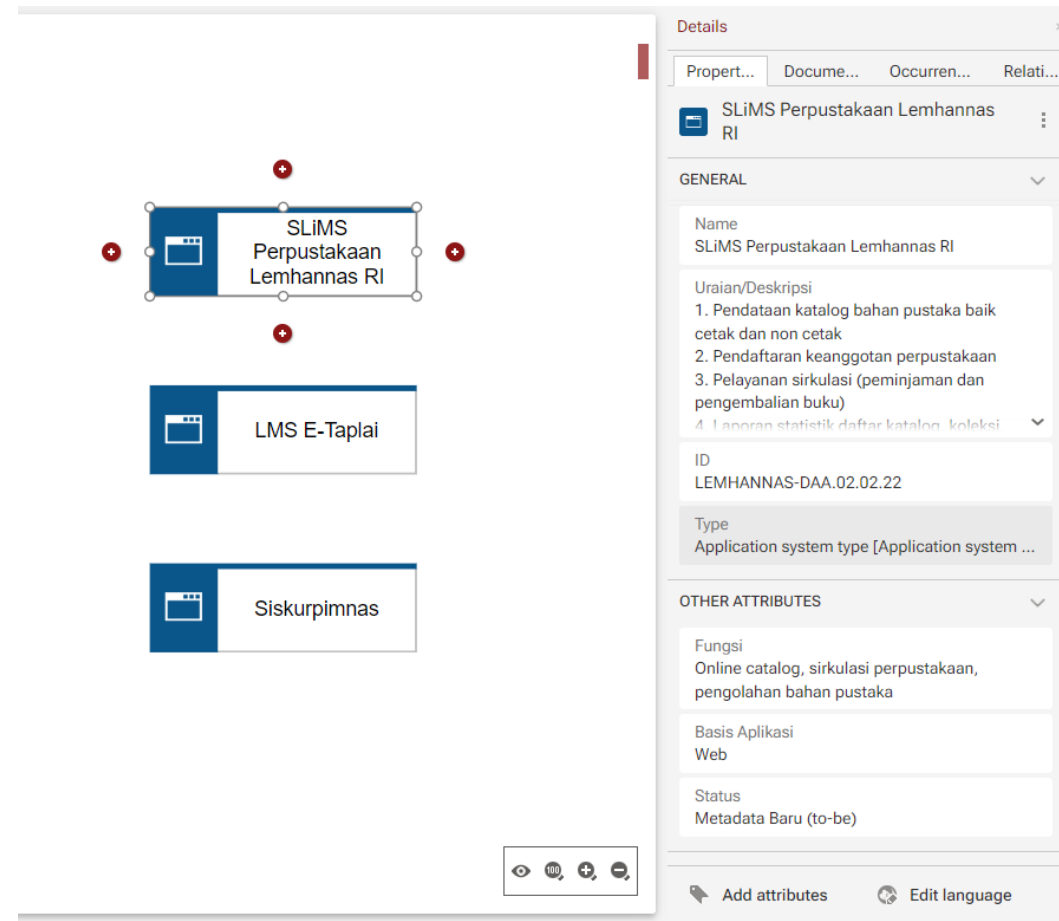
RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Nama Data	Kode	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	Layanan
RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.01 PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Data Sertifikasi Profesi Pengajar Ketahanan Nasional	LEMHAN NAS-DAD.06.01.01.01	Data yang menyajikan hasil sertifikasi pengajar Lemhannas RI	Menyediakan basis data pengajar Lemhannas yang telah tersertifikasi	Terbatas	Data Asesmen	Asesi	Unit Layanan Terpadu LSP	Daftar pengajar	Data pengajar Lemhannas yang telah tersertifikasi	Ya	Layanan LSP
			Data Asesmen Center	LEMHAN NAS-DAD.06.02.03	Data yang diperlukan dalam penyelenggaraan assesment center, yang mencakup : data asesi, data asesori, data kamus kompetensi, data simulasi, penjadwalan, hasil	Data digunakan dalam penyelenggaraan assesment center serta sebagai data national talent pool	Terbatas	Data Asesmen	Asesi	Puslab	Daftar peserta pendidikan, daftar personil Lemhannas	Data hasil assesment dan rekomendasi pengembangan	Ya	Layanan informasi Sistem Asesment Center

RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Nama Data	Kode	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Penghasil Data/Produsen Data	Penanggung Jawab Data/Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	Layanan
					asesmen t serta rekomendasi									
			Data Indeks Kepemimpinan Nasional	LEMHAN NAS-DAD.09.03.03.06	Data hasil evaluasi kepemimpinan nasional	ata digunakan untuk menyediakan dan menghasilkan indeks kepemimpinan nasional	Terbatas	Data Statistik	K/L/PD	Puslab	Data Indikator Siskurpi mnas	Data Siskurpi mnas	Ya	Layanan Siskurpi mnas
			Data Indeks Ketahanan Regional Asia Tenggara	LEMHAN NAS-DAD.09.03.03.07	Data indeks pengukuran ketahanan regional Asia Tenggara dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara	Data digunakan untuk menyediakan dan menghasilkan indeks ketahanan regional Asia Tenggara dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara	Terbatas	Data Statistik	K/L/PD	Puslab	Data Pengukuran yang dihasilkan oleh K/L/PD	Data hasil pengukuran berupa Indeks ketahanan regional	Ya	Layanan Informasi

4.4 Arsitektur Domain Aplikasi (To Be)

Arsitektur Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi yang terintegrasi. Dalam kondisi To Be, arsitektur aplikasi SPBE akan menggabungkan berbagai komponen seperti portal layanan terpadu, sistem manajemen data, dan platform interoperabilitas. Portal layanan terpadu akan menjadi pintu gerbang utama bagi masyarakat dan pegawai pemerintah untuk mengakses berbagai layanan digital dengan satu identitas digital yang terverifikasi. Sistem manajemen data akan memastikan pengelolaan dan pemrosesan data yang efisien dan aman, sementara platform interoperabilitas akan memungkinkan berbagai aplikasi dan sistem yang berbeda untuk saling berkomunikasi dan berbagi data dengan mudah.

Kondisi masa mendatang juga mencakup penerapan teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan, analitik data, dan blockchain untuk meningkatkan keamanan, prediksi kebijakan, dan transparansi dalam pemerintahan. Kecerdasan buatan dapat digunakan untuk analisis data besar guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Teknologi blockchain dapat diterapkan untuk mencatat transaksi dan dokumen pemerintahan dengan transparansi yang tinggi dan tidak dapat diubah, sehingga mengurangi risiko korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, dengan adanya integrasi dan otomatisasi yang lebih tinggi, pemerintah dapat mengurangi biaya operasional dan mempercepat proses pelayanan publik, menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif dan efektif.



Gambar 4.5 Arsitektur Domain Aplikasi (To Be)

Tabel 4.4 Arsitektur Aplikasi *To Be*

RAA Tingkat 1	RAA Tingkat 2	Kode	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran	Inputan Data	Supplier Data	Luaran Data	Basis Aplikasi	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	LEMHANN AS- DAA.02.02 .19	Web Applicatio n Firewall	Web Applicatio n Firewall	berfungsi untuk melindungi aplikasi web dari serangan yang sering menargetkan kerentanannya, seperti injeksi SQL, cross-site scripting (XSS), dan serangan DDoS. WAF bekerja dengan memantau, memfilter, dan memblokir lalu lintas HTTP/S yang masuk ke aplikasi web berdasarkan aturan keamanan yang ditentukan. Dengan cara ini, WAF membantu mencegah serangan berbahaya mencapai aplikasi web, menjaga data sensitif dan integritas sistem tetap aman.					Web Based	Biro Telematika	Biro Telematika

RAA Tingkat 1	RAA Tingkat 2	Kode	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran	Inputan Data	Supplier Data	Luaran Data	Basis Aplikasi	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
		LEMHANN AS- DAA.02.02 .20	Lisensi Zimbra Collaborati on Suite Premier - Profession al Edition	Lisensi Email server Zimbra Collaborati on Suite Premier - Profession al Edition adalah solusi komprehe nsif untuk manajeme n email dan kolaborasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan enterprise. Lisensi ini menawark an fitur- fitur unggulan seperti manajeme n email, kalender, tugas, serta kolaborasi dokumen yang terintegrasi dalam satu platform.	Lisensi ini menyediakan keamanan tingkat lanjut dengan anti- spam, anti-virus, dan enkripsi, serta mendukung integrasi multi-platform dan aplikasi pihak ketiga. Ini memungkinkan Lemhannas RI untuk meningkatkan perlindungan data dan efisiensi komunikasi, sambil memastikan kelancaran operasional dalam lingkungan yang aman.					Web Based	Biro Telematika	Biro Telematika

RAA Tingkat 1	RAA Tingkat 2	Kode	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran	Inputan Data	Supplier Data	Luaran Data	Basis Aplikasi	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
		LEMHANN AS- DAA.02.02 .21	Aplikasi TRK (Tunjangan Remunerasi Kinerja)	merupakan aplikasi untuk mengelola Kinerja Individu yang akan menentukan besaran remunerasi yang diterima	Penetapan kinerja, pengukuran kinerja, Pelaporan Kinerja, Penilaian Kinerja, Perhitungan Tunjangan Kinerja Pelaporan & Analisis Kinerja, Integrasi dengan Sistem Kepegawaian	data kinerja	data kepegawaian, pohon kinerja seluruh individu	Unit Kerja Lemhannas RI	capaian kinerja individu	Web Based	Biro Telematika	Biro Telematika
		LEMHANN AS- DAA.02.02 .22	SLiMS Perpustakaan Lemhannas RI	1. Pendataan katalog bahan pustaka baik cetak dan non cetak 2. Pendaftaran keanggotaan perpustakaan 3. Pelayanan sirkulasi (peminjaman dan pengembalian buku) 4. Laporan statistik daftar katalog, koleksi, sirkulasi,	Online catalog, sirkulasi perpustakaan, pengolahan bahan pustaka					Web Based	Perpustakaan Lemhannas RI	Biro Telematika

RAA Tingkat 1	RAA Tingkat 2	Kode	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran	Inputan Data	Supplier Data	Luaran Data	Basis Aplikasi	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
				checkpoint (daftar kunjungan), anggota dan laporan umum periodik								
		LEMHANN AS-DAA.02.02.23	Portal Perpustakaan Lemhannas RI	Sebagai website resmi perpustakaan Lemhannas RI	Portal informasi perpustakaan					Web Based	Perpustakaan Lemhannas RI	Biro Perencanaan
		LEMHANN AS-DAA.02.02.24	Lembayung	1. Mengarsipkan dan menilai tone berita secara otomatis 2. Otomatisasi pengelolaan media sosial dan memantau pertumbuhan kinerja akun dari waktu ke waktu 3. Penyediaan penyimpanan	1. Layanan Media Monitoring 2. Layanan Manajemen Media Sosial 3. Layanan Komputasi Awan Pemerintah	1. Pemberitaan lembaga di media 2. Kinerja akun media sosial dari waktu ke waktu 3. Berkas foto dan video hasil liputan	1. Mesin pencari Google 2. Platform - platform media sosial 3. Tim Peliputan Humas Lemhannas RI	1. Informasi sentimen pemberitaan lembaga di media 2. Informasi kinerja akun-akun media sosial lembaga 3. Informasi berkas foto dan video hasil liputan	Internal Lemhannas RI	Web Based		Biro Humas

RAA Tingkat 1	RAA Tingkat 2	Kode	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran	Inputan Data	Supplier Data	Luaran Data	Basis Aplikasi	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
				komputasi awan								
		LEMHANN AS- DAA.02.02 .25	LMS KEDEPUTI AN PENDIDIK AN (Website maupun Aplikasi Mobile Android dan Ios)	Manajeme n Sistem Pembelaja ran	Platform yang dapat memudahkan akses pembelajaran, menu dan fitur aplikasi mudah dicari dan digunakan oleh user/pengguna aplikasi (Peserta dan Organik Kedeputian Pendidikan) baik itu website maupun mobile, Menu dan fitur yang diharapkan dapat berfungsi seperti: 1. Kemudahan mengisi presensi yang akuntabel 2. Kemudahan mengisi dan pengajuan form data peserta, form ijin peserta, form evaluasi dan form kebutuhan lainnya, 3. Rekap ketidak hadiran secara aktual yang bisa dilihat oleh peserta dan dikelola oleh staf 4. Pengumuman untuk peserta	1. Data Peserta Pendidika n 2. Data Kehadiran Peserta Pendidika n, 3. Data Rekapitul asi ketidakh diran Peserta 4. Data perizinan peserta, 5. Data kegiatan peserta, 6. Data pembelaja ran 7. Data Tutor Pendampi ng Peserta 8. Data evaluasi pelayanan	Unit Kerja di Lingkun gan Kedeput ian pendidik an	unit kerja di lingkunga n kedeputia n pendidika n	dashboa rd, data hasil rekapitu lasi kehadir an, pengum uman, data kegiatan terkini pembela jaran	Web Based	DIREKTORA T OPSDIK, BINTADIK	DIREKTORAT OPSDIK, BINTADIK

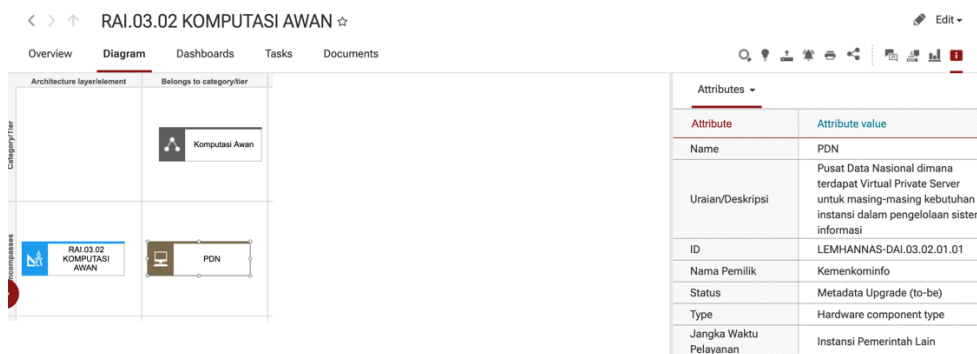
RAA Tingkat 1	RAA Tingkat 2	Kode	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran	Inputan Data	Supplier Data	Luaran Data	Basis Aplikasi	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
					pendidikan yang dapat diakses oleh peserta dan organik pendidikan dan dapat memberikan notifikasi melalui aplikasi mobile 5. Kemudahan mengakses data atau informasi mengenai Tutor Pendamping, Tajar, Taji dan Taprof serta penceramah atau narasumber 6. Kemudahan mengunduh dan mengunggah materi, bahan pembelajaran serta kegiatan pembelajaran 7. Adanya kolom pengajuan keluhan sarparas dan pelayanan pendidikan 8. Mempunyai Fitur Penilaian Peserta yang mudah untuk digunakan dan diakses 9. Notifikasi Pemberitahuan kegiatan pembelajaran maupun kegiatan kedeputian	pendidikan 9. Data keluhan peserta 10. Data penilaian peserta						
		LEMHANN AS- DAA.02.02 .26	LMS E- Taplai							Web Based	DIREKTORA T SOSIALISASI DAN MEDIA	DIREKTORAT SOSIALISASI DAN MEDIA

RAA Tingkat 1	RAA Tingkat 2	Kode	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran	Inputan Data	Supplier Data	Luaran Data	Basis Aplikasi	Unit Pengembang	Unit Operasional Teknologi
											PEMANTAPAN NILAI	PEMANTAPAN NILAI
		LEMHANN AS- DAA.02.02 .27	Siskurtan nas berbasis AI							Web Based	PUSAT LABORATOR IUM	PUSAT LABORATORI UM
		LEMHANN AS- DAA.02.02 .28	Sistem Assesment Center							Web Based	PUSAT LABORATOR IUM	PUSAT LABORATORI UM
		LEMHANN AS- DAA.02.02 .29	National Talent Pool							Web Based	PUSAT LABORATOR IUM	PUSAT LABORATORI UM
		LEMHANN AS- DAA.02.02 .30	Siskurpim nas							Web Based	PUSAT LABORATOR IUM	PUSAT LABORATORI UM
		LEMHANN AS- DAA.02.02 .31	Layanan Sertifikasi Profesi Pengajar Ketahanan Nasional							Web Based	PUSAT LABORATOR IUM	PUSAT LABORATORI UM

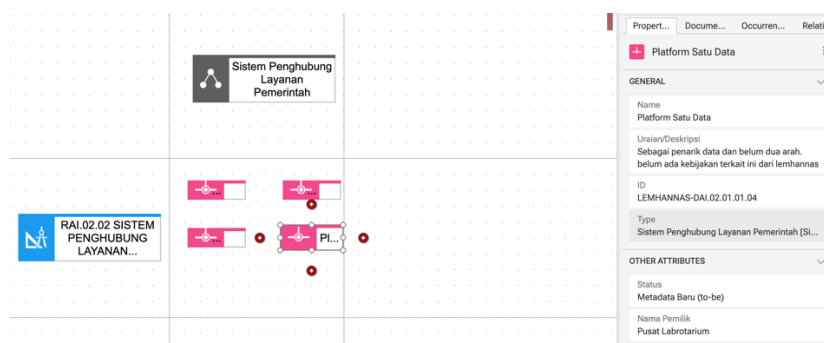
4.5 Domain Infrastruktur (*To Be*)

4.5.1 Rekomendasi Perencanaan Arsitektur Infrastruktur SPBE

Lembaga Ketahanan Nasional RI saat ini belum mengoptimalkan Pusat Data Nasional pemerintah yang terpadu yang menghubungkan seluruh Aplikasi di lingkungan Lemhannas RI, baik yang menghubungkan antar unit kerja. Saat ini, server aplikasi dan data antar unit kerja masih menggunakan pusat data internal dan belum menggunakan pusat data pemulihan. Hal ini mengakibatkan keterbatasan *resource* penyimpanan dan perangkat keras dalam berbagi pakai data antar aplikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum optimal inisiatif yang terarah untuk menggunakan Pusat Data Nasional yang dapat mendukung perangkat dan konektivitas yang aman, andal, dan efisien di seluruh lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI. Sehingga dapat meningkatkan koordinasi, keamanan, dan performa layanan pemerintah menjadi optimal, serta kemampuan Lemhannas RI dalam merespons kebutuhan layanan dengan lebih efektif dan cepat.



Gambar 4.5 Arsitektur Domain Infrastruktur PDN (*To Be*)



Gambar 4.6 Arsitektur Domain Infrastruktur SPLP (*To Be*)

Tabel 4.5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Masa Mendatang (To Be)

RAI Tingkat 1	RAI Tingkat 2	RAI Tingkat 3	Kode	Nama Infrastruktur	Deskripsi	Usulan Tujuan Infrastruktur	Unit Kerja Pengelola	Status
RAI.01 Fasilitas Komputasi	RAI.01.01 Pusat Data	RAI.01.01.01 Pusat Data Instansi Pusat	Lemhannas-DAI.01.01.01	Pusat Data Nasional	Pusat Data Nasional seluruh Lingkungan Lemhannas	Pusat Data Nasional sesuai standar internasional strata 3 misalnya dari ANSI/TIA-942 Rated 3	Biro Telekomunikasi	Update
	RAI.02.02 Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		Lemhannas - DAI.02.02.03	API Satu Data	Metode pertukaran data antara aplikasi Labrotarium Lehannas dengan API Satu Data dengan kementerian/lembaga yakni host-to-host antar server aplikasi.	Sinkronisasi API atau Gateway untuk pengelolaan dan keamanan pertukaran data antar aplikasi melalui teknologi Application Programming Interface (API).	Puslab	New
RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.06 Perangkat Keras Periferal	Lemhannas - DAI.03.01.06.01	Jalur kabel data (cable tray)	Jalur data (cable tray) di atas rack server.	Penataan jalur kabel menggunakan cable tray, yang ditaruh di atas rack server. Kabel data tertata dengan rapi.	Biro Telekomunikasi	Upgrade
			Lemhannas - DAI.03.01.06.02	Genset / UPS Pusat Data	Genset / UPS khusus pusat data Lemhannas.	Meyediakan backup power listrik khusus untuk backup power pada pusat data Lehannas	Biro Telekomunikasi	Upgrade

4.6 Domain Keamanan SPBE (To Be)

4.6.1 Rekomendasi Perencanaan Arsitektur Keamanan (to-be)

Dalam penerapan Domain Arsitektur Keamanan SPBE dalam menjaga keamanan informasi di Lemhannas RI penting nya penerapan kebijakan, standar, prosedur, dan manajemen keamanan SPBE yang harus diterapkan secara menyeluruh. Kebijakan ini mencakup semua aspek keamanan informasi, termasuk pengelolaan akses, perlindungan data, dan respons terhadap insiden keamanan. Selain itu, edukasi dan sosialisasi mengenai keamanan SPBE harus dilakukan secara berkala menggunakan berbagai metode dan media yang variatif untuk memastikan semua staf memahami dan mematuhi kebijakan keamanan yang telah ditetapkan.

Kondisi masa mendatang juga mencakup penerapan kegiatan Vulnerability Assessment and Penetration Testing (VAPT) dilakukan secara periodik untuk semua aplikasi web internet dan infrastruktur jaringan. VAPT ini dilaksanakan oleh tim internal dan eksternal yang independen untuk mengidentifikasi dan memperbaiki celah keamanan. Selain itu, audit keamanan aplikasi dan infrastruktur SPBE juga dilakukan secara berkala minimal sekali setahun, dengan audit yang lebih mendalam oleh pihak eksternal yang independen setiap tiga tahun. Pendekatan ini memastikan bahwa sistem tetap aman dan terjaga dari potensi ancaman, serta mematuhi standar keamanan yang tinggi.

Tabel 4.6 Arsitektur Keamanan SPBE Masa Mendatang (To Be)

RAK Tingkat 1	RAK Tingkat 2	Kode	Nama Keamanan	Deskripsi	Usulan Tujuan Keamanan	Status
RAK.01 Standar Keamanan	RAK.01.01 Standar Teknis dan Prosedur Keamanan	Lemhannas-DAK-01.01.01	Kebijakan Standar SMKI	Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi ini bertujuan untuk memastikan perlindungan dan integritas informasi di lingkungan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat melalui pedoman dan prosedur yang komprehensif.	Kebijakan standar dan prosedur keamanan informasi berlaku untuk seluruh Lemhannas. Kebijakan, Standar, Prosedur, dan Manajemen Keamanan SPBE Lemhannas RI. Penyusunan SOP Keamanan Data dan Informasi, Keamanan Aplikasi SPBE, Keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, dan Keamanan Jaringan Intra Pemerintah.	New
RAK.02 Penerapan Keamanan	RAK.02.01 Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Lemhannas-DAK-02.01.02	Edukasi dan sosialisasi keamanan SPBE	Edukasi dan sosialisasi keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan seluruh pegawai Lemhannas terhadap kebijakan, standar, dan prosedur keamanan informasi.	Edukasi dan sosialisasi keamanan SPBE dilakukan secara berkala dengan menggunakan metode / media yang variatif.	New

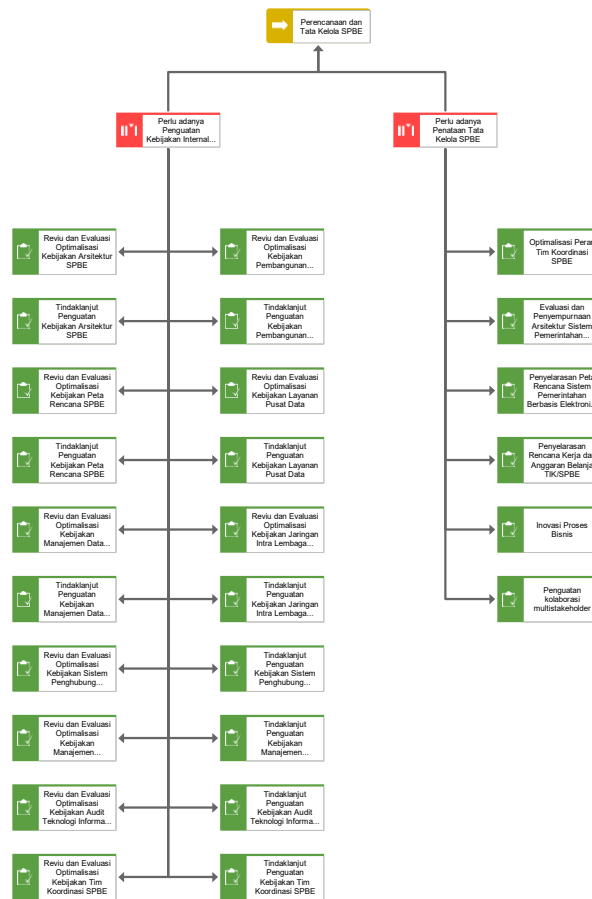
RAK Tingkat 1	RAK Tingkat 2	Kode	Nama Keamanan	Deskripsi	Usulan Tujuan Keamanan	Status
	RAK.02.03 Peningkatan Keamanan SPBE	Lemhannas-DAK-02.03.02	Kegiatan VAPT Aplikasi MA	Proses evaluasi keamanan yang komprehensif yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi kerentanan dalam aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi Lemhannas	Kegiatan <i>Vulnerability Assesment and Penetration Testing</i> (VAPT) secara periodik untuk semua aplikasi web internet, dan infrastruktur jaringan. VAPT dilakukan oleh pihak internal dan eksternal yang independen.	New
	RAK.02.05 Audit Keamanan SPBE	Lemhannas-DAK-02.05.02	Audit keamanan aplikasi, infrastruktur SPBE	Audit IT untuk memastikan bahwa semua komponen sistem informasi sesuai dengan standar keamanan yang berlaku dengan tujuan untuk mengidentifikasi potensi kerentanan, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan, dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan keamanan pada Aplikasi Lemhannas	Audit keamanan aplikasi, infrastruktur SPBE dilakukan secara periodik minimal satu tahun sekali, dan pada tahun ke 3 oleh pihak eksternal yang independen.	New

4.7 *Gap Analysis* dan Usulan Kegiatan Domain Peta Rencana SPBE

Pemetaan *Gap Analysis* dan usulan kegiatan pada Sistem Informasi Arsitektur terbagi dalam muatan 7 domain Peta Rencana SPBE yaitu Tata Kelola, Manajemen SPBE, Layanan, Aplikasi, Infrastruktur, Keamanan, dan Audit TIK.

4.7.1 *Gap Analysis* Tata Kelola

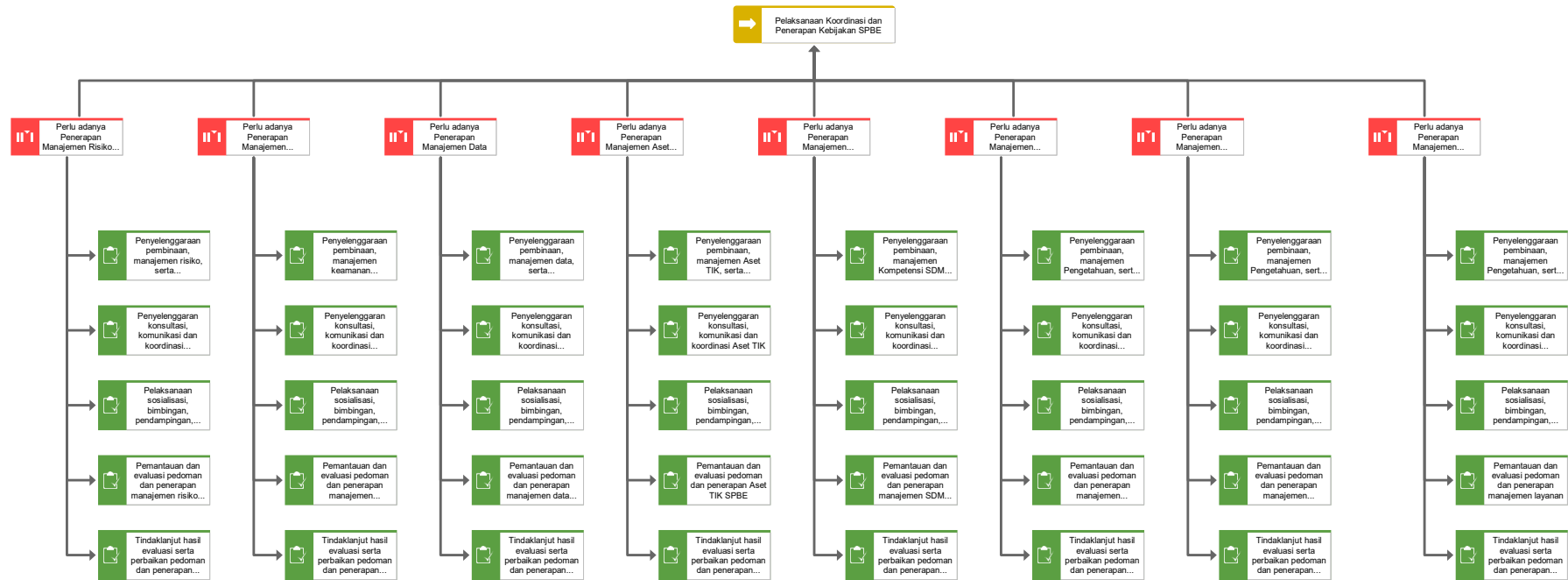
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah upaya untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam seluruh aspek pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Tujuan utama dari SPBE adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan *Gap Analysis* atau analisis kesenjangan guna mengidentifikasi rekomendasi perbaikan dalam penerapan tata kelola SPBE. Adapun salah satu *Gap Analysis* muatan Tata Kelola SPBE pada Sistem Informasi Arsitektur Nasional dapat dilihat pada Gambar 4.7.



Gambar 4.7 Gap Analysis Tata Kelola

4.7.2 Gap analysis Manajemen

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Analisis ini fokus pada aspek-aspek spesifik dalam manajemen SPBE, seperti perencanaan strategis, organisasi dan SDM, proses bisnis, teknologi informasi, keamanan informasi, serta pemantauan dan evaluasi. Dengan mengidentifikasi gap dalam setiap domain, organisasi dapat mengetahui dengan tepat di mana perlu dilakukan perbaikan dan pengembangan untuk mencapai tata kelola SPBE yang lebih baik. Hal ini memungkinkan organisasi untuk menyusun roadmap yang jelas untuk meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi, dan efektivitas penggunaan teknologi informasi. Adapun salah satu Gap Analysis muatan Manajemen SPBE pada Sistem Informasi Arsitektur Nasional dapat dilihat pada Gambar 4.8 berikut.

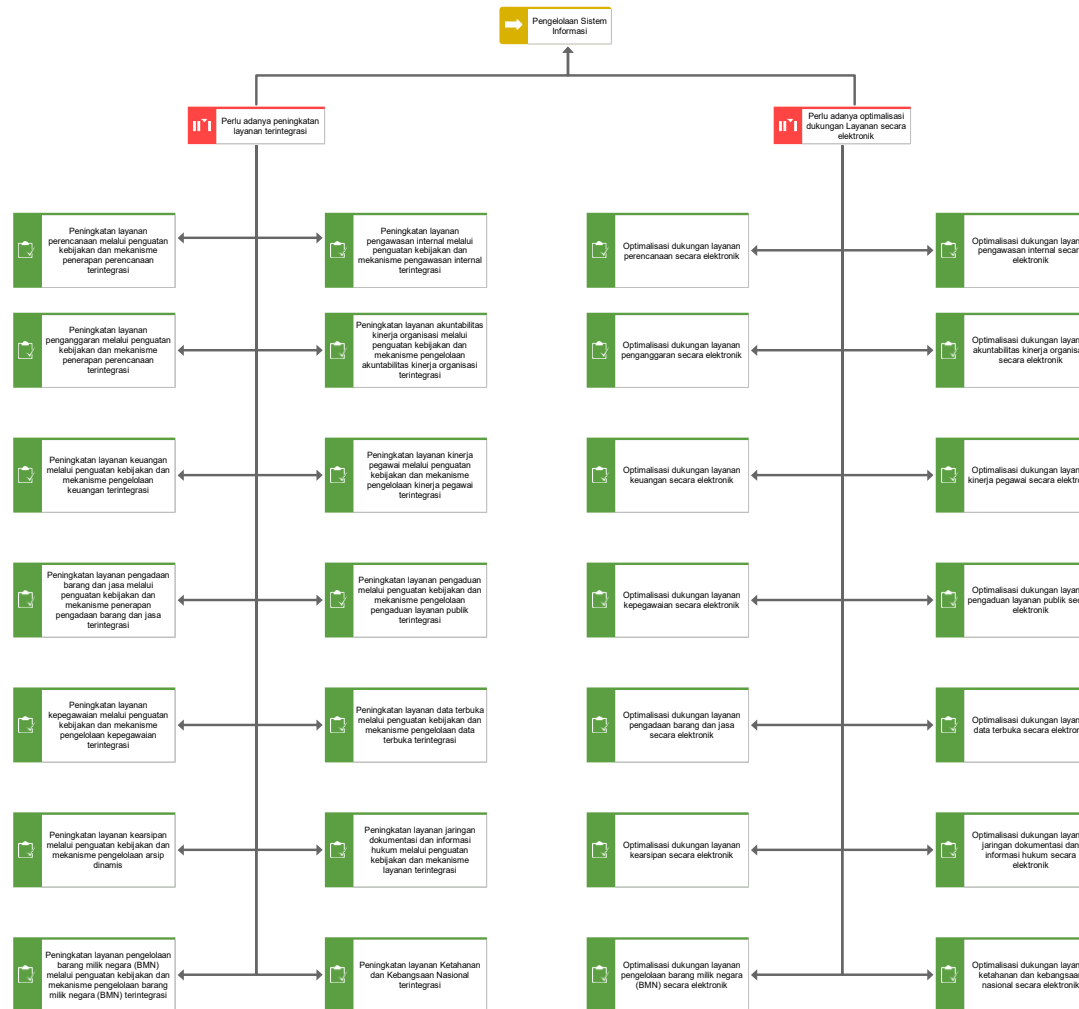


Gambar 4.8 Gap Analysis Penerapan Manajemen SPBE

4.7.3 *Gap analysis* Layanan

Analisis gap layanan SPBE merupakan suatu evaluasi mendalam terhadap kesenjangan antara layanan SPBE yang saat ini diberikan dengan harapan dan kebutuhan pengguna layanan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan, kelemahan, serta peluang perbaikan dalam penyampaian layanan publik secara elektronik. Dengan melakukan analisis gap, organisasi pemerintah dapat memahami dengan jelas apa yang perlu ditingkatkan untuk memberikan layanan yang lebih efektif, efisien, dan berkualitas. Aspek-aspek yang biasanya dievaluasi dalam analisis gap layanan SPBE meliputi kualitas layanan, kecepatan akses, keamanan data, kemudahan penggunaan, serta tingkat kepuasan pengguna.

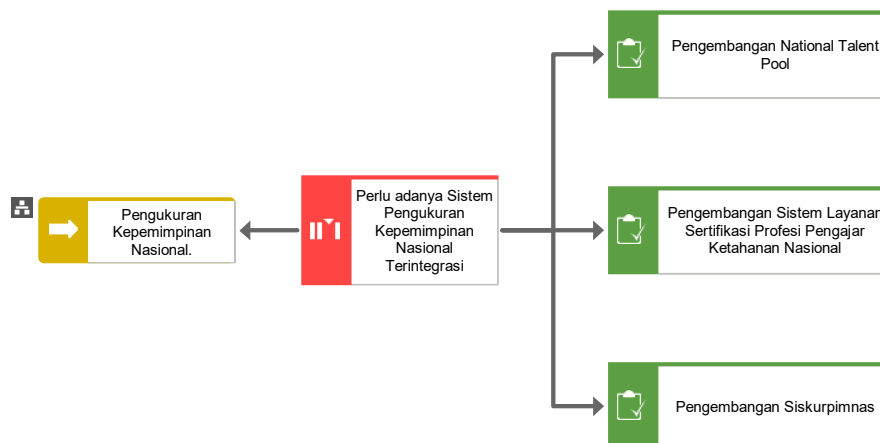
Hasil dari analisis gap layanan SPBE akan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi sebenarnya dari layanan SPBE yang sedang berjalan. Informasi ini sangat berharga untuk menyusun strategi perbaikan dan pengembangan layanan. Dengan mengetahui dengan pasti di mana letak kekurangannya, organisasi dapat merumuskan langkah-langkah yang tepat untuk menutup gap tersebut. Misalnya, jika analisis menunjukkan bahwa kecepatan akses layanan masih lambat, maka organisasi dapat melakukan optimasi pada infrastruktur teknologi informasi atau merancang ulang proses bisnis yang terkait. Dengan demikian, analisis gap layanan SPBE menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa layanan SPBE yang diberikan selalu relevan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.



Gambar 4.9 Gap Analysis Layanan SPBE

4.7.4 Gap Analysis Aplikasi

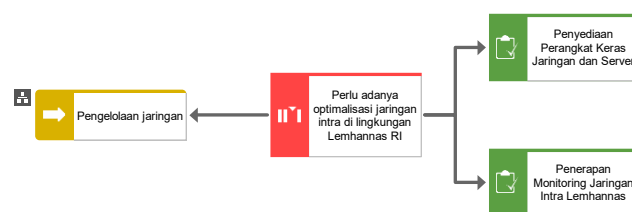
Dalam upaya memperkuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), analisis kesenjangan (*Gap Analysis*) terhadap domain aplikasi dan data menjadi langkah krusial untuk mengevaluasi kondisi saat ini dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap perbedaan antara kondisi saat ini dan kondisi ideal yang diharapkan dalam pengelolaan aplikasi dan data di instansi pemerintahan. Melalui penilaian menyeluruh terhadap aspek-aspek seperti kualitas data, keamanan informasi, interoperabilitas aplikasi, serta aksesibilitas data, Gap Analysis ini memberikan wawasan mendalam tentang kekuatan dan kelemahan yang ada. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penyusunan strategi peningkatan dan harmonisasi aplikasi serta pengelolaan data yang lebih efisien, aman, dan terintegrasi, sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan SPBE yang lebih optimal. Adapun salah satu Gap Analysis muatan aplikasi pada Sistem Informasi Arsitektur Nasional dapat dilihat pada Gambar 4.10.



Gambar 4.10 *Gap Analysis* Pengelolaan Aplikasi

4.7.5 Gap Analysis Infrastruktur

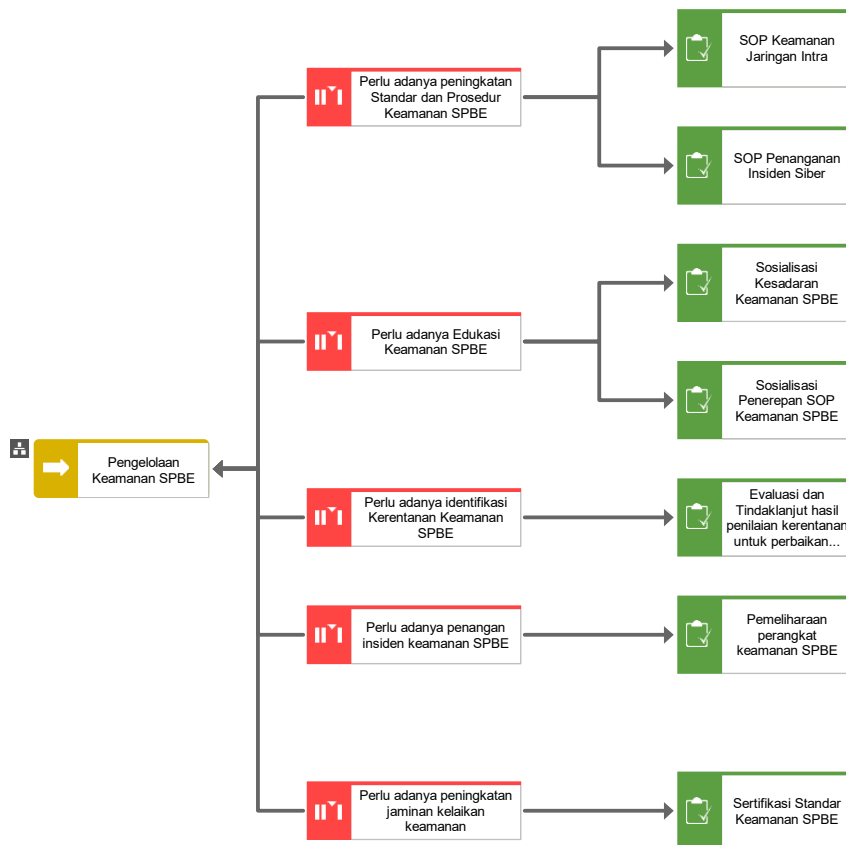
Dalam rangka mengoptimalkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), analisis kesenjangan (Gap Analysis) terhadap infrastruktur menjadi langkah strategis yang sangat penting. Gap Analysis ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan dalam pengelolaan infrastruktur TIK, penerapan keamanan siber, serta pelaksanaan audit TIK yang efektif. Dengan mengevaluasi aspek-aspek krusial seperti keandalan infrastruktur, proteksi terhadap ancaman keamanan, dan kepatuhan terhadap standar audit, analisis ini memberikan gambaran komprehensif tentang area yang memerlukan perhatian lebih dan peningkatan. Hasil dari Gap Analysis ini akan menjadi landasan bagi perumusan rekomendasi strategis yang bertujuan untuk memperkuat infrastruktur TIK, meningkatkan keamanan data, serta memastikan praktik audit yang transparan dan akuntabel, sehingga mendukung tercapainya SPBE yang lebih efisien dan andal. Adapun salah satu Gap Analysis muatan Infrastruktur SPBE pada Sistem Informasi Arsitektur Nasional dapat dilihat pada Gambar 4.11.



Gambar 4.11 *Gap Analysis* Pengelolaan Jaringan

4.7.6 Gap Analysis Keamanan Informasi

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), analisis kesenjangan (Gap Analysis) terhadap Keamanan Informasi menjadi langkah strategis yang sangat penting. Analisis ini membandingkan kondisi keamanan informasi yang ada dengan standar keamanan yang telah ditetapkan atau best practice di bidang keamanan siber. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi risiko-risiko keamanan yang mungkin terjadi, seperti serangan siber, kebocoran data, atau gangguan pada layanan elektronik. Adapun salah satu Gap Analysis muatan Keamanan SPBE pada Sistem Informasi Arsitektur Nasional dapat dilihat pada Gambar 4.12.

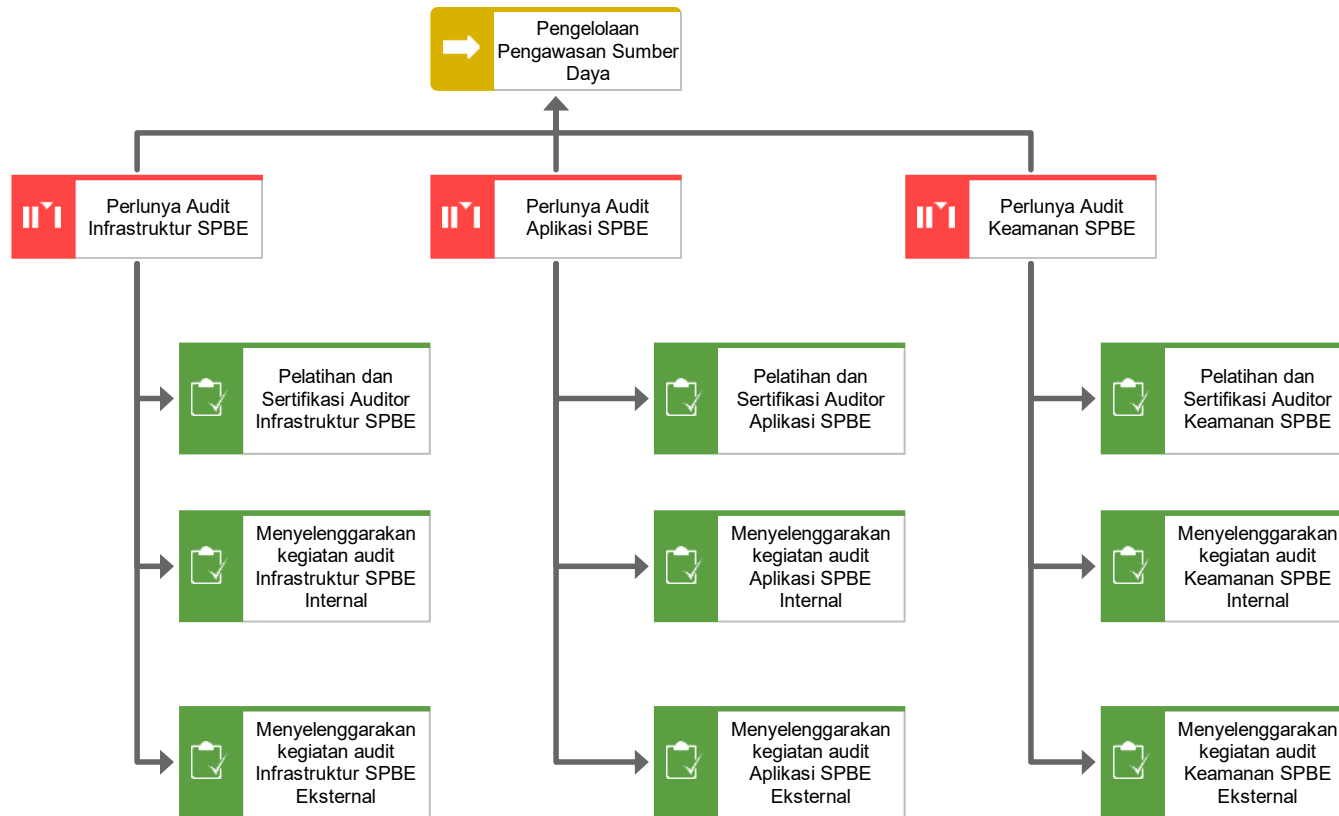


Gambar 4.12 Gap Analysis Keamanan Informasi

4.7.7 *Gap Analysis* Audit TIK

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Analisis gap audit TIK dalam SPBE merupakan suatu proses evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan antara kondisi keamanan dan pengendalian sistem informasi yang ada dengan standar atau praktik terbaik yang telah ditetapkan. Audit TIK ini secara khusus berfokus pada aspek teknis dari SPBE, seperti infrastruktur jaringan, sistem operasi, aplikasi perangkat lunak, dan basis data. Dengan melakukan analisis gap, organisasi pemerintah dapat mengetahui kelemahan dan risiko keamanan yang mungkin timbul dalam sistem informasi mereka. Hasil dari audit ini kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana perbaikan dan peningkatan keamanan sistem informasi.

Tujuan utama dari analisis gap audit TIK dalam SPBE adalah untuk memastikan bahwa sistem informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan aman, andal, dan efektif. Dengan menutup gap keamanan yang ada, organisasi pemerintah dapat mencegah terjadinya serangan siber, kebocoran data, dan gangguan pada layanan elektronik. Selain itu, audit TIK juga dapat membantu organisasi pemerintah untuk memenuhi persyaratan regulasi dan standar keamanan yang berlaku. Dengan demikian, analisis gap audit TIK merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola SPBE yang baik dan akuntabel. Adapun hasil *Gap Analysis* Audit TIK pada Sistem Informasi Arsitektur Nasional dapat dilihat pada Gambar 4.13.



Gambar 4.13 *Gap Analysis* Audit TIK

BAB V

PETA RENCANA SPBE

5.1 Visi, Misi, dan Sasaran Strategis Lembaga Ketahanan Nasional RI

Dalam mendukung pencapaian visi Presiden dan Wakil Presiden, maka Lemhannas RI sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya dalam hal pembinaan Ketahanan Nasional, menetapkan Visi Lemhannas RI periode 2020-2024 yaitu *"Menjadi Pusat Layanan Unggulan (Center of Excellence) yang Berkualitas dan Kredibel di bidang Ketahanan Nasional dalam mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"*.

Adapun Misi Lemhannas RI periode 2020-2024 melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 5 (lima) "Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa" yaitu Mewujudkan Ketahanan Nasional yang Tangguh di Pusat dan Daerah dengan:

1. Mewujudkan Kader dan pemantapan Pimpinan Tingkat Nasional berbasis pengarusutamaan gender yang berpikir komprehensif, integral, holistik, integratif dan profesional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, negarawan, berwawasan nusantara serta mempunyai cakrawala pandang yang universal.
2. Mewujudkan agen perubahan dan komponen bangsa berbasis pengarusutamaan gender melalui Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan guna meningkatkan dan memantapkan wawasan kebangsaan dalam rangka membangun karakter bangsa.
4. Mewujudkan kajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional yang diperlukan oleh Presiden, guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Mewujudkan Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional di pusat dan daerah yang mendukung Sistem Keamanan Nasional yang terintegratif.

Tujuan dalam rangka pencapaian prioritas nasional yaitu penguatan revolusi mental dan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya adalah “Penguatan agen perubahan dan komponen bangsa berbasis pengarusutamaan gender melalui Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan guna meningkatkan dan memantapkan wawasan kebangsaan dalam rangka membangun karakter bangsa”.

Sedangkan tujuan dalam rangka pencapaian prioritas lembaga adalah penguatan ketahanan nasional yang tangguh di pusat dan daerah melalui:

1. Terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh di pusat dan daerah dalam Bidang Ketahanan Nasional dalam mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong.
2. Terwujudnya Pusat Layanan Unggulan (*Center of Excellence*) yang Berkualitas dan Kredibel.

Sasaran strategis pembangunan Lembaga Ketahanan Nasional RI merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, sasaran strategis dirumuskan dari sasaran nasional pembangunan ketahanan nasional dalam RPJMN Tahun 2025 – 2029 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2020 – 2024 serta menjabarkan misi Lembaga Ketahanan Nasional RI.

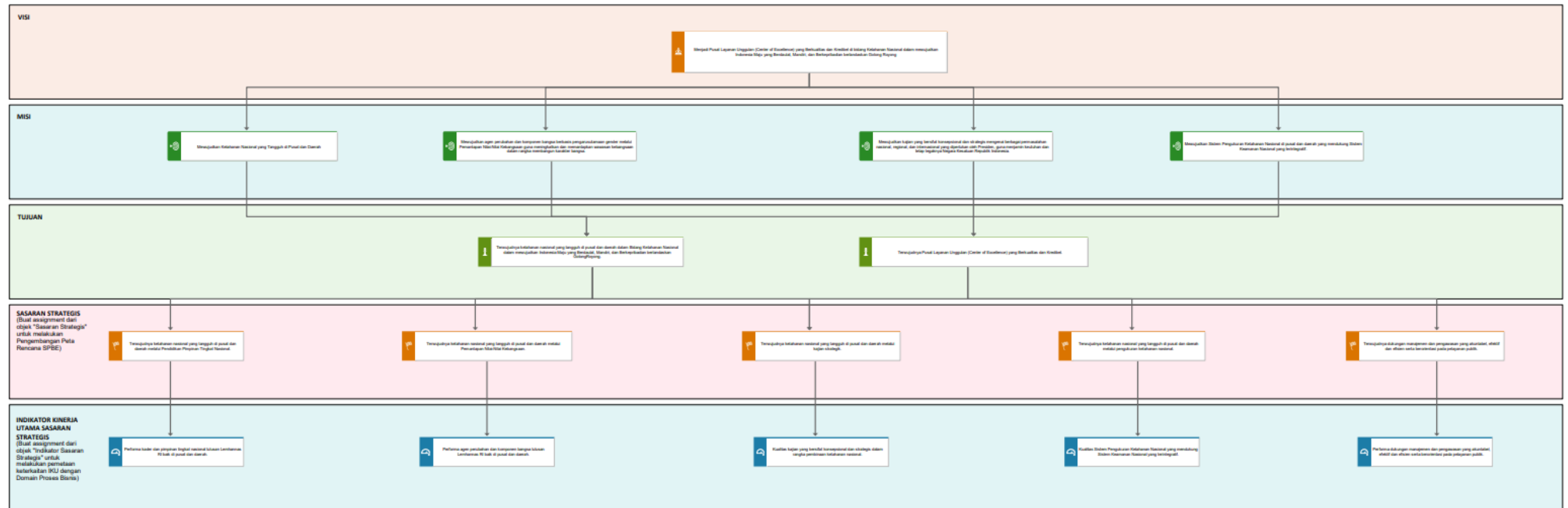
Sasaran strategis dalam rangka pencapaian prioritas nasional adalah menguatnya revolusi mental dan pembinaan 4 (empat) konsensus dasar bangsa untuk memantapkan ketahanan budaya melalui “Pembentukan agen perubahan dan komponen bangsa yang mengimplementasikan revolusi mental dan wawasan kebangsaan setelah melaksanakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan”.

Sedangkan sasaran strategis dalam rangka pencapaian prioritas lembaga adalah terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh di pusat dan daerah melalui:

1. Terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh di pusat dan daerah melalui Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional.
3. Terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh di pusat dan daerah melalui Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan.
4. Terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh di pusat dan daerah melalui kajian strategik.
5. Terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh di pusat dan daerah melalui pengukuran ketahanan nasional.
6. Terwujudnya dukungan manajemen dan pengawasan yang akuntabel, efektif dan efisien serta berorientasi pada pelayanan publik.

5.2 Peta Rencana SPBE Lembaga Ketahanan Nasional RI 2025-2029

Peta Rencana SPBE Lembaga Ketahanan Nasional RI berisi langkah strategis penerapan SPBE di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI yang mencakup Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK. Peta Rencana SPBE disusun berdasarkan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Rencana Strategis Lembaga Ketahanan Nasional RI. Adapun Peta Strategi Lembaga Ketahanan Nasional RI yang tertuang dalam Sistem Informasi Arsitektur dapat dilihat pada gambar 5.1, sedangkan Peta Rencana SPBE Lembaga Ketahanan Nasional RI tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 5.1.



Gambar 5.1 Peta Strategi Lembaga Ketahanan Nasional RI

Tabel 5.1. Peta Rencana SPBE Lembaga Ketahanan Nasional RI

No	Project/Activities			UIC	Baseline	Target				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik										
Indikator	Indeks SPBE (sesuai penilaian MenPAN skala 1-5)					3.5	3.7	3.9	4.1	4.3
INISIATIF STRATEGIS: Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam meningkatkan Reformasi Birokrasi (RB) Lembaga Ketahanan Nasional RI										
1	Tata Kelola									
	A	Kebijakan Internal SPBE								
		1	Reviu dan Evaluasi Optimalisasi Kebijakan Arsitektur SPBE		Biro Telematika	Kebijakan Tata Kelola SPBE	√		√	√
		2	Tindaklanjut Penguatan Kebijakan Arsitektur SPBE		Biro Telematika	Kebijakan Tata Kelola SPBE		√		√
		3	Reviu dan Evaluasi Optimalisasi Kebijakan Peta Rencana SPBE		Biro Telematika & Biro Perencanaan	Kebijakan Tata Kelola SPBE	√		√	√
		4	Tindaklanjut Penguatan Kebijakan Peta Rencana SPBE		Biro Telematika & Biro Perencanaan	Kebijakan Tata Kelola SPBE		√		√
		5	Reviu dan Evaluasi Optimalisasi Kebijakan Manajemen Data SPBE		Biro Telematika	Kebijakan Tata Kelola SPBE	√		√	√
		6	Tindaklanjut Penguatan Kebijakan Manajemen Data SPBE		Biro Telematika	Kebijakan Tata Kelola SPBE		√		√
		7	Reviu dan Evaluasi Optimalisasi Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE		Biro Telematika	Kebijakan Tata Kelola SPBE	√		√	√
		8	Tindaklanjut Penguatan Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE		Biro Telematika	Kebijakan Tata Kelola SPBE		√		√
		9	Reviu dan Evaluasi Optimalisasi Kebijakan Layanan Pusat Data		Biro Telematika	Kebijakan Tata Kelola SPBE	√		√	√
		10	Tindaklanjut Penguatan Kebijakan Layanan Pusat Data		Biro Telematika	Kebijakan Tata Kelola SPBE		√		√

No	Project/Activities			UIC	Baseline	Target				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		11	Reviu dan Evaluasi Optimalisasi Kebijakan Jaringan Intra Lembaga Ketahanan Nasional RI	Biro Telematika	Kebijakan Tata Kelola SPBE	√		√		√
		12	Tindaklanjut Penguatan Kebijakan Jaringan Intra Lembaga Ketahanan Nasional RI	Biro Telematika	Kebijakan Tata Kelola SPBE		√		√	
		13	Reviu dan Evaluasi Optimalisasi Kebijakan Sistem Penghubung Layanan	Biro Telematika	Kebijakan Tata Kelola SPBE	√		√		√
		14	Tindaklanjut Penguatan Kebijakan Sistem Penghubung Layanan	Biro Telematika	Kebijakan Tata Kelola SPBE		√		√	
		15	Reviu dan Evaluasi Optimalisasi Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi	Biro Telematika	Kebijakan Tata Kelola SPBE	√		√		√
		16	Tindaklanjut Penguatan Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi	Biro Telematika	Kebijakan Tata Kelola SPBE		√		√	
		17	Reviu dan Evaluasi Optimalisasi Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	Biro Telematika & Inspektorat	Kebijakan Tata Kelola SPBE	√		√		√
		18	Tindaklanjut Penguatan Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	Biro Telematika & Inspektorat	Kebijakan Tata Kelola SPBE		√		√	
		19	Reviu dan Evaluasi Optimalisasi Kebijakan Tim Koordinasi SPBE	Biro Telematika	Kebijakan Tata Kelola SPBE	√		√		√
		20	Tindaklanjut Penguatan Kebijakan Tim Koordinasi SPBE	Biro Telematika	Kebijakan Tata Kelola SPBE		√		√	
	B	Penguatan Tata Kelola SPBE								
		1	Optimalisasi Peran Tim Koordinasi SPBE	Biro Telematika	SK Tim Koordinasi SPBE	√	√	√	√	√
		2	Evaluasi dan Penyempurnaan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Biro Telematika	Arsitektur SPBE	√	√	√	√	√

No	Project/Activities			UIC	Baseline	Target				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		3	Penyelarasan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Biro Perencanaan dan Biro Telematika	Renstra dan Arsitektur SPBE	√	√	√	√	√
		4	Penyelarasan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja TIK/SPBE	Biro Perencanaan dan Biro Telematika	Renstra dan Arsitektur SPBE	√	√	√	√	√
		5	Inovasi Proses Bisnis	Biro Perencanaan	Peta Proses Bisnis Lembaga Ketahanan Nasional RI	√	√	√	√	√
		6	Penguatan kolaborasi multistakeholder	Biro Telematika	Kebijakan Tata Kelola SPBE	√	√			
2	Manajemen SPBE									
	A	Manajemen Risiko								
		1	Penyelenggaraan pembinaan, manajemen risiko, serta pendokumentasian manajemen risiko	Inspektorat & Biro Telematika	Pedoman Manajemen Risiko SPBE	√	√	√	√	√
		2	Penyelenggaraan konsultasi, komunikasi dan koordinasi pengelolaan risiko SPBE	Inspektorat & Biro Telematika	Pedoman Manajemen Risiko SPBE	√	√	√	√	√
		3	Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, pendampingan, supervisi dan bantuan teknis pengelolaan risiko SPBE	Inspektorat & Biro Telematika	Pedoman Manajemen Risiko SPBE	√	√	√	√	√
		4	Pemantauan dan evaluasi pedoman dan penerapan manajemen risiko SPBE	Inspektorat & Biro Telematika	Pedoman Manajemen Risiko SPBE	√		√		√
		5	Tindaklanjut hasil evaluasi serta perbaikan pedoman dan penerapan manajemen risiko SPBE	Inspektorat & Biro Telematika	Pedoman Manajemen Risiko SPBE		√		√	
	B	Manajemen Keamanan Informasi								
		1	Penyelenggaraan pembinaan, manajemen keamanan informasi, serta	Biro Telematika	Pedoman Manajemen	√	√	√	√	√

No	Project/Activities			UIC	Baseline	Target				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
			pendokumentasian keamanan informasi SPBE		Keamanan Informasi					
		2	Penyelenggaraan konsultasi, komunikasi dan koordinasi pengelolaan keamanan informasi SPBE	Biro Telematika	Pedoman Manajemen Keamanan Informasi	√	√	√	√	√
		3	Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, pendampingan, supervisi dan bantuan teknis pengelolaan risiko keamanan informasi SPBE	Biro Telematika	Pedoman Manajemen Keamanan Informasi	√	√	√	√	√
		4	Pemantauan dan evaluasi pedoman dan penerapan manajemen Keamanan Informasi	Biro Telematika	Pedoman Manajemen Keamanan Informasi	√	√	√	√	√
		5	Tindaklanjut hasil evaluasi serta perbaikan pedoman dan penerapan manajemen Keamanan Informasi SPBE	Biro Telematika	Pedoman Manajemen Keamanan Informasi	√		√		√
	C	Manajemen Data								
		1	Penyelenggaraan pembinaan, manajemen data, serta pendokumentasian manajemen data	Biro Telematika	Pedoman Manajemen Data SPBE	√	√	√	√	√
		2	Penyelenggaraan konsultasi, komunikasi dan koordinasi pengelolaan data	Biro Telematika	Pedoman Manajemen Data SPBE	√	√	√	√	√
		3	Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, pendampingan, supervisi dan bantuan teknis pengelolaan data	Biro Telematika	Pedoman Manajemen Data SPBE	√	√	√	√	√
		4	Pemantauan dan evaluasi pedoman dan penerapan manajemen data SPBE	Biro Telematika	Pedoman Manajemen Data SPBE	√		√		√

No	Project/Activities			UIC	Baseline	Target				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		5	Tindaklanjuti hasil evaluasi serta perbaikan pedoman dan penerapan manajemen data SPBE	Biro Telematika	KM Satu Data dan Pedoman Manajemen Data SPBE		√		√	
	D	Manajemen Manajemen Aset TIK								
		1	Penyelenggaraan pembinaan, manajemen Aset TIK, serta pendokumentasian manajemen Aset TIK	Biro Umum & Biro Telematika	Pedoman Manajemen Aset TIK	√	√	√	√	√
		2	Penyelenggaraan konsultasi, komunikasi dan koordinasi Aset TIK	Biro Umum & Biro Telematika	Pedoman Manajemen Aset TIK	√	√	√	√	√
		3	Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, pendampingan, supervisi dan bantuan teknis manajemen Aset TIK SPBE	Biro Umum & Biro Telematika	Pedoman Manajemen Aset TIK	√	√	√	√	√
		4	Pemantauan dan evaluasi pedoman dan penerapan Aset TIK SPBE	Biro Umum & Biro Telematika	Pedoman Manajemen Aset TIK	√		√		√
		5	Tindaklanjuti hasil evaluasi serta perbaikan pedoman dan penerapan manajemen Aset TIK SPBE	Biro Umum & Biro Telematika	Pedoman Manajemen Aset TIK		√		√	
	E	Manajemen Kompetensi SDM SPBE								
		1	Penyelenggaraan pembinaan, manajemen Kompetensi SDM SPBE, serta pendokumentasian manajemen Kompetensi SDM SPBE	Biro Umum & Biro Telematika	Pedoman Manajemen Kompetensi SDM SPBE	√	√	√	√	√
		2	Penyelenggaraan konsultasi, komunikasi dan koordinasi manajemen kompetensi SDM SPBE	Biro Umum & Biro Telematika	Pedoman Manajemen Kompetensi SDM SPBE	√	√	√	√	√

No	Project/Activities			UIC	Baseline	Target				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		3	Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, pendampingan, supervisi dan bantuan teknis manajemen SDM	Biro Umum & Biro Telematika	Pedoman Manajemen Kompetensi SDM SPBE	√	√	√	√	√
		4	Pemantauan dan evaluasi pedoman dan penerapan manajemen SDM TIK SPBE	Biro Umum & Biro Telematika	Pedoman Manajemen Kompetensi SDM SPBE	√		√		√
		5	Tindaklanjut hasil evaluasi serta perbaikan pedoman dan penerapan manajemen SDM TIK SPBE	Biro Umum & Biro Telematika	Pedoman Manajemen Kompetensi SDM SPBE		√		√	
	F	Manajemen Pengetahuan								
		1	Penyelenggaraan pembinaan, manajemen Pengetahuan, serta pendokumentasian manajemen Pengetahuan.	Biro Telematika	Pedoman Manajemen Pengetahuan SPBE	√	√	√	√	√
		2	Penyelenggaraan konsultasi, komunikasi dan koordinasi manajemen Pengetahuan SPBE	Biro Telematika	Pedoman Manajemen Pengetahuan SPBE	√	√	√	√	√
		3	Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, pendampingan, supervisi dan bantuan teknis manajemen Pengetahuan	Biro Telematika	Pedoman Manajemen Pengetahuan SPBE	√	√	√	√	√
		4	Pemantauan dan evaluasi pedoman dan penerapan manajemen Pengetahuan SPBE	Biro Telematika	Pedoman Manajemen Pengetahuan SPBE	√		√		√
		5	Tindaklanjut hasil evaluasi serta perbaikan pedoman dan penerapan manajemen Pengetahuan SPBE	Biro Telematika	Pedoman Manajemen		√		√	

No	Project/Activities			UIC	Baseline	Target				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
					Pengetahuan SPBE					
	G	Manajemen Perubahan								
		1	Penyelenggaraan pembinaan, manajemen Pengetahuan, serta pendokumentasian manajemen perubahan.	Biro Umum & Biro Telematika	Pedoman Manajemen Perubahan	√	√	√	√	√
		2	Penyelenggaran konsultasi, komunikasi dan koordinasi manajemen manajemen perubahan	Biro Umum & Biro Telematika	Pedoman Manajemen Perubahan	√	√	√	√	√
		3	Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, pendampingan, supervisi dan bantuan teknis manajemen perubahan	Biro Umum & Biro Telematika	Pedoman Manajemen Perubahan	√	√	√	√	√
		4	Pemantauan dan evaluasi pedoman dan penerapan manajemen perubahan	Biro Umum & Biro Telematika	Pedoman Manajemen Perubahan	√		√		√
		5	Tindaklanjuti hasil evaluasi serta perbaikan pedoman dan penerapan manajemen perubahan	Biro Umum & Biro Telematika	Pedoman Manajemen Perubahan		√		√	
	H	Manajemen Layanan								
		1	Penyelenggaraan pembinaan, manajemen Pengetahuan, serta pendokumentasian manajemen layanan	Biro Telematika	Pedoman Manajemen Layanan SPBE	√	√	√	√	√
		2	Penyelenggaran konsultasi, komunikasi dan koordinasi manajemen manajemen layanan	Biro Telematika	Pedoman Manajemen Layanan SPBE	√	√	√	√	√
		3	Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, pendampingan, supervisi dan bantuan teknis manajemen layanan	Biro Telematika	Pedoman Manajemen Layanan SPBE	√	√	√	√	√

No	Project/Activities			UIC	Baseline	Target				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		4	Pemantauan dan evaluasi pedoman dan penerapan manajemen layanan	Biro Telematika	Pedoman Manajemen Layanan SPBE	√		√		√
		5	Tindaklanjuti hasil evaluasi serta perbaikan pedoman dan penerapan manajemen layanan	Biro Telematika	Pedoman Manajemen Layanan SPBE		√		√	
3	Layanan									
		1	Peningkatan layanan perencanaan melalui penguatan kebijakan dan mekanisme penerapan perencanaan terintegrasi	Biro Perencanaan	Pedoman Manajemen Layanan SPBE	√		√		√
		2	Optimalisasi dukungan layanan perencanaan secara elektronik	Biro Perencanaan	Pedoman Manajemen Layanan SPBE		√		√	
		3	Peningkatan layanan penganggaran melalui penguatan kebijakan dan mekanisme penerapan perencanaan terintegrasi	Biro Umum	Pedoman Manajemen Layanan SPBE	√		√		√
		4	Optimalisasi dukungan layanan penganggaran secara elektronik	Biro Umum	Pedoman Manajemen Layanan SPBE		√		√	
		5	Peningkatan layanan keuangan melalui penguatan kebijakan dan mekanisme pengelolaan keuangan terintegrasi	Biro Umum	Pedoman Manajemen Layanan SPBE	√		√		√
		6	Optimalisasi dukungan layanan keuangan secara elektronik	Biro Umum	Pedoman Manajemen Layanan SPBE		√		√	
		7	Peningkatan layanan pengadaan barang dan jasa melalui penguatan kebijakan dan mekanisme penerapan pengadaan barang dan jasa terintegrasi	Biro Umum	Pedoman Manajemen Layanan SPBE	√		√		√

No	Project/Activities			UIC	Baseline	Target				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		8	Optimalisasi dukungan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Biro Umum	Pedoman Manajemen Layanan SPBE		√		√	
		9	Peningkatan layanan kepegawaian melalui penguatan kebijakan dan mekanisme pengelolaan kepegawaian terintegrasi	Biro Umum	Pedoman Manajemen Layanan SPBE	√		√		√
		10	Optimalisasi dukungan layanan kepegawaian secara elektronik	Biro Umum	Pedoman Manajemen Layanan SPBE		√		√	
		11	Peningkatan layanan kearsipan melalui penguatan kebijakan dan mekanisme pengelolaan arsip dinamis	Biro Umum	Pedoman Manajemen Layanan SPBE	√		√		√
		12	Optimalisasi dukungan layanan kearsipan secara elektronik	Biro Umum	Pedoman Manajemen Layanan SPBE		√		√	
		13	Peningkatan layanan pengelolaan barang milik negara (BMN) melalui penguatan kebijakan dan mekanisme pengelolaan barang milik negara (BMN) terintegrasi	Biro Umum	Pedoman Manajemen Layanan SPBE	√		√		√
		14	Optimalisasi dukungan layanan pengelolaan barang milik negara (BMN) secara elektronik	Biro Umum	Pedoman Manajemen Layanan SPBE		√		√	
		15	Peningkatan layanan pengawasan internal melalui penguatan kebijakan dan mekanisme pengawasan internal terintegrasi	Inspektorat	Pedoman Manajemen Layanan SPBE	√		√		√
		16	Optimalisasi dukungan layanan pengawasan internal secara elektronik	Inspektorat	Pedoman Manajemen Layanan SPBE		√		√	

No	Project/Activities			UIC	Baseline	Target				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		17	Peningkatan layanan akuntabilitas kinerja organisasi melalui penguatan kebijakan dan mekanisme pengelolaan akuntabilitas kinerja organisasi terintegrasi	Inspektorat	Pedoman Manajemen Layanan SPBE	√		√		√
		18	Optimalisasi dukungan layanan akuntabilitas kinerja organisasi secara elektronik	Inspektorat	Pedoman Manajemen Layanan SPBE		√		√	
		19	Peningkatan layanan kinerja pegawai melalui penguatan kebijakan dan mekanisme pengelolaan kinerja pegawai terintegrasi	Biro Umum	Pedoman Manajemen Layanan SPBE	√		√		√
		20	Optimalisasi dukungan layanan kinerja pegawai secara elektronik	Biro Umum	Pedoman Manajemen Layanan SPBE		√		√	
		21	Peningkatan layanan pengaduan melalui penguatan kebijakan dan mekanisme pengelolaan pengaduan layanan publik terintegrasi	Inspektorat	Pedoman Manajemen Layanan SPBE	√		√		√
		22	Optimalisasi dukungan layanan pengaduan layanan publik secara elektronik	Inspektorat	Pedoman Manajemen Layanan SPBE		√		√	
		23	Peningkatan layanan data terbuka melalui penguatan kebijakan dan mekanisme pengelolaan data terbuka terintegrasi	Biro Telematika	Pedoman Manajemen Layanan SPBE	√		√		√
		24	Optimalisasi dukungan layanan data terbuka secara elektronik	Biro Telematika	Pedoman Manajemen Layanan SPBE		√		√	
		25	Peningkatan layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum	Biro Kerjasama	Pedoman Manajemen Layanan SPBE	√		√		√

No	Project/Activities			UIC	Baseline	Target				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
			melalui penguatan kebijakan dan mekanisme layanan terintegrasi							
		26	Optimalisasi dukungan layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum secara elektronik	Biro Kerjasama	Pedoman Manajemen Layanan SPBE		√		√	
		27	Peningkatan layanan Ketahanan dan Kebangsaan Nasional terintegrasi	Direktorat Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai	Pedoman Manajemen Layanan SPBE	√		√		√
		28	Optimalisasi dukungan layanan ketahanan dan kebangsaan nasional secara elektronik	Direktorat Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai	Pedoman Manajemen Layanan SPBE		√		√	
4	Aplikasi									
		1	Implementasi Aplikasi Umum SPBE	Seluruh Unit Kerja	Kebijakan Tata Kelola SPBE	√	√	√	√	√
		2	Integrasi Aplikasi Khusus Sejenis	Seluruh Unit Kerja		√	√	√	√	√
		3	Pengembangan Web Application Firewall	Biro Telematika		√	√	√	√	√
		4	Pengembangan Lisensi Zimbra Collaboration Suite Premier - Professional Edition	Biro Telematika		√	√	√	√	√
		5	Pengembangan Aplikasi TRK (Tunjangan Remunerasi Kinerja)	Biro Telematika		√	√	√	√	√
		6	Pengembangan SLiMS Perpustakaan Lemhannas RI	Biro Telematika		√	√	√	√	√
		7	Pengembangan Portal Perpustakaan Lemhannas RI	Biro Perencanaan		√	√	√	√	√
		8	Pengembangan Lembayung	Biro Humas		√	√	√	√	√

No	Project/Activities			UIC	Baseline	Target				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		9	Pengembangan LMS KEDEPUTIAN PENDIDIKAN (Website maupun Aplikasi Mobile Android dan Ios)	Direktorat Opsdik, Bintadik		√	√	√	√	√
		10	Pengembangan LMS E-Taplai	Direktorat Sosialisasi dan Media Pemantapan Nilai		√	√	√	√	√
		11	Pengembangan Siskurtannas berbasis AI	Pusat Laboratorium		√	√	√	√	√
		12	Pengembangan Sistem Assesment Center	Pusat Laboratorium		√	√	√	√	√
		13	Pengembangan National Talent Pool	Pusat Laboratorium		√	√	√	√	√
		14	Pengembangan Siskurpimnas	Pusat Laboratorium		√	√	√	√	√
		15	Pengembangan Sistem Layanan Sertifikasi Profesi Pengajar Ketahanan Nasional	Pusat Laboratorium		√	√	√	√	√
5	Infrastruktur SPBE									
	A	Pusat Data								
			Migrasi ke Pusat Data Nasional	Biro Telematika		√	√	√	√	√
			Kajian Desain Pusat Data Strata 3	Biro Telematika		√	√	√	√	√
			Implementasi Desain Pusat Data Strata 3	Biro Telematika		√	√	√	√	√
			Kajian metode SOC, dan teknologi yang digunakan	Biro Telematika		√	√	√	√	√
			Implementasi SOC	Biro Telematika		√	√	√	√	√
			Pemeliharaan SOC	Biro Telematika		√	√	√	√	√
	B	Sistem Penghubung Layanan								

No	Project/Activities			UIC	Baseline	Target				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Kajian API Gateway	Pusat Laboratorium		√	√	√	√	√
			Pengembangan API Gateway	Pusat Laboratorium		√	√	√	√	√
			Pemeliharaan dan Pengamanan API Gateweay	Pusat Laboratorium		√	√	√	√	√
6	Keamanan SPBE									
	A	Standar dan Prosedur Keamanan								
			Kebijakan Keamanan SPBE	Biro Telematika		√	√	√	√	√
			SOP Keamanan Data dan Informasi	Biro Telematika		√	√	√	√	√
			SOP Keamanan Aplikasi SPBE	Biro Telematika		√	√	√	√	√
			SOP Keamanan SPLP	Biro Telematika		√	√	√	√	√
	B	Kesadaran Keamanan SPBE				√	√	√	√	√
			Penyusunan kurikulum sosialisasi, dan simulasi kesadaran keamanan SPBE	Biro Telematika		√	√	√	√	√
			Sosialisasi kesadaran keamanan SPBE	Biro Telematika		√	√	√	√	√
	C	Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi (VAPT)								
			Identifikasi ruang lingkup penilaian kerentanan dan pengujian penetrasi (VAPT) untuk infrastruktur jaringan, dan aplikasi.	Biro Telematika		√	√	√	√	√
			Pelaksanaan penilaian kerentanan dan pengujian penetrasi oleh pihak internal maupun eksternal yang independen.	Biro Telematika		√	√	√	√	√

No	Project/Activities			UIC	Baseline	Target				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Evaluasi hasil pelaksanaan penilaian kerentanan dan pengujian penetrasi	Biro Telematika		√		√		√
7	Audit TIK									
	A	Audit Infrastruktur SPBE								
		1	Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Infrastruktur SPBE	Biro Telematika	Pedoman Audit TIK	√				
		2	Menyelenggarakan kegiatan audit Infrastruktur SPBE Internal	Biro Telematika	Pedoman Audit TIK	√		√		√
		3	Menyelenggarakan kegiatan audit Infrastruktur SPBE Eksternal	Biro Telematika	Pedoman Audit TIK		√		√	
	B	Audit Aplikasi								
		1	Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Aplikasi SPBE	Biro Telematika	Pedoman Audit TIK	√				
		2	Menyelenggarakan kegiatan audit Aplikasi SPBE Internal	Biro Telematika	Pedoman Audit TIK	√		√		√
		3	Menyelenggarakan kegiatan audit Aplikasi SPBE Eksternal	Biro Telematika	Pedoman Audit TIK		√		√	
	C	Audit Keamanan								
		1	Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Keamanan SPBE	Biro Telematika	Pedoman Audit TIK	√				
		2	Menyelenggarakan kegiatan audit Keamanan SPBE Internal	Biro Telematika	Pedoman Audit TIK	√		√		√
		3	Menyelenggarakan kegiatan audit Keamanan SPBE Eksternal	Biro Telematika	Pedoman Audit TIK		√		√	√

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE ini disusun guna memberikan gambaran kondisi saat ini dan masa mendatang domain arsitektur yang selaras dengan Referensi Arsitektur SPBE Nasional mencakup 6 domain utama yaitu proses bisnis, data dan informasi, layanan, aplikasi, infrastruktur dan keamanan. Sementara itu, Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan acuan kegiatan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mencakup 7 domain utama yaitu Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK.

Keputusan Gubernur ini akan dijadikan sebagai landasan dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **15 Januari 2025**

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



DR. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.